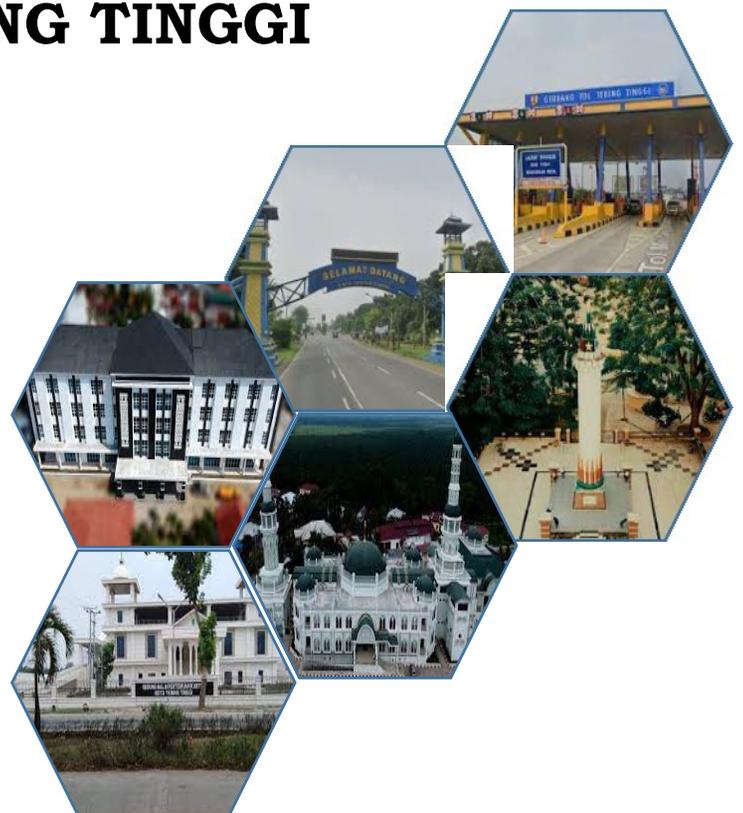




**ESA HILANG  
DUA TERBILANG**

# RKPD

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
TAHUN 2025 KOTA TEBING TINGGI**



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2024**



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Naegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 388);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 15);

33. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 Nomo 4);
34. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
35. Peraturan Wali Kota Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah khusus daerah dengan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 yang dihitung sejak tahun 2023-2026.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2025 mengacu pada RPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis daerah, RKP, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan dengan menggunakan bahan dari Rancangan Renja SKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
  - a. pedoman di dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD;
  - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD; dan
  - c. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

### Pasal 3

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan; dan
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

### Pasal 4

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD.

### Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2025, RKPD Provinsi, RKP serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD Tahun 2025 kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (4) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 4 Juli 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN  
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025



BAB VII  
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi serta rencana kerja dan pendanaan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2025.

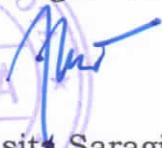
RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi merupakan lanjutan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi di Tahun Ketiga berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Perangkat Daerah dan menjadi pedoman Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Siti Masita Saragih



## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum dan Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-8
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-24
2.1.4 Aspek Daya Saing .....	II-52
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD serta Realisasi RPD .....	II-55
2.3 Penelaahan Pokok- Pokok Pikiran ( pikir) DPRD .....	II-95
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-96
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional .....	III-1
3.1.2 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara .....	III-2
3.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi.....	III-3
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah .....	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-11
3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-13
3.2.2 Pendapatan Daerah .....	III-13
3.2.3 Belanja Daerah .....	III-16
3.2.4 Pembiayaan Daerah....	III-18
3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).....	III-21
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota .....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 .....	IV-1

4.3	Telaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi .....	IV-19
4.4	Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2025.....	IV-36
4.5	Inovasi Daerah .....	IV-37
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi/CSR/Hibah.....	V-1
5.2	Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi.....	V-2
5.3	Sinergitas Program/kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi .....	V-6
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Indikator Makro Pembangunan.....	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama ( IKU).....	VI-2
6.3	Indikator Kinerja Daerah ( IKD).....	VI-4
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 (miliar rupiah).....	II- 9
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHRB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 (miliar rupiah) .....	II- 10
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 (persen).....	II- 11
Tabel 2.4	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2019- 2023 (persen).....	II-12
Tabel 2.5	Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 .....	II-22
Tabel 2.6	Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi .....	II-23
Tabel 2.7	Jumlah Seni Budaya dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 .....	II-24
Tabel 2.8	Organisasi Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023.....	II-24
Tabel 2.9	Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tebing Tinggi.....	II-24
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi .....	II-25
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tebing Tinggi .....	II-26
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023.....	II-26
Tabel 2.13	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah (jiwa) Kota Tebing Tinggi.....	II-27
Tabel 2.14	Rasio Guru dan Murid Kota Tebing Tinggi.....	II-28
Tabel 2.15	Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi.....	II-28
Tabel 2.16	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi .....	II-32
Tabel 2.17	Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi .....	II-33
Tabel 2.18	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi .....	II-34
Tabel 2.19	Indikator Bencana Kebakaran Kota Tebing Tinggi .....	II-34
Tabel 2.20	Indikator Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi.....	II-35
Tabel 2.21	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi.....	II-36
Tabel 2.22	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi.....	II-37
Tabel 2.23	Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi.....	II-37
Tabel 2.24	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi.....	II-38
Tabel 2.25	Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi.....	II-39
Tabel 2.26	Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi .....	II-39

Tabel 2.27	Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi.....	II-41
Tabel 2.28	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi .....	II-42
Tabel 2.29	Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi .....	II-42
Tabel 2.30	Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi.....	II-43
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi.....	II-44
Tabel 2.32	Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi.....	II-45
Tabel 2.33	Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi.....	II-45
Tabel 2.34	Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.....	II-46
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.....	II-46
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB.....	II-47
Tabel 2.37	Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi .....	II-48
Tabel 2.38	Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi.....	II-48
Tabel 2.39	Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi.....	II-49
Tabel 2.40	Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi .....	II-49
Tabel 2.41	Opini BPK Tahun 2019-2023.....	II-50
Tabel 2.42	Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi.....	II-51
Tabel 2.43	Predikat SAKIP Tahun 2019-2023 .....	II-51
Tabel 2.44	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023 .....	II-52
Tabel 2.45	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi ...	II-52
Tabel 2.46	Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 .....	II-53
Tabel 2.47	Jumlah Kriminalitas Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023. ....	II-54
Tabel 2.48	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kota Tebing Tinggi.....	II-54
Tabel 2.49	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan III Kota Tebing Tinggi.....	II-56
Tabel 2.50	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi.....	II-63
Tabel 2.51	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tw III Kota Tebing Tinggi .....	II-77
Tabel 2.52	Rekap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan kewenangan Kota Tebing Tinggi.....	II-95
Tabel 2.53	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II- 105
Tabel 3.1	Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional .....	III-2
Tabel 3.2.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-203.....	III-3

Tabel 3.3	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 .....	III-5
Tabel 3.4	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.....	III-8
Tabel 3.5	PDRB Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi ....	III-11
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024 .....	III-15
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024 .....	III-17
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 s/d Tahun 2024 .....	III-19
Tabel 4.1.	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024 dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara.....	IV-2
Tabel 4.2	Tujuan, sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi.....	IV-5
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dan Program Prioritas Tahun 2024 .....	IV-6
Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-10
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Provsu dan Nasional. ....	IV-12
Tabel 4.6	Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023.....	IV-20
Tabel 4.7	Inovasi Daerah .....	IV-38
Tabel 5.1	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi .....	V-2
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 .....	V-4
Tabel 5.3	Sinergitas program/kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi .....	V-7
Tabel 6.1.	Penetapan Indikator makro pembangunan. ....	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	VI-3
Tabel 6.3	Keselarasan IKU, IKD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.....	VI-4
Tabel 6.4.	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....	VI-4

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Alur Penyusunan RKPD.....	I- 3
Gambar 1.2	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I- 6
Gambar 1.3	Kedudukan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I- 7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Tebing Tinggi.....	II- 1
Gambar 2.2	Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.....	II- 3
Gambar 2.3	Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Tahun 2023 di Kota Tebing Tinggi.....	II- 4
Gambar 2.4	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.....	II- 6
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi .....	II- 7
Gambar 2.6	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi .....	II- 7
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 .....	II- 8
Gambar 2.8	PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi (Juta Rupiah).....	II-14
Gambar 2.9	Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2019-2023.....	II-15
Gambar 2.10	Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 .....	II-16
Gambar 2.11	Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 .....	II-17
Gambar 2.12	IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.....	II-18
Gambar 2.13	Rata-rata Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 .....	II-19
Gambar 2.14	Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 .....	II-20
Gambar 2.15	Angka Harapan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023.....	II-21
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tebing Tinggi tahun 2019-2023.....	II-23



## KATA PENGANTAR

Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi disusun sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 16 (1) b. Adapun materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi terdiri dari analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan Renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan aspirasi masyarakat, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan dengan memperhatikan saran maupun masukan para pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini juga telah memperhatikan nomenklatur perencanaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi ini merupakan pedoman sekaligus acuan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025, diharapkan dengan adanya pedoman kerja bagi Perangkat Daerah, pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi dapat berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam menikmati hasil pembangunan yang akan dilaksanakan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional pemerintah. RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 menjadi pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2025.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2025 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, RPD Provinsi Sumatera Utara, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, RPJPD Kota Tebing Tinggi, RPD Kota Tebing Tinggi, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan, dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan *Top Down - Bottom Up Planning*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara pendekatan *Top down - Bottom Up Planning* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, hingga Nasional.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan dan sub kegiatan
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Proses penyusunan dokumen RKPD memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis pada *e-planning* dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Sebagaimana telah disebutkan di atas penyusunan tersebut dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.

Tahap penyusunan RKPD mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- d. Penyusunan rancangan RKPD
- e. Pelaksanaan musrenbang RKPD
- f. Perumusan rancangan akhir RKPD
- g. Penetapan RKPD

Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat sebagai berikut :





9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021sebagaiman telah diubah terakhir Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

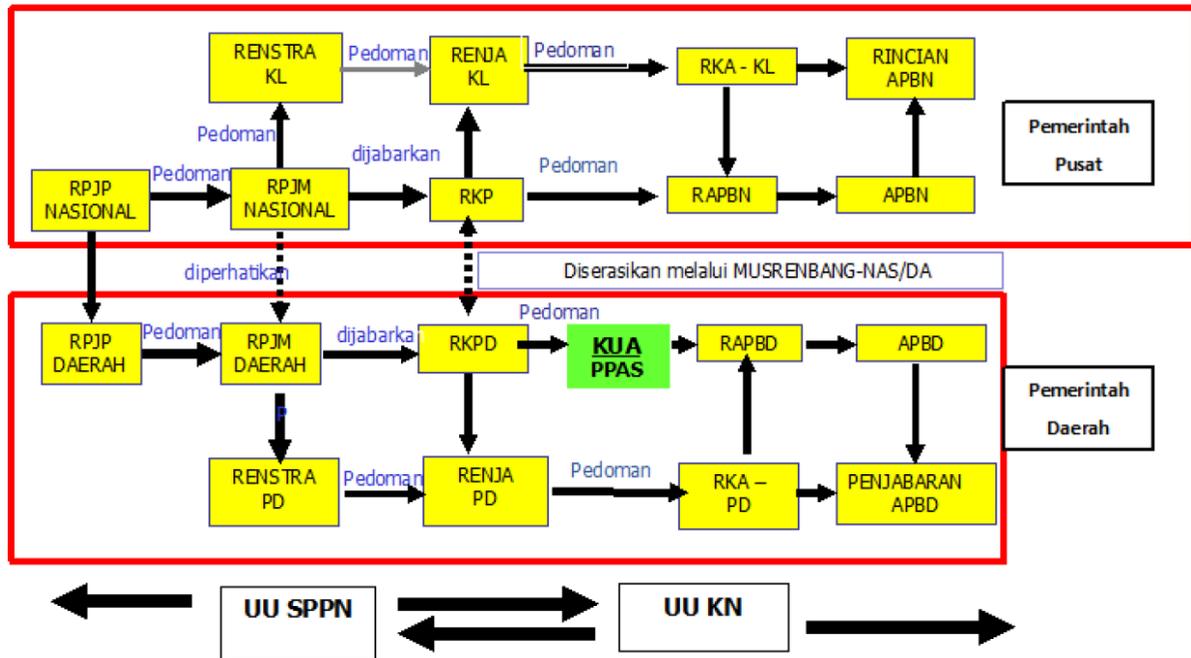
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
25. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 6);
27. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 Nomor 9);

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

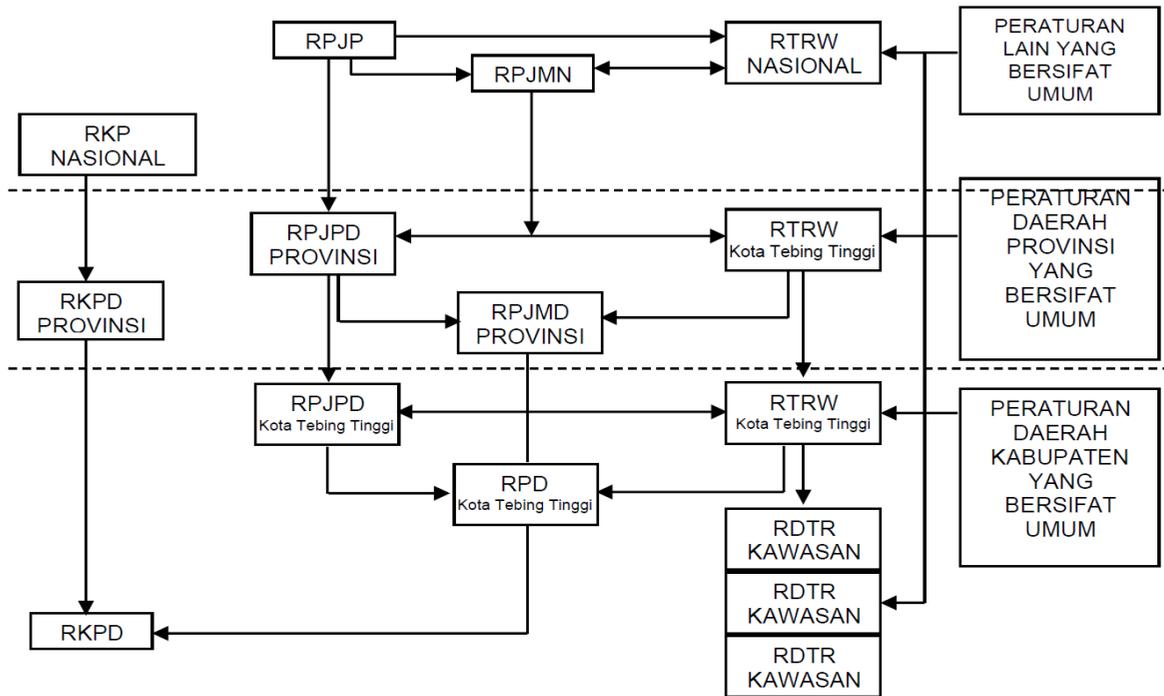
- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional Tahun 2025 melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPD 2023-2026 yang didalamnya memuat arah pembangunan Daerah.
- RKPD tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD Tahun 2025 nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RKP 2025, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD provinsi. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan PPAS, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rancangan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan rancangan Renja PD. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja PD.

Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu Perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran.

Selain itu kedudukan RKPD tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Kedudukan RKPD Kota Tebing Tinggi secara lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 1.3**  
Kedudukan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

RKPD Tahun 2025 disusun untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kota Tebing Tinggi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Tebing Tinggi maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

### 1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai :

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
2. Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
3. Pedoman bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 serta penyusunan RAPBD Tahun 2025
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD/RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal

#### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah

#### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

## **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum

### 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

## **BAB III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah**

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana .

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### 3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

## **BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah**

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan menengah yang diambil dari dokumen RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi.

### 4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) Tahun 2025 berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPD Provinsi Sumatera utara dan RPJMN.

## **BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**

### 5.1 Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2025

### 5.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota untuk Perencanaan Tahun 2025. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud

### 5.3 Arah Pembangunan Kewilayahan

Berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kota Tebing Tinggi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kota Tebing Tinggi

### 5.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah



Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

## **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

## **BAB VII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

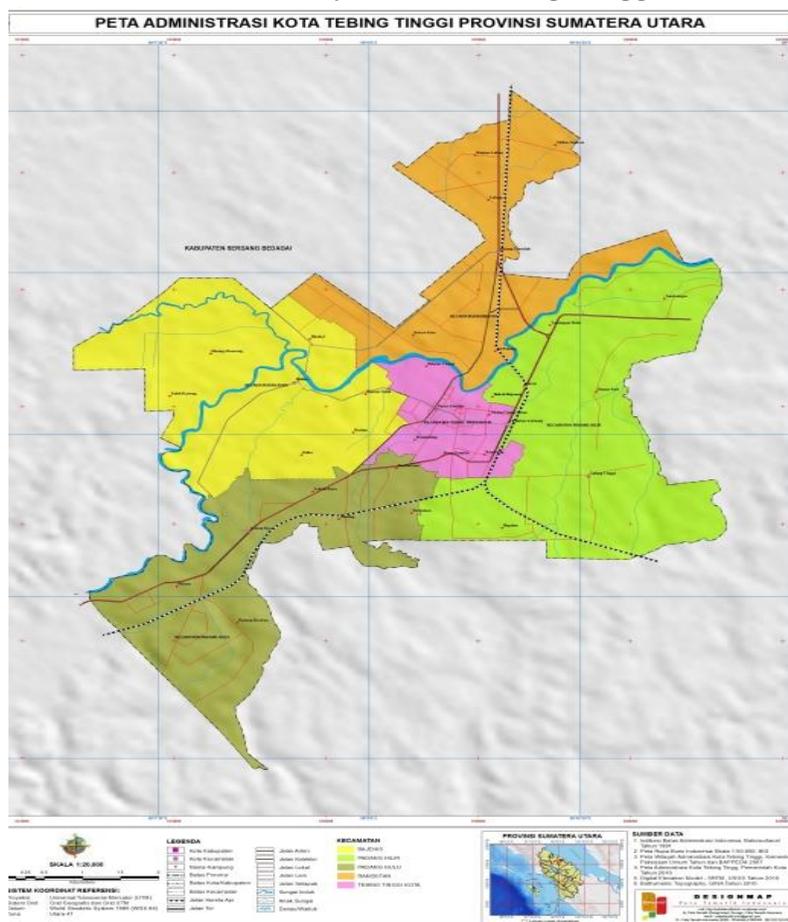
#### 2.1 Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

###### A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tebing Tinggi salah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang letaknya tidak jauh dari Ibukota Provinsi yaitu 78 kilometer dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi memiliki 35 Kelurahan dengan 179 Lingkungan, dimana Kecamatan Padang Hilir adalah kecamatan terluas dengan luas 11,441 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bajenis merupakan Kecamatan yang ketinggiannya terendah yaitu 18 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 39,17 Km<sup>2</sup> ( Sumber BPS Tebing Tinggi Dalam Angka 2024).

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kota Tebing Tinggi**



Sumber : RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2032

Kota Tebing Tinggi berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan Ibukota Provinsi Sumatera Utara serta terletak pada Jalur Lintas Utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera Utara melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi-Sumatera Utara-Parapat-Balige-Siborong-borong. Batas wilayah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Wilayah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai
- c. Wilayah Timur berbatasan dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- d. Wilayah Barat berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai

Secara administratif Kota Tebing Tinggi terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kelurahan dan 179 Lingkungan yaitu :

1. **Kecamatan Padang Hulu** dengan luas wilayah 8,5110 km<sup>2</sup> atau 22,14% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 39 Lingkungan :  
(1) Kelurahan Pabatu, (2) Kelurahan Lubuk Baru, (3) Kelurahan Persiakan, (4) Kelurahan Bandar Sono, (5) Kelurahan Tualang, (6) Kelurahan Lubuk Raya, (7) Kelurahan Padang Merbau.
2. **Kecamatan Rambutan** dengan luas wilayah 5,9350 km<sup>2</sup> atau 15,44% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 28 Lingkungan :  
(1) Kelurahan Rantau Laban, (2) Kelurahan Sri Padang, (3) Kelurahan Karya Jaya, (4) Kelurahan Lalang, (5) Kelurahan Tanjung Marulak, (6) Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, (7) Mekar Sentoso.
3. **Kecamatan Padang Hilir** dengan luas wilayah 11,4410 km<sup>2</sup> atau 29,76% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 35 Lingkungan :  
(1) Kelurahan Bagelen, (2) Kelurahan Tebing Tinggi, (3) Kelurahan Tambangan, (4) Kelurahan Satria, (5) Kelurahan Deblod Sundoro, (6) Kelurahan Damar Sari, (7) Kelurahan Tambangan Hulu.
4. **Kecamatan Tebing Tinggi Kota** dengan luas wilayah 3,4730 km<sup>2</sup> atau 9,04% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 43 Lingkungan :  
(1) Kelurahan Mandailing, (2) Kelurahan Pasar Gambir, (3) Kelurahan Rambung, (4) Kelurahan Tebing Tinggi Lama, (5) Kelurahan Pasar Baru, (6) Kelurahan Badak Bejuang, (7) Kelurahan Bandar Utama.
5. **Kecamatan Bajenis** dengan luas wilayah 9,0780 km<sup>2</sup> atau 23,62% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 34 Lingkungan :  
(1) Kelurahan Bulian, (2) Kelurahan Pelita, (3) Kelurahan Durian, (4) Kelurahan Bandar Sakti, (5) Kelurahan Teluk Karang, (6) Kelurahan Pinang Mancung, (7) Kelurahan Berohol.

## B. Kondisi Geografis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Kota Tebing Tinggi secara geografis terletak diantara 3°19'00"-

3°21'00" Lintang Utara dan 98°11'-98°21' Bujur Timur dan dikelilingi oleh Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di jalan penghubung antara pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

### C. Topografi

Kota Tebing Tinggi berada di dataran rendah Pulau Sumatera (18-34 m) diatas permukaan laut (dpl) dengan memiliki topografi mendatar dan bergelombang. Topografi mendatar memiliki kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2% sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15%. Kota Tebing Tinggi didominasi oleh topografi mendatar hampir 75% dari wilayah. Kemudian Topografi kemiringan lereng berkisar antara 8-15% hanya sedikit berada di wilayah Kota Tebing Tinggi sehingga menunjukkan sedikitnya potensi akan bencana longsor.

Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di Bajenis yaitu 18 meter diatas permukaan laut, sedangkan tertinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yaitu 34 meter di atas permukaan laut. Tinggi wilayah kecamatan di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi**

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Padang Hulu</b>	<b>33</b>
<b>Tebing Tinggi Kota</b>	<b>34</b>
<b>Rambutan</b>	<b>30</b>
<b>Bejenis</b>	<b>18</b>
<b>Padang Hilir</b>	<b>33</b>

Sumber : BPS Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Kecamatan Bajenis memiliki ketinggian paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan ketinggian 18 meter diatas permukaan laut seluas 9,0780 km<sup>2</sup> dengan luas 23,62% dari luas daratan Kota Tebing Tinggi, sehingga mengakibatkan Kecamatan Bajenis merupakan kawasan rawan banjir.

### D. Geologi

Berdasarkan data dari Peta Geologi Lembar Tebing Tinggi, Sumatera menunjukkan bahwa kondisi geologi Kota Tebing Tinggi terbentuk dari dua jenis batuan, Batuan Sedimen dan Batuan Gunung Api. Keadaan tersebut menunjukkan kondisi struktur geologi Kota Tebing Tinggi sama dengan struktur geologi daerah sekitarnya (Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang). Kondisi geologi Kota Tebing Tinggi ini umumnya memiliki karakteristik tanah yang subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai.

## E. Hidrologi

Kota Tebing Tinggi dilintasi oleh aliran 4 sungai yaitu Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, Sungai Sibarau. Sungai Padang merupakan sungai utama yang mempunyai panjang sekitar  $\pm 16,22$  km dan lebar  $\pm 65$  m.

## F. Klimatologi

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian 18-34 m di atas permukaan laut, maka temperature udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar antara  $25^{\circ}$ - $27^{\circ}$ C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi mempunyai musim kemarau dan musim penghujan.

**Tabel 2.2**  
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Tahun 2023 di Kota Tebing Tinggi

Bulan Month	Hari Hujan Rainfall	Curah Hujan Rainy Days
(1)	(3)	(4)
Januari/January	10	81
Februari/February	5	16
Maret/March	11	224
April/April	4	40
Mei/May	8	87
Juni/June	8	101
Juli/July	8	47
Agustus/August	13	172
September/September	14	76
Oktober/October	15	129
November/November	13	111
Desember/December	17	161
<b>Rata-rata/Average</b>	<b>11</b>	<b>104</b>

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan publikasi BPS dalam Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024, pada Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 104 hari dengan curah hujan berkisar antara 16-224 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan curah hujan 224 mm.

## G. Penggunaan Lahan

Sesuai dengan Dokumen RTRW Tahun 2013-2033 yang memuat penggunaan lahan Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tebing Tinggi didominasi Pemukiman (1.198,89 Ha), Perkebunan (933,86 Ha), Tanaman campuran (578,75 Ha), ladang (443,79 Ha) dan Sawah (277,52 Ha).

### 2.1.1.1 Potensi Kawasan Sumber Daya

Pengembangan Potensi Kota Tebing Tinggi meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.

2. Kawasan *hinterland* untuk menopang celah fungsi kegiatan perkotaan bagi daerah-daerah sekitarnya untuk bidang jasa dan perdagangan.
3. Kawasan Strategis Ekonomi meliputi Kawasan strategis ekonomi Bajenis-Berohol di Kelurahan Pinang Mancung.
4. Kawasan Pusat Pelayanan Kota yaitu Terminal Bandar Kajum di Kelurahan Lalang, Kelurahan Rantau Laban dan Kelurahan Mekar Sentosa di Kecamatan Rambutan.
5. Kawasan Sosial Budaya berada di pusat kota.
6. Kawasan lingkungan dan pariwisata disepanjang Sungai Padang dan Sungai Bahilang.

#### 2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kota Tebing Tinggi termasuk daerah rawan bencana banjir yang terjadi akibat luapan air sungai dan rawan bencana kebakaran.

- a. Permasalahan banjir di Kota Tebing Tinggi adalah Banjir Bandang yang biasa terjadi 3-4 kali dalam setahun. Banjir tersebut diakibatkan curah hujan yang tinggi di Hulu Sungai sehingga meluap air Sungai Bahilang dan Sungai Padang. Kawasan yang berpotensi rawan bencana banjir adalah sebagai berikut:
  1. Kecamatan Rambutan meliputi Kelurahan Sri Padang, Kelurahan Tanjung Marulak, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dan Kelurahan Karya Jaya.
  2. Kecamatan Padang Hilir meliputi Kelurahan Tebing Tinggi, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Tambangan Hulu.
  3. Kecamatan Bajenis meliputi Kelurahan Bulian, Kelurahan Bandar Sakti, Kelurahan Pinang Mancung dan Kelurahan Berohol.
  4. Kecamatan Padang Hulu meliputi Kelurahan Lubuk Raya, Kelurahan Bandarsono dan Kelurahan Persiakan
  5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota meliputi Kelurahan Mandailing, Kelurahan Badak Bejuang, Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan pasar Baru dan Kelurahan Pasar Gambir.
- b. Bencana lain yang terjadi di Kota Tebing Tinggi adalah Bencana Kebakaran. Secara umum faktor utama penyebab kebakaran adalah listrik, kompor, rokok, obat nyamuk ataupun kelalaian lainnya yang tidak dapat diprediksikan. Tantangan penanggulangan kejadian kebakaran adalah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang masih relatif terbatas.

**Gambar 2.2**  
Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

**Nilai IKD 2023 dan IRB 2023 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara**

KABUPATEN/KOTA	IKD 2023	IRB 2023
Nias	Tidak Menilai	211.70
Mandailing Natal	0,31	214.80
Tapanuli Selatan	0,49	152.95
Tapanuli Tengah	0,34	187.85
Tapanuli Utara	0,31	118.00
Toba Samosir	0,26	107.20
Labuhanbatu	0,29	151.20
Asahan	Tidak Menilai	146.85
Simalungun	Tidak Menilai	80.07
Dairi	Tidak Menilai	111.21
Karo	0,45	112.97
Deli Serdang	0,47	121.26
Langkat	0,25	142.62
Nias Selatan	0,33	193.14
Humbang Hasundutan	0,33	127.66
Pakpak Bharat	0,42	101.05
Samosir	0,28	114.00
Serdang Bedagai	0,41	120.18
Batu Bara	Tidak Menilai	143.20
Padang Lawas Utara	0,33	137.57
Padang Lawas	Tidak Menilai	152.76
Labuhanbatu Selatan	0,21	131.20
Labuhanbatu Utara	0,25	155.20
Nias Utara	Tidak Menilai	214.00
Nias Barat	0,23	210.80
Kota Sibolga	0,23	167.20
Kota Tanjung Balai	0,36	110.72
Kota Pematangsiantar	0,29	91.20
Kota Tebing Tinggi	0,49	86.61
Kota Medan	0,69	90.05
Kota Binjai	0,21	103.20
Kota Padang Sidempuan	Tidak Menilai	128.00
Kota Gunungsitoli	0,37	207.67

\*) Tautan untuk mengunduh file excel IKD Kabupaten/Kota Final 2023 : [https://bit.ly/IKD\\_Sumatera\\_Utara\\_2023\\_Final](https://bit.ly/IKD_Sumatera_Utara_2023_Final)

Sumber : BNPB Tahun 2024

Dilihat dari gambar diatas, Indeks Risiko Bencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 sebesar 86,61 kelas risiko sedang. Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sudah terjadi di Kota Tebing Tinggi, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat kabupaten maupun masyarakat di dalam upaya pengurangan risiko bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna meminimalkan kerentanan yang dimiliki, serta pemetaan terhadap segala ancaman yang mungkin dapat terjadi. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah penetapan kelurahan tangguh bencana.

**2.1.1.3 Kondisi Demografis**

Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 sebanyak 178.914 jiwa yang terdiri atas 89.025 jiwa penduduk laki-laki dan 89.889 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,04.

**Tabel 2.3**

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi

umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	8.203	7.808	16.011
5-9	7.979	7.571	15.550
10-14	7.944	7.370	15.314
15-19	7.105	6.791	13.896
20-24	6.909	6.776	13.685
25-29	7.387	7.265	14.652
30-34	7.278	7.085	14.363
35-39	6.797	6.652	13.449
40-44	6.302	6.264	12.566
45-49	5.489	5.693	11.182
50-54	4.701	5.312	10.013
55-59	4.143	4.801	8.944
60-64	3.651	3.994	7.645
65-69	2.612	2.983	5.595
70-74	1.538	1.853	3.391
75+	987	1.671	2.658
<b>JUMLAH</b>	<b>89.025</b>	<b>89.889</b>	<b>178.914</b>

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Kepadatan penduduk di Tebing Tinggi mencapai 4,65 ribu jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 5 orang. Kepadatan penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan kepadatan sebesar 6,86 ribu jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Padang Hilir sebesar 3,60 ribu jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi yang semakin meningkat, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui perangkat daerah terkait pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan permukiman dengan metode rumah susun seperti program *backlog* perumahan.

**Tabel 2.4**

Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi

Wilayah	2023	Luas Wilayah	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Padang Hulu	33.858	8,511	1,39
Tebing Tinggi Kota	23.826	3,473	-0,46
Rambutan	39.826	5,935	1,41
Bajenis	40.310	9,078	1,06
Padang Hilir	41.274	11,441	2,00
<b>Total</b>	<b>178.914</b>	<b>38,438</b>	<b>1,21</b>

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

**2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

**2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

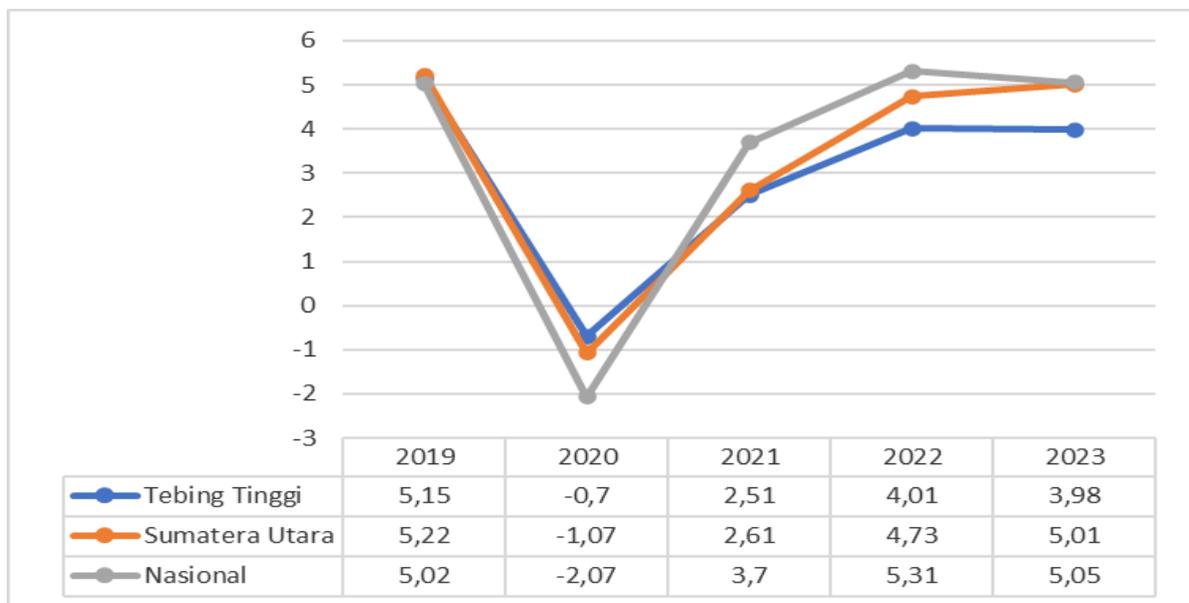
**A. Pertumbuhan PDRB**

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 sebesar 2,51 persen, naik sebesar 1,50 persen di tahun 2022 menjadi 4,01 persen Namun nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,73 persen dan 5,31 persen.

Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,01 persen dan 5,05 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi lebih rendah dari Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.3**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023**



*Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024*

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2023 mencapai peningkatan menjadi 4.352,75 miliar rupiah. Dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.186,31 miliar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 166,44 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir PDRB Kota Tebing Tinggi berada pada tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha pada di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55,52	56,81	57,13	59,33	61,18
B	Pertambangan dan Penggalian	6,41	6,65	6,89	7,14	7,47
C	Industri Pengolahan	493,54	492,19	500,45	506,61	503,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,50	7,88	8,18	8,55	8,61
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,38	9,34	9,40	9,72	9,92
F	Konstruksi	596,72	561,39	585,59	598,49	615,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	934,32	930,67	967,98	1.007,66	1.050,01
H	Transportasi dan Pergudangan	320,37	314,97	317,77	347,42	368,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,49	176,37	176,03	190,15	200,50
J	Informasi dan Komunikasi	104,04	111,61	118,94	130,06	140,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	182,40	187,70	198,61	206,88	217,69
L	Real Estate	316,51	322,81	323,90	339,06	351,94
M,N	Jasa Perusahaan	16,84	16,74	16,77	17,76	19,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	399,44	397,65	398,56	398,91	411,69
P	Jasa Pendidikan	241,99	245,91	250,91	263,25	283,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,65	48,17	47,40	51,62	55,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	39,93	39,54	40,26	43,69	47,75
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>3.954,03</b>	<b>3.926,39</b>	<b>4.024,78</b>	<b>4.186,31</b>	<b>4.352,75</b>

*Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024*

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan dari 5.924,20 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar 7.428,29 miliar rupiah pada tahun 2023. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas menjadi kontributor terkecil dalam pembentukan

PDRB Kota Tebing Tinggi. Secara umum seluruh sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2023.

**Tabel 2.6**
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	74,27	78,16	79,22	86,86	93,29
B	Pertambangan dan Penggalian	8,10	8,52	8,96	9,66	10,43
C	Industri Pengolahan	726,29	724,73	776,01	850,47	853,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,30	8,72	9,12	9,71	9,97
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,77	13,79	13,99	14,61	15,16
F	Konstruksi	885,21	860,09	919,98	1.004,61	1.089,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.404,95	1.453,71	1.552,48	1.710,78	1.847,66
H	Transportasi dan Pergudangan	470,83	486,66	505,27	566,28	625,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	245,26	241,13	241,13	264,74	283,68
J	Informasi dan Komunikasi	113,32	122,43	133,88	150,75	164,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	293,24	300,38	331,40	371,30	397,55
L	Real Estat	491,46	515,02	530,97	561,72	585,94
M,N	Jasa Perusahaan	26,57	27,87	28,70	32,36	36,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	671,40	697,20	698,27	737,07	800,74
P	Jasa Pendidikan	369,61	386,58	395,68	418,79	457,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,66	70,51	69,93	78,87	87,23
R,S, T,U	Jasa Lainnya	52,97	53,65	54,97	61,69	69,76
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5.924,20</b>	<b>6.049,20</b>	<b>6.349,90</b>	<b>6.930,27</b>	<b>7.428,29</b>

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Pemulihan ekonomi terus membaik yang terlihat dari tumbuhnya ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha. Seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi dengan dua sektor mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sektor jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,30% (y-o-y). Selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi

sebesar 8,14%. Sementara itu lapangan usaha sektor industri pengolahan menjadi sektor yang paling rendah pertumbuhannya, dengan hanya tumbuh sebesar -0,53%.

**Tabel 2.7**
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 (persen)**

<b>Lapangan Usaha</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,38	2,32	0,57	3,85	3,11
B	Pertambangan dan Penggalian	2,24	3,84	3,60	3,60	4,57
C	Industri Pengolahan	5,40	-0,27	1,68	1,23	-0,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,36	5,11	3,76	4,54	0,69
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8,77	-0,42	0,59	3,44	2,06
F	Konstruksi	4,95	-5,92	4,31	2,20	2,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,55	-0,39	4,01	4,10	4,20
H	Transportasi dan Pergudangan	6,00	-1,69	0,89	9,33	6,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	-2,28	-0,19	8,02	5,44
J	Informasi dan Komunikasi	6,00	7,27	6,58	9,35	8,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	2,91	5,81	4,16	5,23
L	Real Estat	2,91	1,99	0,34	4,68	3,80
M,N	Jasa Perusahaan	2,34	-0,60	0,21	5,88	8,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,81	-0,45	0,23	0,09	3,20
P	Jasa Pendidikan	4,99	1,62	2,03	4,92	7,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,19	-0,99	-1,60	8,91	6,67
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,21	-0,99	1,83	8,51	9,30
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,15</b>	<b>-0,70</b>	<b>2,51</b>	<b>4,01</b>	<b>3,98</b>

*Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024*

Sektor Lapangan Usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,87%. Kemudian sektor Konstruksi dan Industri Pengolahan menyumbang pembentukan PDRB masing-masing sebesar 14,67% dan 11,49%. Sementara itu lapangan usaha yang memiliki kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 0,14%.

**Tabel 2.8**
**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 (persen)**

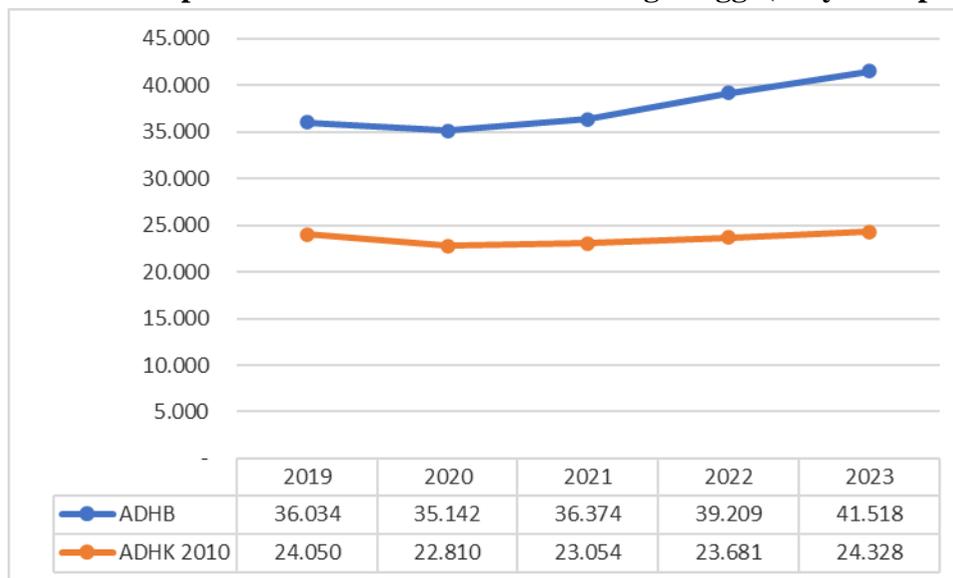
Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,25	1,29	1,25	1,25	1,26
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
C	Industri Pengolahan	12,26	11,98	12,22	12,27	11,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20
F	Konstruksi	14,94	14,22	14,49	14,49	14,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,72	24,03	24,45	24,68	24,87
H	Transportasi dan Pergudangan	7,95	8,05	7,96	8,17	8,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	3,99	3,80	3,83	3,82
J	Informasi dan Komunikasi	1,91	2,02	2,11	2,17	2,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,95	4,97	5,22	5,36	5,35
L	Real Estat	8,30	8,51	8,36	8,10	7,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,45	0,46	0,45	0,47	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,33	11,53	11,00	10,63	10,78
P	Jasa Pendidikan	6,24	6,39	6,23	6,04	6,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,17	1,10	1,14	1,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,89	0,89	0,87	0,89	0,94
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

### B. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. PDRB Perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan dan tingkat pembangunan di suatu wilayah. Maka dari itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

**Gambar 2.4**  
**PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi (Milyar Rupiah)**



Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Dari data diatas diperoleh PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 sebesar Rp.41.518.749,52 per jiwa per tahun. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.24.328.718,37 per jiwa per tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di Kota Tebing Tinggi lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2023. Secara umum dapat terlihat bahwa PDRB per kapita di Kota Tebing Tinggi tahun 2019-2023 mengalami tren yang positif, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023.

### C. Laju Inflasi

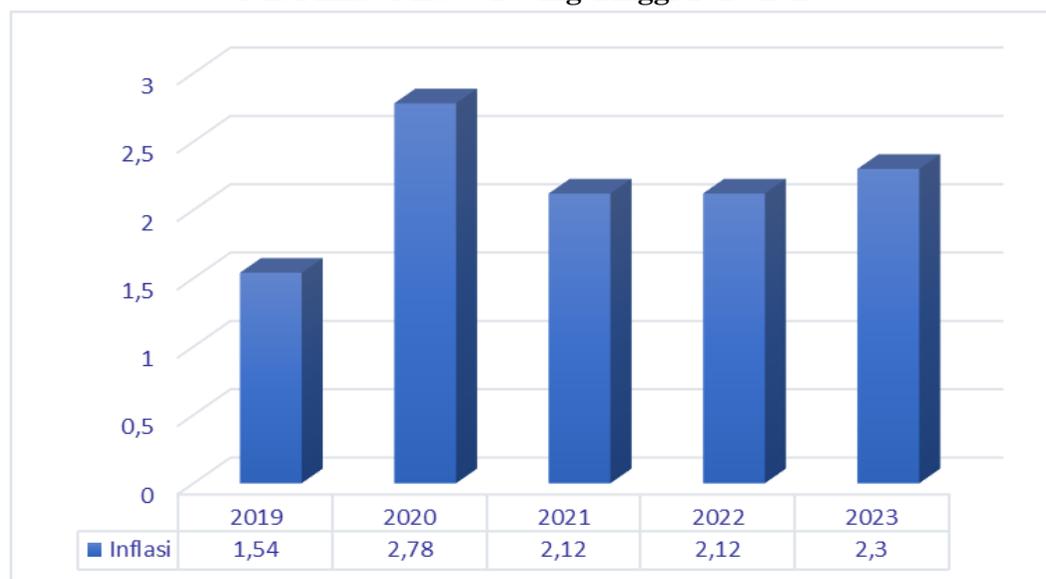
Salah satu faktor fundamental dalam Indikator Makro Ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Untuk Kota Tebing Tinggi besaran inflasi daerah lebih dominan diakibatkan oleh beberapa faktor seperti; tingginya konsumsi daerah yang tidak diimbangi oleh faktor produksi serta kondisi geografis sebagai salah satu daerah yang memiliki jarak yang cukup jauh dari ibukota provinsi serta akses jalan yang kurang baik sehingga distribusi barang menjadi terganggu.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan faktor konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Untuk mengetahui besaran inflasi digunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat mengukur kenaikan harga-harga yang terlingkat meningkat dari tahun ke tahun. Angka inflasi Kota Tebing Tinggi menggunakan angka inflasi Kota Pematang Siantar yang merupakan *sister city* dari kota Tebing Tinggi. Angka inflasi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 6,16 persen. Namun di tahun 2023 inflasi kembali normal sebesar 2,30.

**Gambar 2.5**  
**Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2019-2023**



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

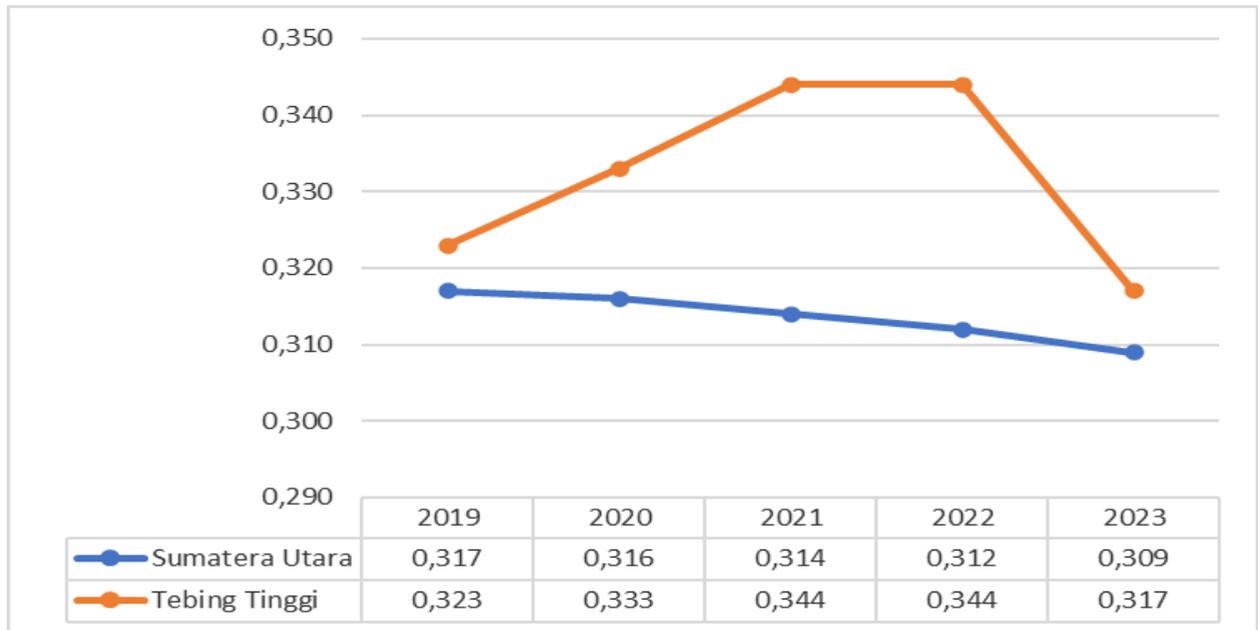
#### D. Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.. Sehingga teori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemerataan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi

yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- $0,00 < G < 0,35$  → Pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$  → Pemerataan/ketimpangan sedang
- $G > 0,50$  → Pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

**Gambar 2.6**  
**Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 mencapai angka 0,317 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 meskipun masih tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah dan lebih tinggi dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Utara.

**2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial**

**A. Angka Kemiskinan**

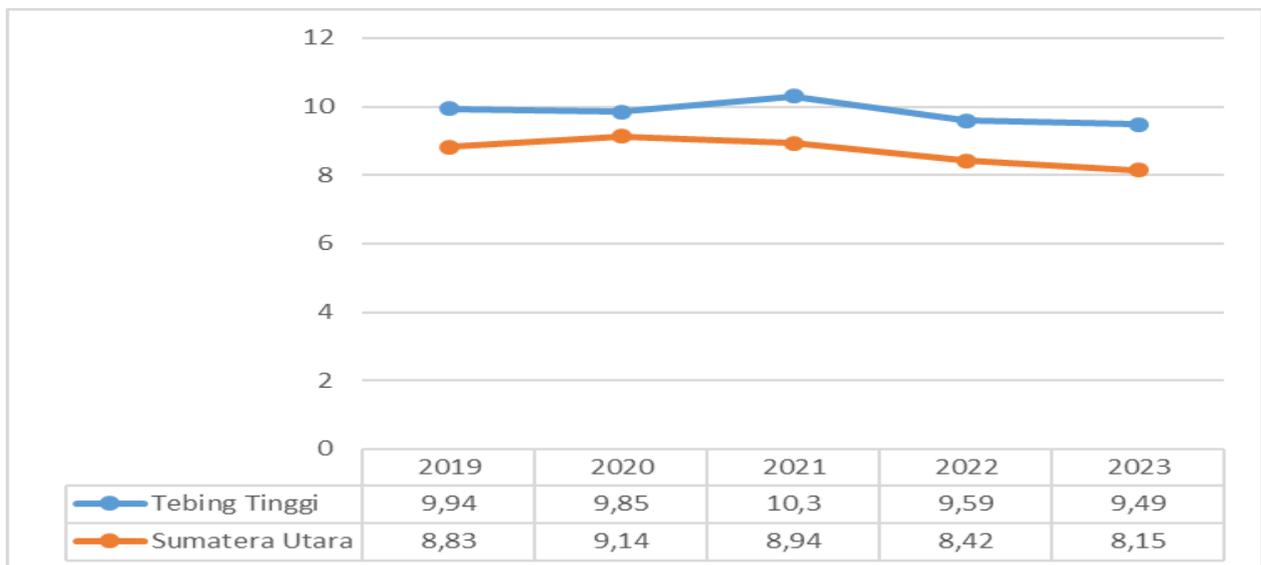
Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jarak yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas, begitupula sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Tebing Tinggi tahun 2022 sebesar Rp 578.512 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 623.531 per kapita per bulan pada tahun 2023.

Peningkatan garis kemiskinan terjadi karena adanya inflasi yang menyebabkan harga-harga kebutuhan dasar meningkat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 16.340 jiwa menjadi 16.360 jiwa pada tahun 2023, yang mengakibatkan persentase penduduk miskin juga turun menjadi 9,49 persen. Hal ini diakibatkan karena mulai dilaksanakannya program-program dan fokus pemerintah dalam penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2023.

**Gambar 2.7**

**Persentase Angka Kemiskinan Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023**

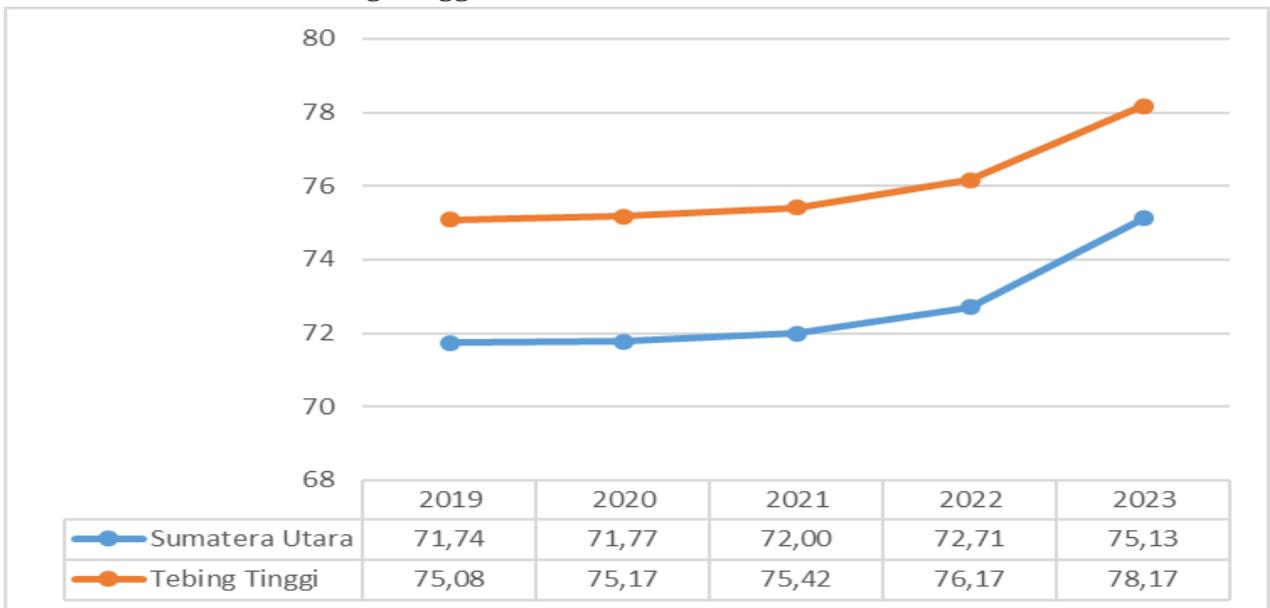


*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara*

## B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain itu IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada tiga yang utama diantaranya komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar 2.8 dibawah ini.

**Gambar 2.8**  
**IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

IPM Kota Tebing Tinggi dari periode 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 78,17 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 75,13 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 2,00 poin atau 2,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 76,17 poin. Artinya nilai IPM Kota Tebing Tinggi termasuk dalam kategori tinggi dimana terdapat peningkatan dalam tiga indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup.

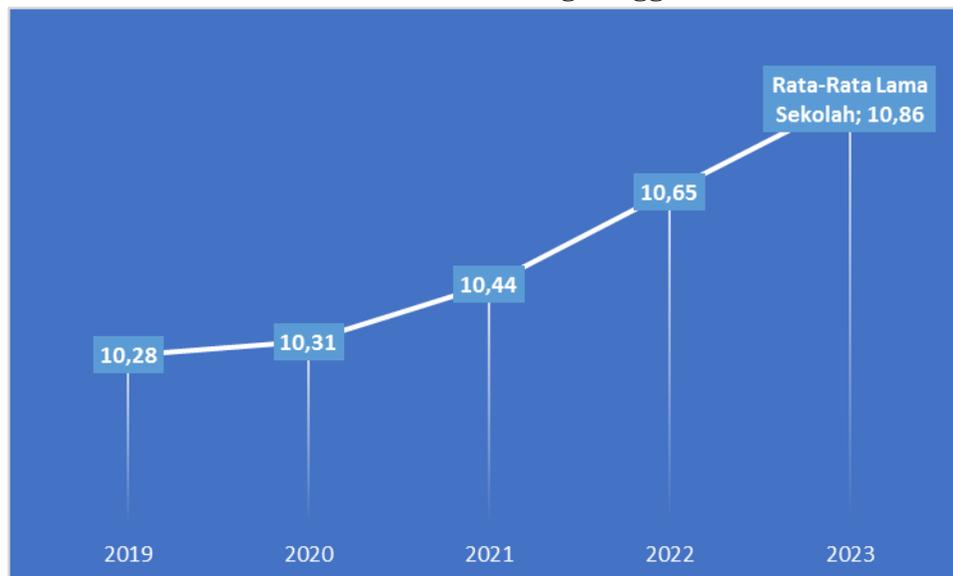
### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

#### a. Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk (usia 15 tahun ke atas) dalam menjalani pendidikan formal. Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata lama sekolah di Kota Tebing dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kota Tebing Tinggi sebesar 10,86 tahun, naik 0,21 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2022, yaitu sebesar 10,65 tahun.

**Gambar 2.9**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023**

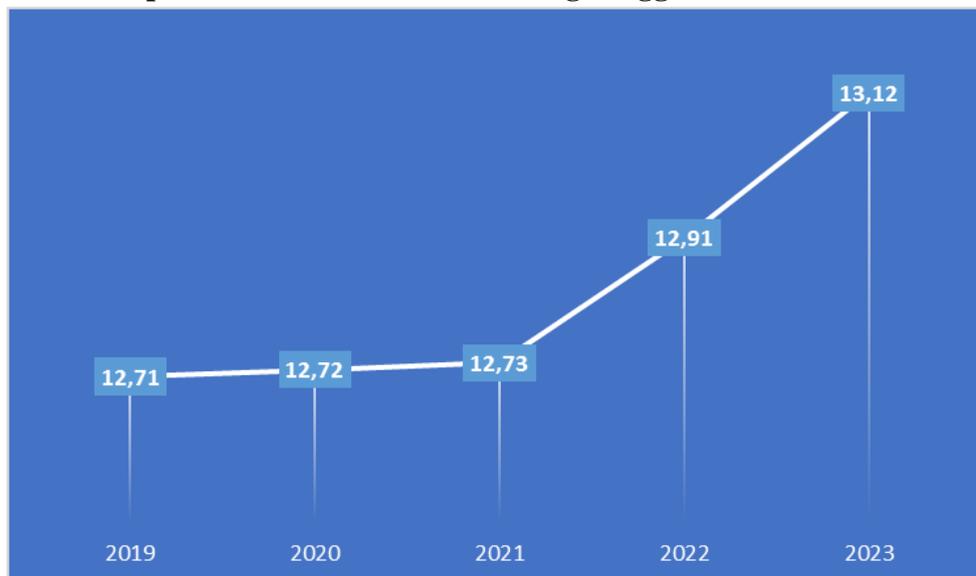


Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

#### **b. Harapan Lama Sekolah**

Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi selalu meningkat jika dilihat pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019 harapan lama sekolah di Kota Tebing Tinggi tercatat 12,68 dan meningkat terus hingga pada tahun 2023 menjadi 13,12. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk berusia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga 13,12 tahun artinya seorang anak diharapkan bisa merasakan lamanya sekolah selama hampir 13 tahun.

**Gambar 2.10**  
**Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023**



*Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024*

## 2. Kesehatan

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya, dimana salah satu dari tujuan pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat.

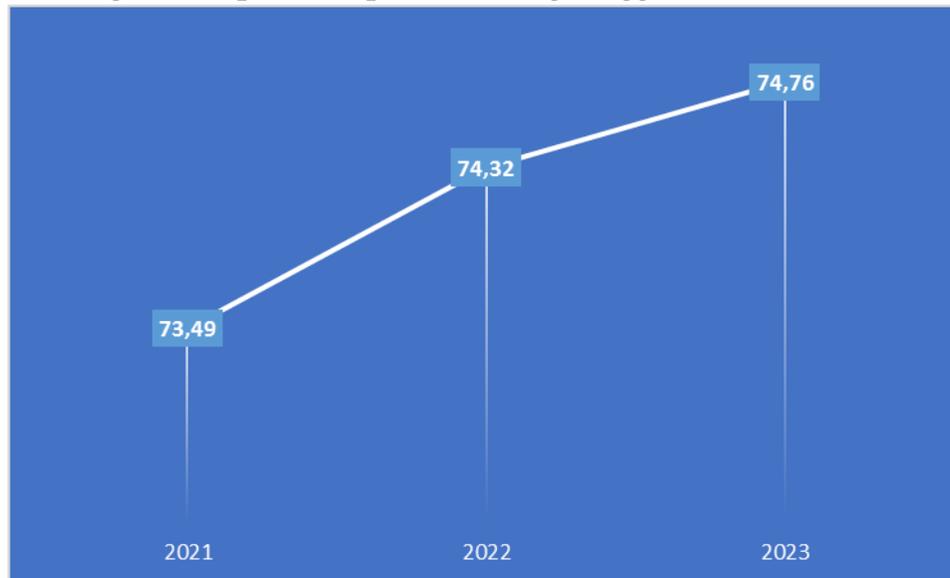
### a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Secara umum, tingkat kesehatan penduduk satu wilayah juga dapat dinilai dari Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan..

Disamping itu, adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Angka harapan hidup penduduk Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2021 AHH Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 73,49 sedangkan pada tahun 2023 AHH Kota Tebing Tinggi meningkat menjadi 74,76. Peningkatan angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan

hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

**Gambar 2.11**  
**Angka Harapan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2021-2023**



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

**b. Persentase Balita Gizi Buruk**

Persentase balita dengan gizi buruk pada Tahun 2022 sebesar 0,17% mengalami penurunan sampai titik terendah menjadi 0% pada Tahun 2023, persentase balita dengan gizi buruk tersebut telah mendorong Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk terus meningkatkan pelayanan bidang kesehatan sehingga angka dapat ditekan.

Pada Tahun 2023, prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 1,3% dibandingkan data pada Tahun 2022 menurun drastis dari tahun 2022 sebesar 6,56%. Semakin meningkatnya prevalensi balita gizi kurang ini perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

**Tabel 2.9**  
**Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023**

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase balita gizi buruk	0,00	0,00	0,00	0,17	0
2	Prevalensi balita gizi Kurang (%)	2,37	6,62	3,29	6,56	1,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

**c. Angka kematian ibu**

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kesehatan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus melakukan terobosan di bidang pelayanan

kesehatan. Pada tahun 2022 dilaporkan 5 (lima) kematian ibu, tetapi pada tahun 2023 dilaporkan mengalami peningkatan jumlah kematian ibu menjadi 3 (tiga) kematian ibu.

**d. Angka kematian bayi**

Angka kematian bayi di Kota Tebing Tinggi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2022 jumlah kematian bayi adalah sebesar 16 kasus sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3 kasus. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi.

**e. Angka kesakitan**

Angka kesakitan dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pada tahun 2022 sebesar 14,78% mengalami peningkatan sebesar 50,54% Pada tahun 2023.

**3. Ketenagakerjaan**

Angkatan Kerja dan Pengangguran Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenaga kerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan dapat dilihat pada gambar berikut.

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi**

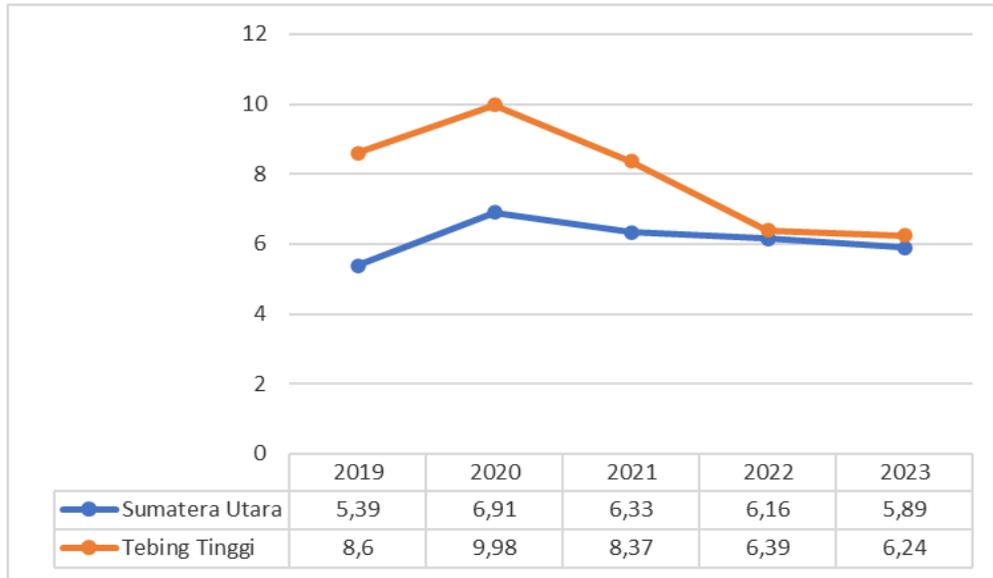
No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk usia kerja 15 Tahun ke atas (jiwa)	118.995	126.080	128.101	130.074	132.371
2	Angkatan kerja (jiwa)	79.388	87.334	86.065	100.493	86.970
3	Bekerja (jiwa)	72.557	78.615	78.861	94.072	81.546
4	Pengangguran (jiwa)	6.831	8.719	7.204	6.421	5.424
5	Bukan angkatan kerja (jiwa)	39.607	38.746	42.036	29.581	45.401
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,71	69,26	67,18	77,26	65,70

*Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 mengalami

penurunan menjadi sebesar 6,24 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.12**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tebing Tinggi tahun 2019-2023**



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tebing Tinggi yang cukup tinggi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan cara yang lebih inovatif seperti meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan lapangan kerja dari hulu ke hilir.

### 2.1.2.3 Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap beberapa indikator seni budaya, dan olahraga yang dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Kebudayaan

Berkaitan dengan perkembangan seni budaya di Kota Tebing Tinggi jumlah grup kesenian yang ada di Kota Tebing Tinggi tahun 2019-2023, seperti yang tertera pada gambar berikut ini:

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Gedung Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Gedung Olah Raga	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

**Tabel 2.12**  
**Organisasi Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Organisasi Kepemudaan	24	24	24	24	24
2	Organisasi Olahraga	4	12	16	17	17

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

**Tabel 2.13**  
**Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tebing Tinggi**

No	Jenis Olah Raga	Keterangan
1	Sepak Bola	Lapangan Sepakbola Stadion Ramlan yatim
		Lapangan Sepakbola Stadion kampung durian
2	Bola Volley	Gedung Olahraga Asber Nasution
		Gedung Olahraga Marahalim
3	Badminton	Gedung Olahraga Marahalim
4	Bola Basket	Gedung Olahraga Asber Nasution
5	Tennis	Leuser tennis Court

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

#### 2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### A. Pendidikan

##### 1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

**Tabel 2.14**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi**

NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Jenjang Pendidikan</b>						
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	20.637	20.245	19.799	19.187	19.660*
1.2.	APK SD/MI	%	114,35	110,25	114,01	110,45	89,89*
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	12.094	11.996	12.096	11.101	10.083*
2.2.	APK SMP/MTs	%	128,93	135,04	145,04	132,93	116,19*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel di atas APK jenjang SD/MI/Sederajat untuk tahun 2023 tercatat sebesar 89,89 persen, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 110,45 persen. Untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat APK tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 tercatat 132,93 persen turun menjadi 116,19 persen pada tahun 2023.

## 2. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Pada umumnya pada tingkat pendidikan dasar tingkat partisipasi sekolah masih cukup tinggi, namun angka ini akan semakin turun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Partisipasi sekolah penduduk erat kaitannya antara lain terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Penyebab utama tidak/putus sekolah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada umumnya adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang mendukung, disamping karena faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan, sarana dan prasarana di daerah yang kurang mendukung dan faktor psikologis.

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs, APS mengalami peningkatan.

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tebing Tinggi**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	APS SD/MI	116,30	121,82	120,78	114,94	112,42*
2	APS SMP/MTs	103,16	89,52	101,65	101,13	72,61*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Pada tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Tebing Tinggi bersifat fluktuatif. Dimana pada APS SD/MI turun dari 114,94 persen pada tahun 2022 menjadi 112,42 persen pada tahun 2023, pada kelompok APS SMP/MTs mengalami penurunan dari 101,13 persen pada tahun 2022 menjadi 72,61 persen pada tahun 2023.

### 3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

**Tabel 2.16**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023**

NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Jenjang Pendidikan</b>						
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	21.131	20.822	20.387	19.187	19.660*
1.2.	APM SD/MI	%	98,69	98,04	98,26	99,57	89,89*
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.374	11.835	12.215	11.101	10.083*
2.2.	APM SMP/MTs	%	83,01	82,62	82,41	98,85	71,91*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dimana tahun 2022 tercatat 99,57 persen turun menjadi 89,89 persen pada tahun 2023. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2022 mengalami penurunan dimana tahun 2022 tercatat sebesar 98,85 persen turun menjadi 71,91 persen pada tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya peraturan yang mengatur untuk penerimaan siswa baru untuk tingkat SD harus berumur 7 tahun dan tidak menerima siswa baru dibawah umur 7 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP minimal sudah berumur 13 tahun.

#### 4. Fasilitas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

**Tabel 2.17**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah (jiwa) Kota Tebing Tinggi**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio SD/MI	166	169	164	147	162
2	Rasio SMP/MTs	258	263	261	232	359

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi*

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kota Tebing Tinggi, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 2.18**  
**Rasio Guru dan Murid Kota Tebing Tinggi**

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio SD/MI	18	18	19	19	15
2	Rasio SMP/MTs	18	17	17	17	34

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi*

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja bidang pendidikan, program dan kegiatan yang mendukung kualitas dan aksesibilitas pendidikan semakin terus dioptimalkan. Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menerima masukan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan terus dijalin.

**B. Kesehatan**

Bidang kesehatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah. Ketersediaan tenaga kesehatan serta didukung oleh sarana kesehatan yang memadai menjadi syarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.19**  
**Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2019-2022**

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Angka kematian ibu	1	5	8	1
2	Angka kematian bayi	19	16	20	17
3	Angka kesakitan	N/A	N/A	N/A	14,78%
4	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2	3,6	3,9	6,53
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	2,2	3,6	11	6,53
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	10,8	25,2	-	4,9
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0,6	6,7	-	1
8	Rasio posyandu per satuan balita	0,8	0,73	0,8	77,08
9	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	5,4	5,2	5,2	4,023
10	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	4,2	3,47	4,2	29,5
11	Rasio dokter per satuan penduduk	79,2	86,6	88,4	3,766
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	67,4	85,1	83	NA
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	92,7	88,3	89	89
14	Cakupan desa/kelurahan (UCI)	100	48,57	100	62,9

15	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	17/17	0	0	100
16	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	71,3	78,6	82,4	88,9
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	23,2	18,1	17,4	100
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	43,30%	40,7	43,5 %	55%
		100%	100%	100%	100 %
19	Tingkat prevelensi tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) tingkat kematian karena	2,1 %	2,7 %	3,7 %	0,42
20	Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) proporsi jumlah kasus	235	222	273	NA
21	Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam	91,5	93,2	BLM DAPAT DIEVALUASI	77,5
22	Program DOTS	-	-	-	-
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	515	42	87	100
24	Penderita diare yang ditangani	1716	1293	1437	100
25	Prevalensi HIV /AIDS (Persen) dari total populasi (KASUS)	0,8 %	0,7%	1,2 %	0,0006%
		31 KASUS	1 KASUS	51 KASUS	NA
26	Cakupan kunjungan bayi (%)	99,6	98,4	87	92
27	Cakupan puskesmas	9	9	9	9
28	Cakupan pembantu puskesmas	14	14	14	14
29	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	3065 Org	2991 Org	2601 Org	91%
30	Cakupan pelayanan nifas (%)	92,2	88,0	65,3	87,4
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi	67,4	85,1	73	92

	yang ditangani (%)				
32	Cakupan pelayanan anak balita (%)	91,4	91,6	69	72
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	268/268	422/422	362/351	3,81
34	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa sd dan tingkat (%)	20,04%	0	0	52,5 %
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	79,80	77,13	80,26	100 %
36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan juga dapat ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya: lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor genetik dan perilaku hidup sehat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena pelayanan kesehatan lebih terkait dengan upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, dan edukatif.

Untuk Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 terlihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 2.20**  
**Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2023**

No	Capaian Indikator	Realisasi 2023
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH	8,8/1000
2	Jumlah Kematian Ibu	3 Orang
3	Prevalensi Balita Stunting	2,10%
4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0%

5	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	115,2%
6	Persentase balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	100%
7	Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	92%
8	Persentase Penduduk miskin yang tercakup dalam JKN	99%
9	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	19,18%
10	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TB BTA	66%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah persentase panjang jaringan dalam kondisi baik di Kota Tebing Tinggi yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Drainase sebagai pendukung prasarana jalan di Kota Tebing Tinggi, hanya terdapat di beberapa ruas saja terutama di wilayah perkotaan yang tersedia. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri dan untuk mengantisipasi banjir.

Kota Tebing Tinggi yang memiliki sejumlah area persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi, dan semua indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.21**  
**Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5%	83,25%	84,31%	99,43%	91%
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	75,13%	79,02%	82,9%	89,50%	62%
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	76%	83,04%	84,02%	84,21%	89%
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air	2,97%	4,98%	9,06%	8,82%	11,00%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	21,9%	42,01%	55,47%	55,47%	60,68%
6	Persentase titik genangan air(tidak jadi indikator lagi di RPD 2023-2026)	47,5%	40%	40%	81,25%	0
7	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan	33,08%	30,65%	20,15%	49,63%	71,27%

	Air Minum (SPAM)					
8	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	96,25%	93,16%	97%	55,47%	77,72%
9	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	58,67%	58,67%	58,67%	53,80%	55%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

**D. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Indikator di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu jalan yang terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 sebesar 87,65%, mengalami peningkatan dalam pelayanan LPJU dari tahun 2022 sebesar 87 %

**Tabel 2.22**  
**Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan yang terpasang LPJU (%)	75	80,05	85	87	87,65

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Tebing Tinggi

**E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan.

Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Selain dengan jumlah personil Polisi Pamong Praja.

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan

lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelegen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi bertugas untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lingkungan, adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 100%, seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif.

**Tabel 2.23**

Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	80%	85%	80%	90%	100%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman keindahan)	80%	85%	90%	90%	100%

Sumber : Dinas Satpol PP Kota Tebing Tinggi

Cakupan indikator bencana kebakaran di Kota Tebing Tinggi yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mencapai 100%, seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.24**

Indikator Bencana Kebakaran Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tebing Tinggi	75%	76%	78%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen	75%	76%	78%	75%	100%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

## F. Sosial

Pelaksanaan bidang sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebesar 100%. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Perkembangan indikator sosial ini dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam rangka pembangunan sosial Kota Tebing Tinggi. Pembangunan bidang sosial ini cukup penting dimana manusia sebagai subjek pembangunan perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

**Tabel 2.25**  
**Indikator Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi*

### 2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### A. Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Angka sengketa pengusaha-pekerja tercatat sebanyak 4 kasus Sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercatat 0%, sama dengan dari tahun sebelumnya sebesar 0%. Kondisi ini perlu dipertahankan demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di Kota Tebing Tinggi.

**Tabel 2.26**  
**Indikator Bidang Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (kasus)	10	4	0	4	4
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	100	100	0	0	0
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	80	50	90	85,09	

*Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi*

Angka sengketa pengusaha-pekerja tercatat 4 (empat) kasus pada tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 juga sebesar 4 (empat) kasus yakni:

1. Metro Cash & Credit
2. Yayasan Perguruan Islam Terpadu Permata Hati
3. Kilang Papan Hasil
4. CV. Karya Citra Estetika

Keempat kasus tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh cara fasilitasi antara perusahaan dengan pekerja. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian tidak ada, karena kasus yg diselesaikan dengan perjanjian bersama harus ada mediator sedangkan di Disnaker tidak ada mediator jadi kasus yang masuk diselesaikan dengan klarifikasi antara 2 pihak yaitu pengusaha dan pekerja dengan tidak menggunakan mediator. Di tahun 2023 besaran kasus yang diselesaikan sebesar 0 (nol) %. Kondisi ini perlu dipertahankan demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di Kota Tebing Tinggi.

## **B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Tabel 2.27

Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kursi DPRD diduduki	1	1	1	1	1
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR ( % )	4%	4%	4%	4%	4%
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu ( % )	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ( % )	0%	0%	1,69%	90,5%	-
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	48,00%	2,27%	56,25%	7,54%	-

Sumber : Dinas DP3APM Kota Tebing Tinggi

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.28

Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Beras</b>					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	80,7	80,4	80,8	80,8	87,2
2	<b>Jagung</b>					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,9
3	<b>Kedele</b>					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	3,9	3,9	2,5	2,8	3,9
4	<b>Daging Sapi</b>					
	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	1,9	1,9	4,2	4,2	4,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

#### D. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

**Tabel 2.29**  
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		201	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	96,33	100	54,45	63,33	52,22
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	77,6	78,16	84,67	81,51	87,60
3	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	47,28	47,28	25,39	22,54	24,81
4	Sistem Pengoperasian TPA Sampah (%)	-	-	73,03	Control landfill	Control landfill
5	Rasio RTH (%)	-	-	21,16	34,58	34,61

*Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi*

Dari indikator di atas dapat dilihat Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 52,22 artinya kualitas air bagus, sedangkan Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara pada tahun 2023 menjadi 87,60 berarti kondisi udara cukup bagus dan Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan menurun pada tahun 2023 menjadi 24,81, hal ini menunjukkan bahwa keadaan luas hutan di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. Pada Tahun 2023 Sistem Pengoperasian TPA Sampah ( jenis/bentuk ) masih sama dengan tahun 2022 yaitu menggunakan metode Control landfill dengan besaran persen Rasio RTH di tahun 2023 meningkat sedikit di angka 34,61% dibanding tahun 2022 sebesar 34,58%.

#### E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak azasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian. Layanan akta catatan sipil mengalami kenaikan, antara lain disebabkan adanya upaya peningkatan

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan sebagai syarat wajib administrasi pemerintahan.

**Tabel 2.30**

Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan kartu keluarga	95,23%	96,28%	96,83%	85,07%	99,84%
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	99,11%	98,91%	99,55%	96,60%	98,62%
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	62,86%	63,87%	64,82%	66,54%	67,51%
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	6.601	7.745	9.551	10.958	12.152
5	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta nikah	66,48%	69,56%	72,46%	76,31%	77,64%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi

**F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (*Total Fertility Rate/TFR*). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Seterusnya dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.31**

Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,14%	2,14%	2,28%	2,1%	2,08
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan	9	10	10	30	30
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2,09	2
4	Rasio Akseptor KB	73,34%	78,34%	78%	50,7%	67,33

5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di	0,58%	0,56%	0,42%	0,43%	0,48%
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet</i>	16,54%	16,28%	11,76%	31,34%	15,5%
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,5%	30%	32,6%	32,10%	28%
8	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	73,34%	78,3%	78%	50,7%	67,33%
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	83%	83%	84,5%	100%	42,65%
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	78%	80%	80,5%	59,02%	23,12%
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	58%	59%	59%	60,58%	6,68%
12	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	76%	78%	78%	396 Org	406 org
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	0
14	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan elayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	0
16	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tebing Tinggi

## G. Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kota Tebing Tinggi adalah minimnya trayek yang mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada

jam sibuk. Jumlah arus penumpang di Kota Tebing Tinggi di tahun 2023 berkisar di angka 600 ribuan penumpang, dengan perubahan fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Kondisi jumlah penumpang, jumlah armada angkutan umum yang beroperasi, izin trayek dan jumlah KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.32**  
Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.080.000	648.000	688.000	787.542	691.200
2	Rasio ijin trayek	1:7.068.739	1:4.009.805	1:4.689.805	1:3.187.862	1: 2.946.656
3	Jumlah uji kir angkutan Umum	163	200	99	115	577
4	Jumlah Terminal bis	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	21,8	52,4	53,40	53,7	51,8
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	87,7	58,5	37	47,91	235,51
7	Pemasangan rambu-rambu	14	68	3	4	0
8	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun	53.460	12.516	17.280	10.469	34.472

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

#### H. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mendorong pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi ini. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan di Kota Tebing Tinggi mencapai 5 kelompok.

**Tabel 2.33**  
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pengembangan & pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tk. Kecamatan	100%	80%	80%	NA	NA

Sumber : Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi

**I. Penanaman Modal**

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

**Tabel 2.34**  
Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1						
	PMDN (unit)	24	40	45	31	31
	PMA (unit)	-	2	2	2	3
2						
	PMDN (juta rupiah)	970,108.92	3,220,943.63	93,396.18	7.321.847,06	1.824.843,47
	PMA (US \$)	0	0	236,05	0	222,00
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1.525	1.539	1.941	263	436

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

**J. Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda.

Pada tahun 2023 Organisasi Kepemudaan di Kota Tebing Tinggi tidak ada perubahan dari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 24 organisasi. Organisasi olahraga tidak

terjadi penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 organisasi olahraga tercatat 17 kelompok, pada tahun 2023 juga sama sebanyak 17 kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.35**

Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023

NO	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Organisasi Kepemudaan	24	24	24	24	24
2	Organisasi Olahraga	4	12	16	17	17
3	Gedung Olahraga	5	5	5	5	5

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kota Tebing Tinggi dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif.

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olahraga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Peningkatan prestasi diharapkan dapat mendorong kemajuan khususnya pembangunan pemuda secara lebih luas.

**Tabel 2.36**

Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	137	137	52	131,27	66,66
2	Persentase wirausaha muda (%)	0	0	0	8,51	6
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	0	0	0	0	0
4	Cakupan Pembinaan atlet muda (%)	0	0	0	0	0
5	Jumlah atlet berprestasi (Org)	146	69	20	6	5
6	Jumlah prestasi olahraga (Cabor Beregu)	4	3	3	1	-

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

## K. Statistik

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain untuk perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan seluruh pemangku kepentingan untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya,

namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam upaya pemenuhan data statistik daerah, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi untuk membentuk suatu sistem data dan statistik yang terintegrasi.

#### L. Bidang Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya.

#### M. Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun di Kota Tebing Tinggi cenderung meningkat dari setiap Tahun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu terus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat demi meningkatnya pengetahuan dan ilmu masyarakat serta melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.37**

Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per Tahun	242.405	237.851	79.474	97.677	130.059
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eksempler)	45.785	54.542	55.204	58.094	58.607
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	21.446	23.266	23.597	25.042	25.298

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi

#### N. Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan bidang kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

**Tabel 2.38**  
Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi

		Tah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Unit Kearsipan yang dibina penataan Arsip dinamisnya	9	12	7	12	14

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi

### 2.1.3.3 Urusan Pilihan

#### A. Pariwisata

Kota Tebing Tinggi dalam hal ini diproyeksikan untuk menjadi kota jasa, produk pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) menjadi unggulan utama kawasan wisata ini. Pengembangan sektor pariwisata dapat diarahkan menjadi Tebing Tinggi MICE City. Selain itu, diperlukan pula terobosan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata agar kota Tebing Tinggi tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

#### B. Pertanian

Kota Tebing Tinggi merupakan daerah yang sebagian besar memiliki kenampakan berupa perkotaan. Sebagian daerah Kota Tebing Tinggi bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Dewasa ini perubahan lahan pertanian menjadi lahan perumahan cukup masif terjadi seiring dengan terjadinya perkembangan dan penambahan konsentrasi penduduk di kota. Hal ini sejalan dengan data yang disajikan dibawah ini, bahwa kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi dari Tahun ke Tahun semakin menurun.

**Tabel 2.39**  
Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Pencapaian Kontribusi
2019	1,25 %
2020	1,29 %
2021	1,25 %
2022	1,25 %
2023	1,26%

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Permasalahan untuk menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri dan juga keberlanjutan lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk sementara ditanami tanaman produktif, intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Tebing Tinggi. Ini bisa menjadi inovasi dalam

mendukung produksi pangan skala rumah tangga. Implementasi hal ini akan mendukung bagi terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang makin produktif, hijau dan nyaman.

### C. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang potensial di Kota Tebing Tinggi, belakangan ini sektor perdagangan terus menunjukkan tren perkembangan yang cukup. Hal ini ditunjukkan dengan besaran kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang mencapai 23,72% di Tahun 2019 dan kemudian kontribusinya meningkat menjadi 24,87% di Tahun 2023. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat menggenjot kembali sektor perdagangan guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.

**Tabel 2.40**  
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2019	23,72
2020	24,03
2021	24,45
2022	24,68
2023	24,87

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Dalam rangka peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB maka haruslah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, pembinaan, penataan dan pengelolaan pasar serta adanya jaminan kebenaran pengukuran terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau UTTP dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan. Untuk menunjang sektor perdagangan di Kota Tebing Tinggi saat ini telah didukung dengan adanya UPTD. Pasar dan UPTD. Metrologi.

### D. Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Kota Tebing Tinggi terhadap PDRB dari Tahun ke Tahun cenderung mengalami penurunan selama periode 2019 – 2023. Jika pada Tahun 2019 sektor industri bisa memberikan kontribusi sebesar 12,26% terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi, di Tahun 2023 kontribusinya mengalami penurunan hanya menjadi sebesar 11,49 %. Hal ini secara langsung harus dapat dijawab oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan mengarahkan pembangunan dan menerapkan kebijakan yang tepat pada sektor perindustrian sehingga sektor ini dapat kembali menunjukkan perkembangan.

**Tabel 2.41**  
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Tahun	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2019	12,26%
2020	11,98%
2021	12,22%
2022	12,27%
2023	11,49%

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

**E. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Persentase koperasi aktif di Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik koperasi itu sendiri, UMKM, usaha mikro dan usaha kecil.

**Tabel 2.42**  
Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi

No	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	102	102	106	120	43
2	Jumlah Koperasi (unit)	231	228	230	246	68
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	46	44,74	46,09	48,78	63,2
4	Usaha Mikro (unit)	10.745	10.745	10.745	13.263	14.457
5	Jumlah UMKM (unit)	11.550	11.550	11.550	13.263	14.632
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	93	93,03	93,03	100	98,8

Sumber : Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi

**2.1.3.4 Urusan Penunjang**

**A. Perencanaan Pembangunan**

Terkait urusan perencanaan pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Beberapa indikator tersebut antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, dan tersedianya dokumen perencanaan RKPPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.

**Tabel 2.43**

Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Perencanaan Pembangunan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Tebing Tinggi

**B. Keuangan**

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

**Tabel 2.44**

Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Jumlah Program yang tidak dilaksanakan	0	1	4	1	1
3	Jumlah Kegiatan yang tidak dilaksanakan	5	11	47	9	3
4	Persentase belanja pendidikan (%)	28,74	23,32	86,39	27,98	-
5	Persentase belanja kesehatan (%)	20,70	34,57	66,86	19,77	-
6	Persentase belanja langsung (%)	61,98	70,84	71,37	56,08	-
7	Persentase belanja tidak langsung (%)	38,02	76,44	89,62	43,92	-

Sumber : BPKPD Kota Tebing Tinggi

**C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemko Tebing Tinggi telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah meningkat dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah jabatan administrasi dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menurun.

**Tabel 2.45**  
Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	15 JP	16 JP	2 Bln	35 JP	-
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	29,19%	73,86%	2,26%	21,75%	-
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Structural	39,38%	42,88%	45,71%	49,06%	-
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada	31	31	31	34	-
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	116	116	118	120	-
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1426	1420	1337	1190	-
<b>3.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>Satuan</b>	<b>Realisasi 2023</b>
1	Persentase tingkat Pendidikan Formal PNS Daerah jenjang S1 dan S2				%	68%
2	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi				Orang	167 Orang

3	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	%	75%
4	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	%	25%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan admisnistrasi kepegawaian	%	97,5%
6	Persentase tingkat akurasi data dan Informasi Kepegawaian	%	96,31%
7	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM	-	

Sumber : BKPSDM Kota Tebing Tinggi

#### D. Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase penyelesaian tindak lanjut Inspektorat Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mencapai 100% BPK RI melaksanakan pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

##### 1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk Opini atas laporan keuangan Kota Tebing Tinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.46**  
Opini BPK Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : Inspektorat Kota Tebing Tinggi

#### 2.1.3.5 Urusan Pendukung

##### A. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPD dan RKPD. Selain itu, program-program

DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

**Tabel 2.47**  
Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hearing Dialog antara Pejabat Daerah/Tokoh Masyarakat dan Agama	4	4	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

## B. Sekretariat Daerah

### 1. Predikat SAKIP

Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, predikat SAKIP di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.48**  
Predikat SAKIP Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Predikat SAKIP	CC	B	B	B	BB

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

### 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Peningkatan yang dapat dilihat pada table dibawah ini merupakan bukti nyata terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dan perlu untuk terus ditingkatkan.

**Tabel 2.49**  
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	86,34	88,75	92,25	95,25

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah merupakan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing

daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

**2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah**

Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada Tahun 2023 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 69,21% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Tebing Tinggi sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga (atas dasar harga berlaku) di Kota Tebing Tinggi mencapai Rp 5.141.470,40 yang meningkat sekitar 10,86 % dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.50**  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi

Pengeluaran	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	4.172.534,36	4.194.447,80	4.292.560,01	4.735.946,63	5.141.470,40
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	5.924.199,35	6.049.163,10	6.349.945,28	6.931.266,73	7.428.290,00
<b>Persentase Terhadap PDRB (%)</b>	70,43	69,34	67,60	68,33	69,21

Sumber : BPS – Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp1.463.178 terdiri atas pengeluaran untuk makanan Rp 760.606 (50,50%) dan untuk bukan makanan Rp 702.573 (49,50%). Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

**Tabel 2.51**  
Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Pengeluaran Per Kapita				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Makanan	Rupiah	540.712	643.558	658.064	639.758	760.606
2	Bukan Makanan	Rupiah	561.810	601.371	671.468	608.075	702.573
	Jumlah	Rupiah	1.110.522	1.244.930	1.329.533	1.247.833	1.463.178

Sumber : BPS – Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

**2.1.4.2 Iklim Berinvestasi**

Keamanan dan Ketertiban Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas serta lebih singkatnya waktu penyelesaian

perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kota Tebing Tinggi. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

#### A. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Kota Tebing Tinggi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.52**  
Jumlah Kriminalitas Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
1.	Jumah kriminalitas di Kota Tebing Tinggi	kasus	1.348	1.286	62

*Sumber : BPS -Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023*

#### B. Perizinan

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tebing Tinggi.

##### 2.1.4.3 Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.53**  
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan  
di Kota Tebing Tinggi

Kelompok Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Muda (0-14 Tahun)	27,61%	26,89%	26,59%	26,29%	26,20%
Produktif (15-64Tahun)	67,27%	67,61%	67,61%	67,59%	67,29%
Lansia (65 Tahun lebih)	5,12%	5,5%	5,8%	6,11%	6,51%
<b>Rasio Beban Ketergantungan(%)</b>	<b>48,66%</b>	<b>47,88%</b>	<b>47,90%</b>	<b>46,75%</b>	<b>48,61%</b>

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka 2023

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Di Kota Tebing Tinggi Pada tahun 2023 angka rasio ketergantungannya termasuk tinggi, dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Tebing Tinggi mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Kondisi ini harus dapat mendorong pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat membuka jendela kesempatan dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Disamping itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjelma menjadi faktor penghambat dalam pembangunan. Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah akan membuka peluang semakin majunya daerah tersebut. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPD**

### **2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023**

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 diketahui Jumlah Program-program dari masing-masing perangkat daerah yang telah



dilaksanakan pada APBD Tahun 2023, berikut ini disajikan capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil evaluasi Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.54**  
**Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV Kota Tebing Tinggi**

No	Nama Perangkat Daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	6	62,5	21	17	80,95	122	110	98,21	177.763.182.219	143.757.902.829	80,87
2.	Dinas Kesehatan	5	5	100	17	17	100	54	50	92,59	95.103.209.043	89.906.206.817	94,53
3.	Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane	3	1	50	3	2	66,66	4	3	75,00	65.808.267.464	8.776.819.689	13,34
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	100	17	17	100	40	36	90,00	81.324.432.659	79.765.924.958	98,08
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	5	100	14	11	84,61	49	23	46,93	19.369.776.803	18.516.997.160	95,59
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	100	8	8	100	21	18	85,71	12.269.906.500	6.014.398.782	49,17
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	2	100	9	6	100	16	16	100	5.300.111.836	5.189.022.869	97,90
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	100	10	8	80	47	30	63,82	6.097.154.605	5.874.636.111	96,35
9.	Dinas Sosial	6	6	100	14	14	100	28	27	92,30	5.178.682.274	4.756.454.650	96,42
10.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	4	4	100	7	7	100	14	14	100	3.892.230.826	3.596.026.913	92,39

No	Nama Perangkat Daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	%
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	10	9	100	21	21	100	38	36	94,73	5.509.778.598	5.115.059.772	92,84
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	10	100	18	18	100	29	28	96,55	9.575.676.488	9.377.310.107	93,07
13.	Dinas Lingkungan Hidup	8	8	100	14	14	100	28	26	92,85	23.741.695.546	22.291.722.665	93,89
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	3	75	9	7	77,77	16	14	87,50	4.258.652.273	4.171.585.053	97,95
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	100	12	12	100	35	35	100	7.513.626.186	7.294.929.243	97,09
16.	Dinas Perhubungan	2	2	100	18	9	50,00	43	20	46,51	7.540.028.099	6.821.120.379	90,46
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	100	11	11	100	20	20	100	11.872.804.856	11.647.145.903	98,10
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	10	100	21	21	100	34	33	97,05	7.261.138.672	6.960.401.605	95,86
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	100	13	13	100	30	29	96,66	4.334.988.384	4.019.604.077	97,72
20.	Dinas Pemuda, Olahragadan Pariwisata	7	5	71,42	20	15	75,00	52	28	53,84	7.101.552.616	6.856.427.484	96,54
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3	3	100	12	11	91,66	24	23	95,83	4.527.316.378	4.398.222.376	97,15
22.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	100	1	1	100	3	3	100	8.418.145.300	7.570.946.148	89,94



No	Nama Perangkat Daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	%
23.	Bagian Umum	1	1	100	9	8	100	24	19	79,16	19.469.573.590	18.812.583.001	96,62
24.	Bagian Pemerintahan	1	1	100	2	2	100	5	5	100	940.417.680	841.665.871	89,49
25.	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	1	1	100	2	2	100	7	6	85,71	581.635.052	555.779.498	95,55
26.	Bagian Adm. Pembangunan	1	1	100	1	1	100	3	3	100	425.000.056	225.026.896	52,95
27.	Bagian Hukum	2	2	100	2	2	100	4	4	100	817.847.500	772.162.993	94,41
28.	Bagian Organisasi	1	1	100	1	1	100	5	5	100	563.321.900	542.730.329	94,65
29.	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1	1	100	1	1	100	3	3	100	553.560.872	545.534.896	98,55
30.	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	1	1	100	1	1	100	3	3	100	2.688.283.200	2.659.202.872	98,91
31.	Sekretariat DPRD	2	2	100	14	13	92,85	36	30	83,33	24.168.951.600	23.587.347.979	97,59
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	100	13	13	100	41	40	97,56	6.647.129.673	6.440.617.289	96,89
33.	BPKPD	4	4	100	13	13	100	60	54	90,00	14.969.604.162	13.875.692.337	92,69
34.	BKPSDM	2	2	100	10	10	100	22	21	95,45	6.102.286.140	5.424.973.441	88,90
35.	Inspektorat	3	3	100	11	8	72,72	33	29	87,87	12.384.409.740	10.463.223.718	84,49
36.	Kecamatan Bajenis	5	3	60	13	11	84,61	28	23	82,28	7.694.887.024	6.999.894.213	90,97
37.	Kecamatan Padang Hilir	3	3	100	11	11	100	20	19	95,00	7.112.770.006	6.835.158.379	96,10



No	Nama Perangkat Daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	%
38.	Kecamatan Padang Hulu	4	4	100	11	11	100	22	22	100	7.758.998.600	7.608.436.116	98,06
39.	Kecamatan Rambutan	4	4	100	11	10	100	21	19	90,47	8.420.805.783	8.096.451.824	96,15
40.	Kecamatan T.Tinggi Kota	4	4	100	10	10	100	19	19	100	8.260.912.856	7.963.515.877	96,40
41.	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	100	11	11	100	27	27	100	14.974.796.000	14.769.443.573	98,62

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Triwulan IV Tahun 2023 bahwa dari 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah dengan predikat kinerja sangat tinggi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pelaksanaan Program sebesar 100 % (seratus) persen, Kegiatan sebesar 100 % (seratus) persen, Sub Kegiatan sebesar 90,00 % (Sembilan puluh koma nol-nol) persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.765.924.958, - dari pagu anggaran sebesar Rp. 81.324.432.659,- atau sebesar 98,08 % (Sembilan puluh delapan koma nol delapan) persen.
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Daerah Kota Tebing Tinggi Triwulan IV Tahun 2023 bahwa dari 41 (Empat Puluh Satu) Perangkat Daerah dengan predikat kinerja yang sangat rendah adalah Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane dengan pelaksanaan Program sebesar 50,00 (lima puluh koma nol) persen, Kegiatan sebesar 33,33 (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga) persen, Sub Kegiatan sebesar 75,00 (Tujuh puluh lima koma nol-nol) persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.776.819.689,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 65.808.267.464,- atau sebesar 13,34 %.
3. Keberhasilan ditunjukkan oleh indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Kota Tebing Tinggi dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program, kegiatan sub kegiatan :
  - a. Pemahaman SKPD tentang Pengendalian dan evaluasi Renja yang tidak sama dan berimbang terutama tentang perbedaan kinerja penyerapan APBD dan Kinerja Realisasi RKPD sehingga berimplikasi terhadap pengisian format laporan evaluasi.
  - b. Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas.
  - c. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar instansi terkait
  - d. Adanya pergeseran anggaran dan sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan dilapangan.

**2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator RKPD Tahun 2024**

**2.2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi**

Tahun 2024 merupakan tahun Pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Pemerintah Kota Tebing Tinggi menetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2024 maka realisasi capaian Target Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dilihat tabel pada dibawah ini :

**Tabel 2.55**

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 TW IV Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	Satuan	2023		Status
			Target	Realisasi TW IV	
1	Prevalensi Stunting	Persen	15	2,10	Melebihi Target
2	Angka kesakitan		13,78	6,96	Melebihi Target
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	74,07	Belum tercapai
4	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,86	Melebihi Target
5	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65	60,37	Belum tercapai
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100%	100%	Tercapai
7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persen	69,25	68,33	Belum tercapai
8	Pengeluaran rill per kapita (Ribu/kapita)	(Ribu/kapita)	13,455	13,144	Belum tercapai
9	Nilai Investasi	Milyar	169	1,281	Melebihi Target
10	Indeks Rasa Aman	Poin	72,20	74,69	Melebihi Target
11	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	Persen	70,25%	71,27%	Melebihi Target
12	Persentase cakupan Sanitasi yang Layak	Persen	86,15%	67,7%	Belum Tercapai
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,42	60,55	Melebihi Target
14	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	80%	99,76	Melebihi Target
15	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	Tercapai
16	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	Tercapai
17	Indeks SPBE	Poin	2,6	3,01	Melebihi Target

No	Indikator	Satuan	2023		Status
			Target	Realisasi TW IV	
18	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	Sangat Baik	Baik	Belum Tercapai
19	IKM	Poin	80	99,5	Melebihi Target

#### 2.2.2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ IKU OPD

Evaluasi Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berdasarkan RPD tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan IV Kota Tebing Tinggi RPD Tahun 2023-2026 ditunjukkan oleh capaian IKU perangkat daerah. Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan bidang urusan pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 Triwulan IV disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.56**  
**Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan IV Kota Tebing Tinggi**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
<b>A.1</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>				
1.	Pertumbuhan PDRB		n/a	n/a	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	Persen	2,50 – 5,0	-	Seluruh Perangkat Daerah
3.	Rasio Gini	Nilai	0,31	-	
<b>A.2</b>	<b>FOKUS KEJAHTERAAN SOSIAL</b>				
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,8	9,49	BPS
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	74,07	Dinas Kesehatan
3	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,86	Disdikbud
4	Tingkat Pengangguran Terbuka %	Persen	8,35	6,24	BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,00	78,17	BPS
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100%	100%	Dinas Sosial
7	Angka Melek Huruf	Persen	99,47	-	Disdikbud
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,55	10,86	Disdikbud
<b>A.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>B.1</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>				
<b>B.1.1</b>	<b>PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				
	Pendidikan Dasar				
1.1	Angka Melek Huruf	Persen	99,47	-	-
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Persen	10,55	10,65	Disdikbud
1.3	Harapan lama Sekolah	Tahun	12,75	12,91	Disdikbud
	Tingkat Partisipasi dan Mutu Pendidikan				
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar	Persen	99,65%	99,97%	Disdikbud
1.5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada jenjang Sekolah menengah pertama	Persen	99,88%	99,97%	Disdikbud
1.6	Tingkat partisipasi warga negara	Persen	87,10%	51,40%	Disdikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	usia 5–6 tahun pada jenjang PAUD				
1.7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan kesetaraan	Persen	2,50%	65,32%	Disidkbud
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar				
1.8	Sekolah Dasar (SD)	Persen	58%	86%	Disidkbud
1.9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	65%	89%	Disidkbud
1.10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	22%	58%	Disidkbud
1.11	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	Persen	5%	57,14%	Disidkbud
	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum sesuai standar				
1.12	Sekolah Dasar (SD)	Persen	92,20%	100%	Disidkbud
1.13	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	95,40%	100%	Disidkbud
1.14	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	60%	90%	Disidkbud
1.15	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	Persen	50%	50%	Disidkbud
	<b>KESEHATAN</b>				
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH	Angka	6,6/1000KH	8,8/1000	Dinas Keshatan
2.1	Jumlah Kematian Ibu	orang	7 orang	3 Orang	Dinas Keshatan
2.2	Prevalensi Balita Stunting	Persen	2,2%	2,10%	Dinas Keshatan
2.3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0,05%	0%	Dinas Keshatan
2.4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Persen	100%	115,2%	Dinas Keshatan
2.5	Persentase balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	Persen	93%	100%	Dinas Keshatan
2.6	Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persen	60%	92%	Dinas Keshatan
2.7	Persentase Penduduk miskin yang tercakup dalam JKN	Persen	90%	99%	Dinas Keshatan
2.8	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persen	100%	19,18%	Dinas Keshatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.9	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TB BTA	Persen	100%	66%	Dinas Kesehatan
<b>3.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
3.1	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	80%	85%	Dinas PUPR
3.2	Luas wilayah Produktif	Ha	3.918	3.918	Dinas PUPR
<b>4.</b>	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Persen	100%	0	Dinas Perkimtah
4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92	88,75	Dinas Perkimtah
4.3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak huni Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi Program pemerintah daerah Kota	Persen	100%	0	Dinas Perkimtah
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	Persen	97,65%	97,42%	Dinas Perkimtah
4.5	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	Persen	7,17%	7,21%	Dinas Perkimtah
4.6	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	85%	65,08%	Dinas Perkimtah
<b>4.</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
	<b>SATPOL PP</b>				
4.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	77,5	83,5	Satpol PP
4.2	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	100%	100%	Satpol PP
4.3	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100%	100%	Satpol PP
	<b>KESBANGPOL</b>				
4.4	Persentase penurunan Unjuk Rasa	Persen	11%	66 %	Kesbangpol
4.5	Persentase Konflik SARA	Persen	0%	0%	Kesbangpol
4.6	Persentase LSM aktif	Persen	48%	32%	Kesbangpol
4.7	Persentase Partisipasi Pemilih	Persen	-	-	Kesbangpol
	<b>DAMKAR</b>				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85	85	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.9	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota	Persen	85%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.10	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	85%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	85%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	<b>BPBD</b>				
4.11	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80%	99,76%	BPBD
4.12	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	80%	53,36%	BPBD
<b>5.</b>	<b>SOSIAL</b>				
1.	Persentase PMKS yang ditangani	Persen	100%	100%	Dinas Sosial
<b>B.1.2</b>	<b>NON PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1.</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				
1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	200 orang	20 orang	Dinaskerin
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama / PB (%)	Persen	75%	0%	Dinaskerin
1.3	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	Persen	21%	21%	Dinaskerin
1.4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,12%	6,24%	Dinaskerin
<b>2.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	6,84	3,64	DP3APM
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persen	88%	88%	DP3APM
2.3	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persen	57,14%	57,14%	DP3APM
<b>3</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				
3.1	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	Poin	56,42	60,55	Dinas Lingkungan Hidup
<b>4.</b>	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
4.1	Indeks pelayanan publik	Poin	Sangat baik	Sangat Baik	Disdukcapil
4.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 Tahun	Persen	98,5%	98,75%	Disdukcapil
4.3	Persentase penerbitan kartu identitas Anak	Persen	50%	76,16%	Disdukcapil
<b>5.</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>				
5.1	Total Fertility Rate	Total	2,25	2,08	Dinas PPKB
5.2	Persentase Peserta KB aktif	Persen	79	67,33	Dinas PPKB
5.3	Median Usia Kawin Pertama	Usia	23,8	24	Dinas PPKB
<b>6.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>				
6.1	Jumlah terminal penumpang tipe c	Jumlah	2	2	Dinas Perhubungan
6.2	Load factor angkutan perkotaan	Persen	60%	60 %	Dinas Perhubungan
6.3	Persentase uji kir angkutan perkotaan yang beroperasi	Persen	87%	40 %	Dinas Perhubungan
<b>7.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
7.1	Indeks SPBE	Poin	2,6	3,01	Dinas Kominfo
7.2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persen	85%	85%	Dinas Kominfo
7.3	Persentase penyebarluasan informasi pemerintah daerah	Persen	95%	95%	Dinas Kominfo
7.4	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan e-government	Jumlah SKPD	18	18	Dinas Kominfo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.5	Jumlah ketersediaan titik layanan fiber optik	Jumlah	20	20	Dinas Kominfo
7.6	Jumlah data dan metadata yang disebarluaskan pada portal SDI	Jumlah data dan metadata	5	5	Dinas Kominfo
7.7	Persentase SKPD yang telah tereduksi tentang tata kelola keamanan informasi	Persen	25%	25%	Dinas Kominfo
<b>8</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>				
8.1	Nilai Investasi	Milyar	169	1,281	DPMPPTSP
8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85	99,5	DPMPPTSP
<b>9</b>	<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
9.1	Persentase wirausaha Muda	Persen	8,1%	6,02%	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.2	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan kepeloporan ( orang)	Orang	100	150	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.3	Jumlah Atlet Prestasi Tingkat Nasional	Orang	2	5	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.4	Persentase Masyarakat Berolahraga	Persen	17	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80	98,25	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>10</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>				
1.1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	Persen	63	85,34	Dinas Perpustakaan
<b>11</b>	<b>ARSIP</b>				
11.1	Nilai Evaluasi Pengawasan Arsip	Nilai	60,5	61,05	Dinas Perpustakaan
<b>B.2</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
<b>1.</b>	<b>PARIWISATA</b>				
1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	23.432	38.749	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.2	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB ( persen)	Persen	3,9	5,19	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.</b>	<b>PERTANIAN</b>				
2.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				
	Padi	Kw/ha	68	71,28	DKPP
	Jagung	Kw/ha	55	57,13	DKPP
	Ubi Kayu	Kw/ha	470	544,27	DKPP
2.2	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	80,00	1,26	BPS
2.3	Nilai tukar Petani	Nilai	1,3	1,5	DKPP
<b>3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>				
3.1	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Yang Memadai	Persen	75%	71%	Dinas Perdagangan
3.2	Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100%	100%	Dinas Perdagangan
<b>4.</b>	<b>INDUSTRI</b>				
4.1	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan/Manufacturing	Persen	0,5%	1,23	Dinakerin
<b>B.3</b>	<b>FOKUS LAYANAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	<b>SEKRETARIS DAERAH</b>				
<b>1</b>	<b>BAGIAN KESRA</b>				
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kesra	Poin	86	86	Bagian Kesra
<b>2</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>				
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85	96	Bagian Organisasi
2.2	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	67,21	Bagian Organisasi
2.3	Jumlah SKPD yang nilai IKMnya Kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Jumlah	60	87,50	Bagian Organisasi
<b>3</b>	<b>BAGIAN HUMAS PROTOKOL</b>				
3.1	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	Persen	90	95	Bagian Humas dan Protokol
	<b>BAGIAN PBJ</b>				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.6	Persentase paket tender Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan terlaksana secara akuntabel dan transparan	Persen	100%	97,87%	Bagian PBJ Sekretariat Daerah
	<b>BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA</b>				
3.7	Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada Semester I	Jumlah	30	57,57	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
3.8	Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada Semester I	Jumlah	30	45,45	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
3.9	Jumlah SKPD yang nilai IKM-nya kategori Sangat Baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Nilai	31,00	-	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>				
3.10	Persentase Kecamatan dengan kategori baik (permen 81 th 2015)	Persen	20	-	Bagian Pemerintahan
3.11	Persentase Kelurahan dengan kategori baik	Persen	8,57	100	Bagian Pemerintahan
3.12	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Persen	81	46	Bagian Pemerintahan
	<b>BAGIAN HUKUM</b>				
3.13	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persen	100%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA</b>				
3.14	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian		3,14	2,86	Bagian Perekonomian Dan SDA
	<b>BAGIAN UMUM</b>				
3.15	Terlaksanakannya kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH	Persen	100%	93,03%	Bagian Umum Sekretariat Daerah
<b>B.4</b>	<b>FOKUS LAYANAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>1.</b>	<b>BAPPEDA</b>				
1.1	Predikat Nilai Sakip Bappeda	Nilai	A	B	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target	Persen	80	68,42	Bappeda
1.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Bappeda	Indeks	84,5	100	Bappeda
1.4	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian/ Inovasi Daerah	Persen	100%	91%	Bappeda
<b>2.</b>	<b>BPKPD</b>				
2.1	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi;	Persen	100%	100%	BPKPD
2.2	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah;	Orang	5 Orang	1	BPKPD
2.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;	Opini	WTP	WTP	BPKPD
2.4	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;	Persen	100%	100%	BPKPD
2.5	Terlaksananya pembayaran non tunai;	Persen	100%	100 %	BPKPD
2.6	Peningkatan target pendapatan pajak daerah;	Miliar	34 miliar	41,36 miliar	BPKPD
2.7	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah melalui e-Barang Milik Daerah;	Persen	50%	50 %	BPKPD
2.8	Terlaksananya e-budgeting;	Persen	100%	100 %	BPKPD
2.9	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak;	Persen	80%	80 %	BPKPD
<b>3.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				
3.1	Persentase tingkat Pendidikan Formal PNS Daerah jenjang S1 dan S2	Persen	68%	68%	BKPSDM
3.2	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi	Orang	750 Orang	167 Orang	BKPSDM
3.3	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	Persen	75%	75%	BKPSDM
3.4	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	Persen	20%	25%	BKPSDM
3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan admistrasi kepegawaian	Persen	85%	97,5%	BKPSDM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.6	Persentase tingkat akurasi data dan Informasi Kepegawaian	Persen	90%	96,31%	BKPSDM
3.7	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM	Persen	80%	71,75(BB)	BKPSDM
<b>B.5</b>	<b>FOKUS LAYANAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>1</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				
1.1	Persentase Temuan Eksternal dan Internal yg ditindaklanjuti dengan status Selesai	Persen	94%	89,13%	Inspektorat
1.2	Persentase Temuan yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan dan Aset Material	Persen	98%	76,81%	Inspektorat
1.3	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	Persen	98%	93,3%	Inspektorat
1.4	Persentase SKPD dengan Nilai AKIP minimal B	Persen	93%	100%	Inspektorat
1.5	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Inspektorat
1.6	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Inspektorat
<b>B.6</b>	<b>FOKUS LAYANAN UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>1</b>	<b>KECAMATAN PADANG HULU</b>				
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	97,75	Kecamatan Padang Hulu
1.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
<b>2</b>	<b>KECAMATAN RAMBUTAN</b>				
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	98.50	Kecamatan Rambutan
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100%	Kecamatan Rambutan
2.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100%	100%	Kecamatan Rambutan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kelurahan				
2.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Rambutan
2.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	Kecamatan Rambutan
2.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	Kecamatan Rambutan
3	<b>KECAMATAN PADANG HILIR</b>				
3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	90,75	Kecamatan Padang Hilir
3.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100	Kecamatan Padang Hilir
3.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hilir
3.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hilir
3.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hilir
3.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	Kecamatan Padang Hilir
4	<b>KECAMATAN BAJENIS</b>				
4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	90	Kecamatan Bajenis
4.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100	Kecamatan Bajenis
4.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Bajenis
4.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Bajenis
4.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	0%	Kecamatan Bajenis
4.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	0%	Kecamatan Bajenis
5	<b>KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA</b>				
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	100	Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi s/d Triwulan IV	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	0%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	0%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dari hasil Evaluasi Triwulan IV tahun 2024 yang dilakukan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 belum semua terealisasi karena beberapa indikator dihitung di triwulan I tahun berjalan.

### 2.3 Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran ( Pokir ) DPRD Kota Tebing Tinggi

Pokok–Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses adalah salah satu hal yang menjadi masukan dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kota Tebing Tinggi. Pokok–pokok pikiran tersebut selanjutnya disinergikan dalam Program dan Kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah terkait. Hasil telaahan Pokir DPRD setelah dilakukan pemetaan terhadap kewenangan dirumuskan dalam permasalahan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.57**  
**Rekap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tahun 2023 berdasarkan kewenangan Kota Tebing Tinggi**

No	Fraksi	Hasil Pokir
1	Demokrat Amanat Keadilan	76
2	Gerindra	23
3	Golkar	16
4	Nasdem	58
5	Nurani Kebangsaan	68
6	PDIP	27
<b>Total</b>		<b>268</b>

Sumber: SIPD-RI 2024

Jumlah usulan Pokok-Pokok Pikiran akan diteruskan pada perangkat daerah dan akan divalidasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada KUA PPAS dan RAPBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2024.

## 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan Pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan pokok Kota Tebing Tinggi adalah:

### a. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- Masih kurangnya Kegiatan Penerapan e-pembelajaran
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
- Masih rendahnya tingkat Persentase Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi
- Masih rendahnya status gizi masyarakat
- Masih ada kasus Kematian Ibu
- Masih ada kasus kematian Bayi
- Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular
- Masih rendahnya pemeliharaan jaminan Kesehatan
- Konektivitas jalan sudah mencapai 100%, namun apabila ada pembukaan jalan baru, tanahnya diharapkan sudah dihibahkan kepada PEMKO atau dengan cara pembayaran pembebasan lahan/tanah
- Persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 85% masih perlu ditingkatkan
- Gedung Pemerintahan khususnya Gedung DPRD, Kantor Kecamatan Padang Hulu dan Padang Hilir rencana di bangun/direhabilitasi
- Revisi RTRW Kota Tebing Tinggi dalam proses (KLHS, PK dan revisi dilakukan di Tahun 2021 untuk pegesahan perda revisi RTRW dan RDTR direncanakan tahun 2022
- Kondisi saluran/drainase yang belum baik
- Penanggulangan banjir harus dilakukan bersama dengan Provinsi, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Simalungun serta perlu diadakannya early warning system
- Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota meliputi akses air minum dan sanitasi masih perlu ditingkatkan. Rumah Tangga pengguna air minum khususnya dengan jaringan perpipaan berkoordinasi dengan PDAM Tirta Bulian. Sementara sanitasi Rumah Tangga ditargetkan menjadi tangki septik individual sehat (kedap)
- Data base perumahan belum update
- Masih banyak rumah dengan kondisi yang tidak sesuai dengan persyaratan Rumah layak huni

- Kurang sinergi kebijakan lintas sektoral dalam hal pendataan dan penanganan RTLH dan penanganan kawasan kumuh
- Masih banyak RTLH status tanah bukan milik sendiri/ sewa sehingga capaian bantuan ke masyarakat kurang optimal
- Belum terlaksananya penyerahan PSU perumahan dari pengembang/developer ke Pemerintah Kota
- Minimnya lampu penerangannya jalan dipermukiman
- Ketiadaan armada mobil tangga ukuran kecil untuk lampu permukiman sehingga pemeliharaan untuk lampu penerangan di permukiman tidak optimal
- Pemasangan lampu penerangan di permukiman yang dilakukan oleh masyarakat tidak berkoordinasi dengan Dinas Perkim sehingga pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum dan biaya pemeliharaan menjadi besar
- Pengadaan Lampu penerangan umum di kompleks perumahan adalah menjadi tanggung jawab developer (pengembang) sebelum adanya penyerahan PSU perumahan dari pengembang ke Pemerintah Kota
- Tidak adanya peraturan yang menjadi dasar dalam penetapan pemasangan Reklame di Kota Tebing Tinggi
- Tidak adanya peraturan yang menjadi dasar dalam Penataan Pemakaman di Kota Tebing Tinggi
- Banyaknya masyarakat yang tidak merawat pohon dan meracun pohon dan meninggalkan sisa-sisa pohon yang kering sehingga diperlukan mobil untuk penebangan pohon untuk penataan pohon di permukiman
- Untuk perawatan seluruh taman yang ada agar maksimal diperlukan penambahan mobil tangki penyiram tanaman
- Masih sangat rendahnya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas fisik dan mental yang siap dalam pelayanan tugas
- Kualitas SDM yang kurang memadai
- Unit Gerak Cepat (UGC) yang seharusnya beroperasi selama 24 jam untuk pengaduan masyarakat tidak berfungsi dengan baik
- Minimnya kesadaran masyarakat akan kesadaran untuk penegakan Perda
- Minimnya peralatan khusus yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penertiban di lapangan
- Pemilihan Umum Serentak 2024 maka perlunya Pendidikan Politik Masyarakat selama 5 tahun baru terlaksana 2 kali
- Perubahan Peraturan dan Perkembangan Ormas maka perlu dilaksanakan dialog antar Ormas, OKP, dan LSM dengan Pemerintah yang selama 5 tahun baru terlaksana 2 kali

- Masih bannyaknya kasus Narkoba di masyarakat maka perlunya Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika selama 5 tahun hanya 1 kegiatan
- Menipisnya rasa cinta tanah air maka perlunya Pelatihan Wawasan Kebangsaan / Bela negara selama 5 tahun baru terlaksana 3 kali
- Minimnya peralatan dan perlengkapan yang dimiliki untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan
- Banyaknya daerah yang tidak mempunyai hydrant dan hydrant yang sudah ada tidak berfungsi sehingga mempersulit petugas dalam melakukan pemasokan air pada saat terjadinya kebakaran
- Fasilitas mobil pemadam yang sudah tua dan tidak layak untuk dipergunakan sehingga menghambat pekerjaan petugas di lapangan
- Tidak adanya mobil komando untuk membantu membuka jalan saat terjadi kebakaran
- Tidak terpenuhinya response time sesuai standart karenajauhnya jarak tempuh ke lokasi kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran
- Belum adanya tandon air di setiap kecamatan untuk mensupply air saat pemadaman kebakaran
- Kesulitan mobil pemadam saat memadamkan api di gang-gang sempit
- Kesulitan dalam melakukan evakuasi/penyelamatan di tempat-tempat yang tinggi dan rumah bertingkat (vertical rescue)
- Kurangnya kualitas sumber daya manusia (pemadam) karena diperlukan pelatihan khusus
- Kurangnya kuantitas/jumlah personil pemadam
- Dibutuhkan tambahan insentif yang bersifat tunjangan resiko tinggi dalam menjalankan tugas
- Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran (redcar) di setiap kelurahan
- Sikap masyarakat yang tidak memberikan akses jalan untuk mengutamakan mobil pemadam lewat dan berkerumun di tempat kejadian kebakaran
- Tidak adanya alat pemadam api ringan (APAR) di tempat-tempat umum seperti rumah ibadah sebagai penanganan awal kebakaran
- Tidak adanya jalur evakuasi jika terjadi kebakaran di tempat-tempat umum sebagai upaya penyelamatan
- Kurangnya sosialisasi pencegahan dan penanganan dini kebakaran
- Masih terdapat masyarakat pra sejahtera yang tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- Kurangnya logistik, sarana dan prasarana ketika terjadi bencana alam dan bencana sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana
- Kurangnya bantuan alat untuk penyandang disabilitas
- Kurangnya bantuan sembako untuk masyarakat pra sejahtera
- Kurangnya personil siaga bencana

- Banyaknya gelandangan, anak terlantar, lansia, disabilitas terlantar dan orang dengan gangguan jiwa terlantar
- Belum tersedianya sumber data komponen PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Secara terperinci dan update sebagai dasar perencanaan
- Sulitnya menangani orang-orang yang akan dilakukan rehabilitasi lanjutan
- Masih terbatasnya sarana prasarana dalam pelayanan informasi rawan bencana (early morning system)
- Belum adanya dokumen penanggulangan bencana (rencana kontijensi (renkon), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), kajian resiko bencana yang merupakan dokumen kebencanaan yang berketetapan hukum)
- Belum optimalnya koordinasi antar dinas dengan BPBD dalam penanganan penanggulangan bencana
- Belum optimalnya kapasitas petugas dalam darurat bencana
- Masih terbatas sarana dan prasarana yang memadai untuk darurat bencana

**b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

- Masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
- Masih terdapatnya perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
- Masih rendahnya penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Ketenagakerjaan
- Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi
- Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebing Tinggi belum bisa dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan
- Belum optimalnya sinergitas dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi modern
- Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga
- Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia
- Kurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
- Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sector terkait Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
- Minimnya kepedulian masyarakat menerapkan hidup berwawasan lingkungan
- Minimnya sarana dan prasarana dalam menangani masalah lingkungan hidup

- Meningkatnya beban pencemar
- Berkurangnya tutupan lahan (daerah bervegetasi)
- Minimnya kepedulian masyarakat menerapkan hidup berwawasan lingkungan
- Masih terdapatnya masyarakat disabilitas, orang tua jompo, dan masyarakat yang berada di daerah perbatasan kota yang belum tertib administrasi kependudukannya
- Peralatan Perekaman KTP-el yang merupakan Hibah dari Kemendagri kondisinya saat ini sudah kurang baik dalam melakukan perekaman
- Masih belum tertatanya Arsip Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dikarenakan belum adanya gedung yang khusus untuk menyimpan arsip tersebut perlunya penguatan pengelolaan data terpilah berbasis gender
- Masih rendahnya pemahaman, kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat tentang PKDRT dan upaya pencegahannya
- Masih rendahnya keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
- Masih rendahnya layanan kesehatan, layanan fasilitas umum, layanan rumah ibadah, layanan sekolah ramah anak sesuai dengan standard yang telah ditentukan
- Masih rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat tentang kekerasan terhadap anak
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak
- Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Trafficking dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Masih rendahnya pengetahuan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan anak
- Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam musrenbang kelurahan
- Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan inovasi TTG
- Masih rendahnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di lembaga kemasyarakatan
- Masih rendahnya SDM pengurus/Kader lembaga kemasyarakatan
- Masyarakat pengguna transportasi umum banyak yang beralih ke kendaraan pribadi terutama kendaraan roda dua Kemacetan di beberapa lokasi pada jam-jam tertentu
- Masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya
- Kemacetan di beberapa lokasi pada jam-jam tertentu
- Masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya
- Masih sangat rendahnya kepastian legal dan penjaminan hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (Right To Know) dan Kewajiban Pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola server dan jaringan secara Masih terdapat mandiri dan tidak terintegrasi di Diskominfo
- Masih terdapat beberapa kantor yang belum difasilitasi jaringan internet
- Kurangnya tenaga ahli jaringan
- Perangkat server belum mencukupi kebutuhan penyimpanan data dan aplikasi seluruh
- OPD serta kabel jaringan Fiber Optik (FO) putus dan hilang
- Kurangnya tenaga Fotografer
- Masih belum memadainya sarana (kendaraan roda 4) dan prasarana kantor
- Kurangnya Sumber Daya Manusia di seksi persandian dan pengamanan informasi
- Kurangnya koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai badan negara yang salah satu fungsinya menaungi persandian dan pengamanan informasi di pemerintah daerah
- Belum terlaksananya survey dalam membangun Metadata Statistik Sektoral
- Kurang berpihaknya Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha / calon investor
- Belum adanya sinkronisasi penanganan permasalahan pelaku usaha
- Belum adanya kawasan ekonomi Kota Tebing Tinggi
- Kurangnya pemuda inovatif berwirausaha
- Tidak optimalnya hasil prestasi pemuda di kegiatan kepemudaan tingkat nasional, provinsi dan daerah
- Kurang updatenya Data kepemudaan
- Tidak optimalnya hasil prestasi di bidang olah raga
- Masih rendahnya tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan
- Kurangnya kompetensi pustakawan
- Masih rendahnya layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai dengan layanan perpustakaan digital (e-library)
- Masih rendahnya pengelolaan tingkat ketersediaan arsip baik arsip dinamis dan statis sebagai bahan akuntabilitas kinerja
- Penerapan pengelolaan arsip berbasis digital belum optimal
- Belum adanya SDM yang berbasis kearsipan
- Pengembangan Kebudayaan
- Pengembangan Kesenian Tradisional
- Pembinaan Sejarah
- Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Pengelolaan Permuseuman

### c. Urusan Pilihan

- Belum adanya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri, masih rendahnya pembunguan sumber daya industri dan sarana/prasarana industry

- Tingkat pengawasan dan penertiban perizinan di bidang industri masih rendah
- Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data ke SIINas masih rendah
- Kurangnya akses permodalan bagi UMKM di Tebing Tinggi
- Database UMKM yang belum update
- Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki NIB
- Kurangnya koperasi usaha yang memiliki izin usaha simpan pinjam
- Kurangnya sarana pemasaran produk UMKM
- Pemanfaatan pasar rakyat yang belum maksimal
- Kurangnya SDM dan peralatan pengujian produk tertutup
- Rendahnya kesadaran pemilik alat UTTP dalam menggunakan menggunakan alat UTTP yang bertanda tera sah dan berlaku
- Belum optimalnya pengawasan pedagang dalam mendukung tata tertib niaga di kota Tebing Tinggi
- Pengembangan pola karir jabatan fungsional SDM kemetrolagian belum optimal
- Banyaknya koperasi yang tidak aktif
- Masih kurangnya sumber daya kelompok petani, penyuluh pertanian dalam peningkatan produksi hasil pertanian serta penanganan hama dan penyakit tanaman
- Terbatasnya komoditi pertanian unggulan yang dikelola oleh para kelompok tani
- Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kawasan yang berpotensi banjir
- Terbatasnya variasi tanaman dan kualitas tanaman hasil kultur jaringan
- Belum terintegrasinya penanganan pertanian dari hulu sampai hilir di kawasan kluster agrowisata terintegrasi
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- Belum terkoordinirnya manajemen pemasaran hasil pertanian/peternakan/perikanan
- Belum optimalnya penanganan permasalahan di lingkup petani karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyuluh pertanian
- Kurangnya sumber daya manusia di dalam penanganan kesehatan dan penyakit hewan ternak
- Masih terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan oleh petugas
- Kurangnya pengetahuan peternak tentang kualitas/mutu pakan ternak
- Kurangnya pengetahuan peternak dalam pengolahan dan pemasaran hasil ternak
- Kurangnya petugas kesehatan hewan dan daging, sarana dan prasarana pendukung pada Rumah Potong Hewan
- Tingginya biaya produksi budidaya ikan air tawar
- Masih rendahnya nilai ekonomis hasil produksi perikanan
- Kualitas SDM pembudidaya ikan, petugas pada bidang perikanan masih kurang
- Belum optimalnya jumlah benih ikan yang dihasilkan di BBI

- Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman
- Belum adanya keseragaman harga produk pangan pokok lokal dengan daerah hinterland
- Kurangnya atraksi (Festival budaya, serta pameran) yang unik di Kota Tebing Tinggi sebagai daya tarik Kota Tebing Tinggi
- Tidak adanya objek wisata buatan yang unggulan

#### **d. Urusan Penunjang**

- Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah
- Belum optimalnya hasil-hasil penelitian
- Kurangnya capaian target Pendapatan Daerah
- Kurangnya capaian target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Belum maksimalnya pencapaian target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Belum maksimalnya Disiplin dalam penyusunan anggaran dan pendapatan, dan pembiayaan dan belanja daerah
- Belum maksimal penatausahaan keuangan daerah
- Belum maksimalnya Evaluasi dan pelaporan SKPD
- Belum optimalnya penatausahaan asset
- Masih rendahnya jumlah ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural dan fungsional
- Masih rendahnya jumlah pejabat struktural yang telah memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan
- Masih adanya jabatan struktural dan fungsional yang belum terisi sesuai kompetensi jabatan
- Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional sesuai tupoksinya
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai sehingga banyak PNS yang mengajukan mutasi keluar daerah
- Belum maksimalnya pengelolaan data dan administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi kepegawaian berbasis IT
- Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah ASN sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Standar Kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum merata
- Kurang optimalnya melakukan pemeriksaan fisik di lapangan

#### **e. Urusan Pemerintahan**

- Legalitas Penegasan Batas Lingkungan, Kelurahan, dan Kecamatan
- Penegasan Batas Wilayah antar Kabupaten/Kota

- Inventarisasi toponimi terbaru Kota Tebing Tinggi
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Selalu berkembang dan berubahnya peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, serta beragamnya latar belakang pendidikan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
- Kurangnya Sumber Daya Manusia/Perangkat di Kelurahan mengakibatkan pelayanan masyarakat tidak maksimal Fungsional Staf masih kurang
- Tidak adanya data kondisi umum dan data perkembangan kelurahan yang baik dan benar

#### **2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Di dalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilaksanakan. Pemahaman akan permasalahan yang terjadi didalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangat vital karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah.

Wilayah Kota Tebing Tinggi yang kecil dan tidak memiliki Sumber Daya Alam tidak diuntungkan jika bersaing dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, namun memiliki posisi strategis dengan dibangun nya jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, akan tetapi hal tersebut juga menjadi tantangan dan permasalahan kedepan nya agar Kota Tebing Tinggi menjadi kota destinasi untuk memajukan perekonomian Kota Tebing Tinggi. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan strategi seperti diversifikasi ekonomi fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang dapat diakomodasi oleh kondisi geografis daerah, pembangunan kemitraan, berkolaborasi dengan universitas dan riset, Program mendukung ekonomi kreatif dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang.

Permasalahan utama pembangunan Kota Tebing Tinggi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sumber daya manusia
2. Belum optimalnya penguatan infrastruktur
3. Belum optimalnya penguatan ekonomi
4. Belum optimalnya reformasi birokrasi

Adapun permasalahan yang ada di Pemerintah Kota Tebing Tinggi diangkat dari isu strategis permasalahan pembanguna pada tahun 2024. Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.58**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber daya manusia	<p>1. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur</p> <p>2. Belum Optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan</p>	<p>1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal</p> <p>2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal</p> <p>1. Masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan Prasarana pendidikan yang memadai</p>
2.	Belum optimalnya penguatan ekonomi kreatif	<p>1. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan</p> <p>2. Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM.</p>	<p>1. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi belum</p> <p>1. Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan masih kurang terhadap pelaku UMKM</p> <p>2. Peningkatan kemudahan akses permodalan dan skema pembiayaan belum optimal.</p>
3.	Belum Optimalnya Penguatan	<p>1. Belum optimalnya Sanitasi, Perumahan dan Transportasi</p>	<p>1. Pembangunan Transportasi yang berkualitas masih perlu ditingkatkan.</p> <p>2. Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum</p> <p>3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman</p> <p>4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</p>

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Belum Optimalnya Pengelolaan pola ruang, Luasan Wilayah yang Kecil Sehingga Investasi tidak Optimal 3. Belum optimalnya penanganan Kebencanaan Banjir dan Kebakaran	5. Diperlukan Perluasan Wilayah  6. Pengelolaan / Pemeliharaan Sistem Drainase, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelamatan
4	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi	1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik  2. Masih rendah Penggunaan teknologi	1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntable dan tertata baik belum optimal  1. Kualitas SDM yang masih rendah dibidang Teknologi. 2. Pendanaan untuk teknologi yang belum maksimal

**2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja.

Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

## 2.5 Potensi Unggulan Daerah Kota Tebing Tinggi

Kota Tebing Tinggi sebagai kota *buffer* yang turut mendukung kegiatan ekonomi baik yang ada di Kuala Tanjung, kawasan ekonomi Sei Mangkei maupun kawasan pariwisata Danau Toba. maka, Kota Tebing Tinggi telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam melakukan pembenahan serta pembangunan sarana dan infrastruktur yang ada, seperti pembangunan hotel-hotel, rest area, kawasan kuliner, program 'smart city' sehingga dapat mengundang investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi. Usaha kecil menengah yang bergerak dibidang industri mampu menghasilkan produk unggulan yang dapat dijadikan sumber informasi dan motivasi dalam rangka pemberdayaan UMKM yang berkaitan dengan peningkatan investasi di Kota Tebing Tinggi. Berbagai produk unggulan yang layak dan potensial untuk dikembangkan ini akan meningkatkan pertumbuhan UMKM, dan diharapkan dapat mewujudkan kota jasa serta memiliki daya saing ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang dapat terus semakin tumbuh berkesinambungan dan mampu meraih pangsa pasar.

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada untuk dapat dianalisis agar mengetahui kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membiayai pembangunan.

Bab ini akan memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan dan membahas tentang perkiraan pendapatan. Selanjutnya berdasarkan gambaran kerangka ekonomi yang menggambarkan potensi daerah tersebut akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang harus ditetapkan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdayaguna dan berhasil guna.

### **Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kota Tebing Tinggi diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional**

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2023 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2023 tentunya menjadi faktor penting berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia.

Prospek pemulihan ekonomi yang telah terjadi pada tahun 2023 diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2024, walaupun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berbagai strategi perlu dilakukan khususnya pada pengendalian inflasi agar perekonomian dapat tumbuh dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

**Tabel 3.1**  
Capaian Indikator Makro Pembangunan

Uraian	Capaian Indikator Makro Pembangunan				
	Tahun-				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,1
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,23	7,07	6,49	5,86	5,3
Inflasi	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
Tingkat Kemiskinan	9,22	10,19	10,14	9,57	9,4
Rasio Gini	0,380	0,385	0,381	0,381	0,38
IPM	75,08	75,17	75,42	77,39	74,4

Sumber: BPS – Statistik Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,1 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global, kestabilan politik dan ekonomi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, berkontribusi pada ketahanan yang terjaga dalam menghadapi terpaan eksternal dan internal.

Capaian inflasi tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2022, yakni sebesar 5,51%. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino. Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.

### 3.1.2 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.1.051,- triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp 68,31 juta. Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 persen, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,73 persen.

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 23,59 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,08 persen dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 18,44 persen.

### 3.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2019 s/d 2023 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tebing Tinggi beberapa tahun belakangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Tebing Tinggi	5,15	-0,7	2,51	4,01	3,98
2	Provinsi Sumatera Utara	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3	Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,1

*Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024*

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 mencapai 3,98%. Situasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan



Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi dan pajak daerah. Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dimasukkan kedalam dokumen perencanaan daerah (RKPD dan RPJMD) mempertimbangkan kebijakan P2DD teal masuk sebagai salah satu arah kebijakan Program Prioritas (PP) 8: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (Dibawah PN 1) dalam PP 52 Tahun 2023 tentang RKP Tahun 2024.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 24,87%, sedangkan sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 14,67%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 11,49%.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	74,27	1,25	78,16	1,29	79,22	1,25	86,86	1,25	93,29	1,26
b	Pertambangan dan Penggalian	8,1	0,14	8,52	0,14	8,96	0,14	9,66	0,14	10,43	0,14
c	Industri Pengolahan	726,29	12,26	724,73	11,98	776,01	12,22	850,47	12,27	853,69	11,49
d	Pengadaan Listrik dan Gas	8,30	0,14	8,72	0,14	9,12	0,14	9,71	0,14	9,97	0,13
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	13,77	0,23	13,79	0,23	13,99	0,22	14,61	0,21	15,16	0,20
f	Konstruksi	885,21	14,94	860,09	14,22	919,98	14,49	1.004,61	14,49	1.089,53	14,67
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.404,95	23,72	1.453,71	24,03	1.552,48	24,45	1.710,78	24,68	1.847,66	24,87
h	Transportasi dan Pergudangan	470,83	7,95	486,66	8,05	505,27	7,96	566,28	8,17	625,59	8,42
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	245,26	4,14	241,13	3,99	241,13	3,80	265,74	3,83	283,68	3,82
j	Informasi dan Komunikasi	113,32	1,91	122,43	2,02	133,88	2,11	150,75	2,17	164,19	2,21
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	293,24	4,95	300,38	4,97	331,4	5,22	371,3	5,36	397,55	5,35
l	Real Estat	491,46	8,30	515,02	8,51	530,97	8,36	561,72	8,10	585,94	7,89
m,n	Jasa Perusahaan	26,57	0,45	27,87	0,46	28,7	0,45	32,36	0,47	36,38	0,49
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	671,4	11,33	697,2	11,53	698,27	11,00	737,07	10,63	800,74	10,78



Tabel 3.3 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
p	Jasa Pendidikan	369,61	6,24	386,58	6,39	395,68	6,23	418,79	6,04	457,51	6,16
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,66	1,16	70,51	1,17	69,93	1,10	78,87	1,14	87,23	1,17
r,s,t,u	Jasa Lainnya	52,97	0,89	53,65	0,89	54,97	0,87	61,69	0,89	69,76	0,94
<b>PDRB</b>		<b>5.924,20</b>	<b>100</b>	<b>6.049,16</b>	<b>100</b>	<b>6.349,95</b>	<b>100</b>	<b>6.931,27</b>	<b>100</b>	<b>7.428,29</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2019-2023 masih didominasi sektor yang sama. Lima sektor dominan tersebut secara berturut-turut antara lain:

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
2. Konstruksi;
3. Industri Pengolahan;
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan
5. Transportasi dan Pergudangan.

Besaran distribusi dari kelima sektor terhadap PDRB dari tahun ke tahun cukup stabil. Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kisaran nilai 23% hingga 24%; sektor konstruksi pada kisaran 14%; industri pengolahan pada kisaran 11-12%; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib pada kisaran 10% - 11% dan Transportasi dan Pergudangan pada kisaran 7% - 8%.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Rp5.924,20 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp7428,29 miliar pada tahun 2023.

Sementara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) setiap tahun pada periode 2019-2023 juga selalu mengalami peningkatan. PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi pada 2019 sebesar Rp3.954,03 miliar, menjadi Rp4.352,75 miliar pada tahun 2023. Secara lengkap PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi selama periode 2019-2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	55,52	3,38	56,81	2,32	57,13	0,57	59,33	3,85	61,18	3,11
b	Pertambangan dan Penggalian	6,41	2,24	6,65	3,84	6,89	3,60	7,14	3,60	7,47	4,57
c	Industri Pengolahan	493,54	1,79	492,19	-0,27	500,45	1,68	506,61	1,23	503,92	-0,53
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,50	5,40	7,88	5,11	8,18	3,76	8,55	4,54	8,61	0,69
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	9,38	3,36	9,34	-0,42	9,40	0,59	9,72	3,44	9,92	2,06
f	Konstruksi	596,72	5,79	561,39	-5,92	585,59	4,31	598,49	2,20	615,50	2,84
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	934,32	8,77	930,67	-0,39	967,98	4,01	1.007,66	4,10	1.050,01	4,20
h	Transportasi dan Pergudangan	320,37	4,95	314,97	-1,69	317,77	0,89	347,42	9,33	368,52	6,07
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,49	6,55	176,37	-2,28	176,03	-0,19	190,15	8,02	200,50	5,44
j	Informasi dan Komunikasi	104,04	6,00	111,61	7,27	118,94	6,58	130,06	9,35	140,64	8,14
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	182,40	1,64	187,70	2,91	198,61	5,81	206,88	4,16	217,69	5,23
l	Real Estat	316,51	2,91	322,81	1,99	323,90	0,34	339,06	4,68	351,94	3,80
m,n	Jasa Perusahaan	16,84	2,34	16,74	-0,60	16,77	0,21	17,76	5,88	19,19	8,04



Tabel 3.4 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	399,44	3,81	397,65	-0,45	398,56	0,23	398,91	0,09	411,69	3,20
p	Jasa Pendidikan	241,99	4,99	245,91	1,62	250,91	2,03	263,25	4,92	283,15	7,56
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,65	5,19	48,17	-0,99	47,40	-1,60	51,62	8,91	55,06	6,67
r,s,t,u	Jasa Lainnya	39,93	3,21	39,54	-0,99	40,26	1,83	43,69	8,51	47,75	9,30
<b>PDRB</b>		<b>3.954,03</b>	<b>5,15</b>	<b>3.926,39</b>	<b>-0,70</b>	<b>4.024,78</b>	<b>2,51</b>	<b>4.186,31</b>	<b>4,01</b>	<b>4.352,75</b>	<b>3,98</b>

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK yang terdapat pada tabel 3.4 diatas, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 9,20 persen; serta Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 8,14 persen. Sementara itu lapangan usaha industri pengolahan memiliki pertumbuhan paling kecil yaitu sebesar -0,53 persen.

### 3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans sumatera untuk Wilayah Sumatera Utara yaitu Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi dan disusul jalan tol ruas Kuala Tanjung– Tebing Tinggi–Parapat pada Tahun 2023, maka akan terdapat tantangan bagaimana investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi, karena tentu saja dengan akses jalan tol yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dengan kawasan nasional yaitu Bandara Udara Internasional Kualanamu, Kasawasan Strategi Pariwisata Nasional Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai tujuan bagi investor berinvestasi di wilayah Kota Tebing Tinggi. Selain tantangan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2024 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Tebing Tinggi terutama terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pada sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan kondisi perekonomian di Kota Tebing Tinggi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Potensi kenaikan inflasi, dimana pergerakan inflasi tahunan dipengaruhi oleh perubahan harga bahan makanan;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Menurunkan angka pengangguran terbuka;
4. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif;
5. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
7. Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Tebing Tinggi di tahun 2025 antara lain:

1. Letak Kota Tebing Tinggi yang sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kota jasa;
2. Pengembangan sector pertanian, pariwisata berbasis pertanian dan industri untuk mendukung pariwisata;
3. Tersedianya berbagai infrastruktur penunjang bagi pertumbuhan ekonomi;

4. Pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;
5. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah;
6. Tersedianya lembaga pendidikan yang sudah dikenal luas;
7. Stabilitas keamanan yang kondusif sehingga membuat investor nyaman untuk berinvestasi.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun target/proyeksi Indikator Makro Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2025 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025**  
**Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	Target Tahun ke-
		2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi ( % )	2,50 – 5,00
2	Tingkat Kemiskinan ( % )	9,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,10
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,50
5	Rasio Gini	0,30
6	Laju Inflasi (%)	-
7	Penurunan Emisi GRK	-

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah

selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan system Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, BKP, Obligasi Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PAD;
2. Optimalisasi kerjasama dan dukungan pembiayaan pembangunan Daerah;
3. Pinjaman daerah untuk pembiayaan kegiatan strategis.

### **3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Kemampuan keuangan daerah tidak terlepas dari ruang fiskal yang tersedia dari neraca pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pajak secara massive, dan optimalisasi serta ekstensifikasi retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU & DAK) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan ; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Struktur keuangan Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2021 menggambarkan APBD Kota Tebing Tinggi terus yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, dan di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi] Pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), beberapa komponen Pendapatan dan Belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19 tersebut.

### **3.2.2 Pendapatan Daerah**

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya sebagai berikut.

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasipajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
3. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah
4. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Transfer terutama terkait dengan dana bagi hasil (DBH).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Untuk komponen Pendapatan Daerah merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, besaran Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya.



**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 s/d Tahun 2025**

No	Uraian	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023*)	Target dan Realisasi Tahun 2024		Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025
					Perkiraan Target	Perkiraan Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>692.338.666.715,00</b>	<b>663.506.188.243,25</b>	<b>685.492.386.485,00</b>	<b>723.910.094.119,00</b>	<b>692.818.043.889,00</b>	<b>662.381.517.266,00</b>
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>82.930.324.048,00</b>	<b>88.747.190.213,25</b>	<b>91.576.097.617,00</b>	<b>117.821.455.124,00</b>	<b>90.729.404.894,00</b>	<b>60.022.898.271,00</b>
	Pajak daerah	35.233.888.044,00	38.764.728.783,00	41.473.085.271,00	40.945.740.000,00	40.945.740.000,00	40.945.740.000,00
	Retribusi daerah	3.677.012.713,00	3.781.967.378,00	4.440.786.736,00	4.125.500.000,00	4.125.500.000,00	4.555.500.000,00
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.744.586.153,00	12.619.803.620,00	12.271.062.716,00	14.891.600.000,00	11.117.000.000,00	12.271.062.000,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	33.274.837.138,00	33.580.690.432,25	33.391.162.894,00	57.858.615.124,00	34.541.164.894,00	2.250.596.271,00
2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>579.081.192.667,00</b>	<b>541.876.466.636,00</b>	<b>586.913.592.660,00</b>	<b>598.075.957.995,00</b>	<b>594.075.957.995,00</b>	<b>594.345.937.995,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	540.809.856.612	488.712.339.718,00	527.790.585.072,00	537.904.621.940,00	537.904.621.940,00	538.174.601.940,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.271.336.055,00	53.164.126.918,00	59.123.007.588,00	60.171.336.055,00	56.171.336.055,00	56.171.336.055,00
3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>30.327.150.000,00</b>	<b>32.882.531.394,00</b>	<b>7.002.696.208,00</b>	<b>8.012.681.000,00</b>	<b>8.012.681.000,00</b>	<b>8.012.681.000,00</b>
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.327.150.000,00	32.882.531.394,00	7.002.696.208,00	8.012.681.000,00	8.012.681.000,00	8.012.681.000,00

Sumber data BPKPD Kota Tebing Tinggi

\*)Realisasi Tahun 2023 bersifat sementara dicetak pertanggal 12 Januari 2024

Pendapatan dan belanja yang dikelola langsung oleh SKPD/Unit SKPD (BLUD,JKN,BOK Puskesmas, dan BOS) masih menunggu laporan dari SKPD yang diperkirakan akan mengalami banyak perubahan

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah rata-rata masih lebih besar dibanding dengan komponen Pendapatan Asli Daerah, sehingga hal ini menjadi tantangan untuk menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang ada.

### 3.2.3 Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan belanja daerah mencakup sebagai berikut.

- 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya;
- 3) Belanja Tidak Terduga;
- 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip money follow program prioritas dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.



**Tabel 3.7**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 s/d Tahun 2025**

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target dan Realisasi Tahun 2024		Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>BELANJA</b>	<b>668.884.141.841,40</b>	<b>680.833.700.516,90</b>	<b>661.455.638.834,66</b>	<b>726.826.116.575,00</b>	<b>698.874.294.055,35</b>	<b>763.249.302.953,00</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>498.357.709.828,21</b>	<b>547.944.759.101,69</b>	<b>548.118.156.265,62</b>	<b>663.513.035.476,00</b>	<b>642.499.044.287,85</b>	<b>668.127.303.456,00</b>
	Belanja Pegawai	280.697.164.549,00	309.669.252.569,00	294.933.174.282,00	353.269.552.720,00	341.790.706.200,60	363.676.785.587,00
	Belanja Barang dan Jasa	205.425.202.570,21	222.642.076.074,69	228.471.302.183,62	277.587.882.655,00	268.121.943.987,25	288.496.806.869,00
	Belanja Bunga	1.423.452.138,00	409.121.443,00	-	-	-	-
	Belanja Hibah	8.344.656.571,00	14.682.903.615,00	23.388.243.800,00	31.271.480.100,00	31.271.480.100,00	14.101.711.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.467.234.000,00	541.405.400,00	1.325.436.000,00	1.384.120.000,00	1.314.914.000,00	1.850.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>169.669.665.003,19</b>	<b>132.550.214.696,21</b>	<b>113.183.455.068,04</b>	<b>56.813.081.100,00</b>	<b>55.375.249.767,50</b>	<b>82.697.768.421,00</b>
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.966.213.330,40	20.944.774.956,00	19.704.876.394,00	18.426.731.429,00	17.505.394.857,55	27.557.739.221,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.656.156.010,04	31.422.852.136,18	33.245.567.172,04	10.329.895.221,00	9.813.400.459,95	16.294.130.200,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.229.862.211,75	75.339.862.657,00	55.367.787.902,00	20.965.770.000,00	20.965.770.000,00	32.334.529.700,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.660.753.451,00	4.335.877.872,03	4.699.204.000,00	6.363.613.650,00	6.363.613.650,00	6.006.276.800,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	156.680.000,00	506.847.075,00	166.019.600,00	727.070.800,00	727.070.800,00	505.092.500,00
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>856.767.010,00</b>	<b>338.726.719,00</b>	<b>154.027.501,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>12.424.231.076,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	856.767.010,00	338.726.719,00	154.027.501,00	6.500.000.000,00	1.000.000.000,00	12.424.231.076,00

Pada tabel 3.7 diatas terlihat bahwa Tahun Anggaran 2020 mengalami penyesuaian terhadap alokasi Belanja Daerah yang hal ini tidak terlepas dari situasi pandemic covid-19 yang melanda sepanjang Tahun 2020.

Belanja Daerah secara umum diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasi yang kebutuhannya dalam rangka menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Belanja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Total anggaran belanja diproyeksikan pada tahun 2025 sekitar 763 milyar rupiah yang lebih tinggi dari realisasi anggaran belanja pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini optimis dianggarkan dengan alasan tahun 2025 merupakan tahun awal untuk perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan Kota Tebing Tinggi untuk mencapai Indonesia Emas.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Mandatory Spending, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh Undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah seperti mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), besaran alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (sesuai amanat UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
2. Pencapaian Kegiatan Strategis Daerah, memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.

### **3.2.4 Pembiayaan Daerah**

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena selisih jumlah Pendapatan Daerah lebih kecil daripada Belanja Daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa perhitungan anggaran (SiLPA).

SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 s/d Tahun 2025**

No	Uraian	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Berjalan 2024		Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PEMBIAYAAN</b>						
1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>27.907.359.734,47</b>	<b>31.682.152.855,07</b>	<b>5.114.240.595,42</b>	<b>8.916.022.456,00</b>	-	<b>10.514.481.580</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.907.359.734,47	31.682.152.855,07	5.114.240.595,42	8.916.022.456,00	-	10.514.481.580
2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.679.731.753,00</b>	<b>9.240.399.986,00</b>	-	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000</b>
	Penyertaan Modal Daerah	3.958.531.741,00	4.000.000.000,00	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000
	Pembiayaan Netto	15.721.200.012,00	5.240.399.986,00	-	-	-	4.514.481.580
3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>						<b>0</b>

Pada tabel 3.8 diatas, penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2023 berada pada besaran angka Rp. 29.150.988.245,76 atau 4,65 persen terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga hal ini akan terus menjadi perhatian untuk bagaimana Belanja Daerah yang telah ditetapkan akan terserap sepenuhnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui kolaborasi pendanaan pembangunan melalui skema kerjasama KPBU, obligasi daerah, hibah dan pinjaman daerah yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan dan memperkuat peran fiscal keuangan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah baik pada sector infrastruktur ataupun sector-sektor pembangunan lainnya.

Pinjaman Daerah merupakan alternative sumber pendanaan APBD yang diarahkan pada proyek kegiatan strategis daerah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan memiliki return of revenue untuk menutupi pinjamannya sehingga tidak terlalu membebani APBD.

Peningkatan Belanja Pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah melalui pinjaman dengan Lembaga Keuangan dan Kerjasama dengan Lembaga Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu defisit anggaran.
3. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:

- 1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD;
  - 2) Pendayaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).
4. Dengan asumsi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 662.381.517.266,- dan asumsi belanja sebesar Rp 763.249.302.953,- terjadi defisit sebesar Rp. 100.867.785.687,- atau setara dengan 15,23%.

Dengan merujuk kepada regulasi yang mengatur ambang batas yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.07/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023, defisit untuk APBD sebesar  $\leq 2,2$  % (Kota Tebing Tinggi tergolong kategori kapasitas fiskal rendah) maka disarankan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi defisit:

- 1) Efisiensi belanja operasi dan belanja modal
- 2) Peningkatan pendapatan melalui peningkatan kinerja ( insentif fiskal dan pendapatan lain lain yang sah )
- 3) Pemberdayaan aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi

### **3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)**

Konsep otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah berkumpul dan dicatat ke dalam system akuntansi pemerintah daerah. Berbagai jenis penerimaan daerah kemudian dikumpulkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari BUMD. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk deviden maupun pajak dan retribusi. BUMD juga berperan dalam menciptakan tambahan lapangan kerja dan menjadi salah satu stakeholder dalam mencapai target-target pembangunan daerah lainnya.

Sebagai bagian dari dunia bisnis, BUMD juga akan berhadapan dengan prinsip-prinsip pasar baik sebagai consumer maupun produser. Kondisi pasar secara umum akan mencerminkan persaingan menuju sempurna. Untuk itu, BUMD harus dikelola dengan efektif, efisien, penuh kehati-hatian dan akuntabel.



BUMD Kota Tebing Tinggi adalah PDAM Tirta Bulian. Dalam perkembangan dunia usaha, PDAM Tirta Bulian dihadapkan tantangan yang berat dan persaingan yang semakin ketat. Karena itu, PDAM Tirta Bulian perlu melakukan penyesuaian strategi bisnisnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi.

Kebijakan BUMD sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui:

1. Mengoptimalkan peranan BUMD sebagai bagian dari factor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menjadi bagian dari sumber peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dimaksud, dilaksanakan melalui strategi diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
2. Optimalisasi sumber daya pendanaan untuk pengembangan bisnis sekaligus menjadi bagian dari pencapaian target-target prioritas pembangunan daerah.



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen perencanaan tahun Kedua yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. Tujuan dan Sasaran RKPD tahun 2025 Kota Tebing Tinggi juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 Kota Tebing Tinggi.

#### 4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Untuk mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional, maka dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dengan Tema Pembangunan Nasional yaitu *“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*.

Untuk menjawab isu-isu strategis Tahun 2025 ditetapkan 8 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur



Dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2025 Tebing Tinggi juga berpedoman terhadap Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu “*Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara*”.

Berdasarkan tema tersebut telah ditetapkan 4 (Empat) Prioritas Provinsi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas

Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi Sumatera Utara**

No	Program Prioritas	Kegiatan
1.	Proritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan	Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus
		Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “SIEMAK” (Program Edukasi Perempuan dan Anak);
		Pembangunan TITIK BACA E- Book Digital dan Pengembangan e-Library;
		Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan;
		Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);
		Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
		Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
		Optimalisasi Jangkauan lokasi dan pelayanan Kesehatan bergerak
		Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;
		Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;
Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);		
2.	Prioritas Pembangunan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);



No	Program Prioritas	Kegiatan
		<p>Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.</p> <p>Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri;</p> <p>Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan 1000 (seribu) UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;</p> <p>Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), cetak sawah baru dan peningkatan mekanisme pertanian;</p> <p>Pengembangan sistem pertanian terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani;</p> <p>Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta peningkatan kualitas dan jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata;</p> <p>Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan peningkatan Calender of Event</p> <p>Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;</p> <p>Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;</p> <p>Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum &amp; Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional;</p>
3.	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	<p>Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;</p> <p>Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi.</p> <p>Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman;</p> <p>Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan - Deli Serdang</p> <p>Pembangunan Waduk/Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;</p> <p>Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti;</p> <p>Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah;</p> <p>Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu;</p> <p>Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwisata;</p> <p>Pembangunan Satu Data Digital Daerah</p> <p>SUMUT TANGGUH BENCANA</p> <p>Penurunan emisi gas rumah kaca melalui</p>



No	Program Prioritas	Kegiatan
		gagasan “SUMUT HIJAU”
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
		Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB;
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri;
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi capaian pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Summit
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Pelayanan Perkantoran Terpadu

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah serta untuk mendukung terwujudnya Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tema RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi yaitu ***“Peningkatan Pembangunan Kota Tebing Tinggi melalui Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Peningkatan Infrastruktur dan penguatan Ekonomi yang Berkelanjutan”*** maka Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi sesuai RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, yaitu :

1. Peningkatan SDM
2. Peningkatan Ekonomi Kreatif
3. Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur
4. Pengoptimalan Reformasi birokrasi

Adapun Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
3. Meningkatnya Kompetensi ASN
4. Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
5. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan
6. Meningkatnya Investasi
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
9. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
10. Pelayanan Publik yang Prima

Adapun Tujuan, Sasaran dan Strategi Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi sesuai Tahun Kedua

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Jangkauan dan Mutu Layanan Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Peningkatan Mutu ASN
	Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup	Pemenuhan kebutuhan Dasar Sosial Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
	Meningkatnya Investasi	Mempercepat Perizinan
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
	Pelayanan Publik yang Prima	Memberikan Kemudahan kepada Masyarakat dalam Mengakses Layanan Publik

Adapun Prioritas Pembangunan, Program Prioritas dan Arah Kebijakan Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dan**  
**Program Prioritas Tahun 2025**

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
1.	Peningkatan SDM	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
		Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Pemberdayaan Sosial	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Rehabilitasi Sosial	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Penanganan Bencana	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
Program Pemenuhan Hak Anak	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar		
2.	Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengembangan Ekspor	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penggunaan Produk Lokal
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Penyuluhan Pertanian	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penggunaan Produk Lokal
		Program Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekonomi kreatif	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Peningkatan Daya tarik destinasi Pariwisata	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
		Program Promosi Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Terintegrasi
3.	Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Penanggulangan Bencana	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Pengelolaan Persampahan	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi



No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Arah Kebijakan
		Dan Beracun (Limbah B3)	ramah lingkungan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
4.	Pengoptimalan Reformasi birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel

Prioritas pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2025 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada tahun 2025 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Sumber daya manusia	<p>1. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur</p> <p>2. Belum Optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas pendidikan</p>	<p>1. Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal dan informal bagi sumber daya aparatur</p> <p>2. Penerapan sistem penempatan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi belum optimal</p> <p>1. Masih kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan Prasarana pendidikan yang memadai</p>
2.	Belum optimalnya penguatan ekonomi kreatif	<p>1. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha masih belum</p> <p>2. Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM.</p>	<p>1. Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi belum merata</p> <p>1. Pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan masih kurang terhadap pelaku UMKM</p> <p>2. Peningkatan kemudahan akses permodalan dan skema pembiayaan belum optimal.</p>
3.	Belum Optimalnya Penguatan infrastruktur	<p>1. Belum optimalnya Sanitasi, Perumahan dan Transportasi</p>	<p>1. Pembangunan Transportasi yang berkualitas masih perlu ditingkatkan.</p> <p>2. Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum</p> <p>3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman</p> <p>4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</p>



No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Belum Optimalnya Pengelolaan pola ruang, Luasan Wilayah yang Kecil Sehingga Investasi tidak Optimal 3. Belum optimalnya penanganan Kebencanaan Banjir dan Kebakaran	5. Diperlukan Perluasan Wilayah 6. Pengelolaan / Pemeliharaan Sistem Drainase, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelamatan
4	Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Masih rendah Penggunaan teknologi	1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal 1. Kualitas SDM yang masih rendah dibidang Teknologi. 2. Pendanaan untuk teknologi yang belum maksimal

Adapun penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2025 dan Prioritas Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional Tahun 2025

NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 20245)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1.	PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	PP 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif		Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 20245)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
					Program Penyuluhan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekonomi kreatif Program Peningkatan Daya tarik destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
2.	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 20245)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
					Program Penataan Bangunan Gedung Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan Persampahan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 20245)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
					Program Penanggulangan Bencana
3.	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP 1 : Kualitas SDM dan Sosial Kemasyarakatan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Arsip Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Peningkatan SDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Kepegawaian Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 20245)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
			Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kualitas Keluarga



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 20245)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2025)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2025)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2024) KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
			(PHA)		
4.	PN 4 : Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	PP 4 : Peningkatan Tata kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif		Pengoptimalan Reformasi birokrasi	Program Pembinaan Perpustakaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Perencanaan , Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.	PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.	PP 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	
6	PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 3 : Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	
7	PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4 : Peningkatan Tata kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif		Pengoptimalan Reformasi birokrasi	

**Tabel 4.6**  
**Program Pembangunan Kota Tebing Tinggi**

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan SDM	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	78,83%	79,54%	1.522.500.000	PPKB
		Persentase ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,76%	10,73%	537.750.000	PPKB
		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	30%	39,93%	300.000,000	PPKB
Peningkatan SDM	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Kelompok Catur Bina yang Aktif	80 Poktan	80 Poktan	820.000,000	PPKB
		Median Usia Kawin Pertama	24 Tahun	24 tahun	200.000,000	PPKB
Peningkatan SDM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kegiatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terlaksana	80%	95%	40.000.000.000	Dinas Kesehatan
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang Kesehatan	80%	90%	450.000.000	Dinas Kesehatan



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan SDM	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Kefarmasian sesuai standar	80%	90%	480.000.000	Dinas Kesehatan
Peningkatan SDM	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar (SD) sesuai Standar	41,98%	68%	Rp750.200.000	DISDIKBUD
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai Standar	60,33%	75%	Rp726.000.000	DISDIKBUD
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Standar	19,49%	26%	187.550.000	DISDIKBUD
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non formal / Kesetaraan sesuai Standar	0	15%	68.970.000	DISDIKBUD
Peningkatan SDM	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	99,58%	99,75%	31.597.597.570	DISDIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	99,87%	99,90%	24.949.705.110	DISDIKBUD
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	85,67%	91,20%	7.785.800.660	DISDIKBUD



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,15%	3,00%	653.400.000	DISDIKBUD
Peningkatan SDM	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	59,80	75,00	4.500.000.000	BKPSDM
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok/ lembaga/ organisasi yang diberdayakan	n/a	100 %	658.000.000	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	n/a	100 %	1.752.000.000	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	n/a	100 %	2.228.000.000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	n/a	100 %	1.955.000.000	Dinas Sosial
Peningkatan SDM	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	95%	95%	283.000.000	DP3APM



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan SDM	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kelurahan yang aktif di Puspaga	60%	90%	305.000.000	DP3APM
Peningkatan SDM	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase kelembagaan forum anak	n/a	95%	243.000.000	DP3APM
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	n/a	80 %	455.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	n/a	79 %	320.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	n/a	75 %	6.775.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekspor	Persentase ekspor	n/a	85 %	20.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	Jumlah Objek cagar budaya yang dilestarikan dan di kelola pemanfaatan	0	3 objek	1.754.500.000	Disdikbud
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Teridentifikasinya zona tahan pangan dan rentan pangan	n/a	1 Dok	220.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan	n/a	2 Dok	110.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Penyediaan dan Pengembangan	Laporan Penyediaan Sarana Pertanian	n/a	3 Lap	264.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang tersedia	n/a	2 unit	670.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya penilaian dan pembinaan izin untuk petani	n/a	2 Dok	345.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelembagaan penyuluh dan pertanian	n/a	1 keg	450.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik	n/a	4 Dok	2.840.324.379	Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi pengelolaan perikanan	Ton	5.277 Ton	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Orang	250 Orang	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Warisan Budaya, yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan	n/a	3 objek	2.601.500.000	Disdikbud



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Jenis Seni Tradisional yang dikembangkan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek dan pelaku	1 Jenis (Seni Tari)	2 jenis	1.452.000.000	Disdikbud
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekonomi kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	n/a	2 keg	700.000.000	Disporapar
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya tarik destinasi Pariwisata	Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya tarik destinasi Pariwisata	n/a	2 Keg	580.000.000	Disporapar
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan kerja	40 Org	300 org	2.000.000.000	Disnakerind
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	0%	70%	435.000.000	Disnakerind
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri	25 %	45 %	400.000.000	Disnakerind



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terselenggaranya iklim penanaman modal	n/a	2 keg	200.000.000	DPMPTSP
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi penanaman modal	n/a	2 even pameran	650.000.000	DPMPTSP
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	87,00%	92,30%	10.749.375.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Kawasan, komunal dan individual	14,15%	17,30%	8.709.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Drainase dalam kondisi baik	55,47%	61,15%	13.891.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	31,45%	36,10%	12.678.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).	Rasio daerah rawan banjir yang dilindungi infrastruktur pengendali banjir.	55,00%	62,00%	14.112.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	10 orang	110.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	82,90%	84,50%	28.720.125.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Optimalisasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	n/a	100%	4.232.370.000	Dinas Perhubungan
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat kesesuaian pembangunan dengan RTRW	58,67%	68,00%	2.584.204.875	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan dan Penataan Pembangunan	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	7,57%	6,37%	6.776.000.000	Perkimtah



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH	70%	70%	565.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan	3 dok	3 dok	510.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	0	100%	19,000,000,000	BPBD
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran Dan Non Kebakaran	n/a	95%	4.200.000.000	DPKP



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Luas Wilayah	192,88 Ha	192,92 Ha	5.379.003.788	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Persampahan	Layanan Angkutan Sampah	27%	30%	11.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengembangan Perumahan	Pengelolaan dan manajemen Rumah susun	100 %	100%	4.948.000.000	Perkimtah
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	8 Dok	8 Dok	920.000.000	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Terkendalnya B3 dan Limbah B3	2 Lap	2 Lap	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup	1 Lap	1 Lap	760.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terpilihnya Personal/ Kelompok/ Sekolah Usaha untuk mendapat penghargaan Lingkungan Hidup	70%	70%	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	97,52%	97,72%	605.000.000	Perkimtah



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan dan Penyerahan PSU Perumahan	n/a	75%	16.940.000.000	Perkimtah
Reformasi Birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan menengah	n/a	100%	1.165.000.000	Bappeda
Reformasi Birokrasi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu	n/a	100%	325.365.676	Bappeda
		Persentase dokumen Perekonomian dan SDA tepat waktu	n/a	100%	312.658.234	Bappeda
		Persentase dokumen Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu	n/a	100%	361.790.000	Bappeda
Peningkatan dan Penataan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Dokumen Pengelolaan Infrastruktur Informatika	1 Dok	1 Dok	6.380.515.851	Dinas Komunikasi dan Informatika



Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Tahun 2025		SKPD
				target	Rp	
Reformasi Birokrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	22.457.679.245	BPKPD
Reformasi Birokrasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	97.500	102.000	900.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan, Analisis Jabatan, Pelayanan Publik, Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	100%	1.340.000.000	Bag. Organisasi
Reformasi Birokrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,66	98,7	1.500.000.000	Disdukcapil
Reformasi Birokrasi	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99,8	99,8	1.000.000.000	Disdukcapil
Peningkatan Ekonomi Kreatif	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Izin usaha yang diterbitkan	n/a	100%	63.480.000	DPMPSTP
Reformasi Birokrasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	n/a	100%	112.525.000	Bappeda

Bahwa Program Prioritas Kota Tebing Tinggi diatas sudah mendukung potensi unggulan Daerah.



#### **4.3 Telaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi**

Telaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses adalah salah satu hal yang menjadi masukan dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kota Tebing Tinggi. Pokok – pokok pikiran tersebut selanjutnya disinergikan dalam Program dan Kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah terkait. Untuk Tahun 2025 Pokok-Pokok Pikiran DPRD masih melihat pada sisi prasarana fisik dan belum melihat pada aspek non fisik, namun diharapkan untuk tahun tahun kedepan nya akan disesuaikan dengan Prioritas selain fisik sesuai dengan arah tujuan RPJPD 20 ( Dua Puluh Tahun) tahun kedepan Kota Tebing Tinggi.

Usulan Pokok- pokok Pikiran tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun fokus dan prioritas pembangunan daerah meliputi antara lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023**

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
1	TAMSIL HUSNI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rehabilitasi Jalan ( P = 200 m x L = 2 m )	JL. NAMAD DAMANIK LK. VII KELURHAN TEBING TINGGI GANG GELUGUR, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	TAMSIL HUSNI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Parit ( P = 200 m X L = 40 cm X T = 70 CM )	JL. NAMAD DAMANIK LK. VII KELURAHAN TEBING TINGGI GANG GLUGUR, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	TAMSIL HUSNI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rehabilitasi Jalan ( P = 100 m X L = 2,5 m )	JL. NAMAD DAMANIK LK. VII KELURAHAN TEBING TINGGI GANG DURIAN, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	TAMSIL HUSNI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	PERMOHONAN PEREHAPAN JALAN ( P = 200 m X L = 2 m )	JL. NAMAD DAMANIK LK. VII KELURAHAN TEBING TINGGI GANG DUKU, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	TAMSIL HUSNI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	PERMOHONAN PEMBUATAN PARIT ( P = 200 m X L = 40 cm X T = 70 cm )	JL. NAMAD DAMANIK LK. VII KELURAHAN TEBING TINGGI GANG DUKU, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	ANDA YASSER	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan jalan ( P=45 M x L= 3 M )	Jalan Fatimah Gg Musholah Lingkungan 5 Kelurahan Damar sari kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	ANDA YASSER	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Parit ( P=250 M x L=1,5 M )	Jl.Damar sari Lingkungan 4 Belakang Masjid Batu Sujut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
8	ANDA YASSER	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan jalan ( P= 49 M x L=2 M )	Jalan Gunung Martimbang Lingkungan 3 Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan , Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
9	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan Hotmix (P=200m x Lebar= 3m)	Jalan Danau Toba Lingkungan 3 Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Hotmix Jalan (Panjang= 200meter x Lebar= 3 meter)	Jalan Danau Toba Gg.Sehati Limgkungan 3 Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Hotmix Jalan (Panjang= 200meter x Lebar= 3meter)	Jalan Danau Toba Gg. Kliwon Lingkungan 3 Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Hotmix Jalan (Panjang= 60meter x Lebar= 3meter)	Jalan Danau Laut Tawar Gg Puskel Lingkungan 5 Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Conblock Jalan (Panjang= 230meter x lebar= 3meter)	Jalan Danau Laut Tawar Tanah Merah Lk 5 Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Conblock Jalan ( Panjang= 60meter x Lebar= 3meter)	Jalan Tanah Merah Lk 5 Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
15	MANGATUR NAIBAHO	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Conblock Jalan (Panjang= 300meter x Lebar= 1,2meter)	Jalan setapak pertanian Jalan Danau Toba Lk 2 Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
16	MANGATUR NAIBAHO	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (Panjang= 560meter x Lebar= 0,5meter)	Jalan Jambu Lk 1 Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
17	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Conblock Jalan (Panjang= 40meter x Lebar= 5meter)	Jalan Jambu Ujung Lk 1 Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	MANGATUR NAIBAHO	Rehabilitasi Jalan	Hotmix Jalan (Panjang= 400meter x Lebar= 4meter)	Jalan Jalak Lk 1 Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	TAMSIL HUSNI	Rehabilitasi Jalan	Pembuatan conblock ( P = 125 M X L = 3 M )	Jln. Syech Beringin Lingkungan 03, Kelurahan Tebing Tinggi ( Perumahan Sei Segiling Permai ), Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	TAMSIL HUSNI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Dinding Saluran Parit ( P = 135 M X L = 3 M )	Jln. Syech Beringin Lingkugan 03, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir ( Perumahan Sei Segiling Permai ), Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	TAMSIL HUSNI	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki Jalan ( P =110 M X L = 3 M )	Jln. Syech Beringin Lingkungan 03, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir ( Gang Ikhlas ), Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	EDY SAPUTRA	Pengadaan Bak Container/Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Permohonan penggantian Bak sampah menjadi bak sampah yang terbuat dari besi	Jalan letda Sujono kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
23	CHAIRIL MUKMIN TAMBUNAN, S.E., S.Msi.	Rehabilitasi Jalan	pengaspalan jalan yang telah rusak ( P= 500 M x L=3 M )	Jl. Karya pembangunan, Gg mufakat Lk 1 Kelurahan Satria Kecamatan Padang Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	EDY SAPUTRA	Pendataan dan Penentuan Titik Angkutan Sampah	Permohonan pengadaan becak sampah kelurahan karena sampah yang bertumpuk lama diangkat seperti di jalan letda Sujono yang di angkut per 2hari	Jalan letda Sujono , Kota Tebing Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
25	EDY SAPUTRA	Sosialisasi Ke Kelurahan - kelurahan terkait Bank Sampah	Permohonan penggantian Bak sampah menjadi Bak sampah yang terbuat dari besi	Jalan letda Sujono kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	-
26	CHAIRIL MUKMIN TAMBUNAN, S.E., S.Msi.	Rehabilitasi Jalan	pembangunan/Hot Mx Jalan ( P=65 M x L=3,5 M )	Jl. Karya Pembangunan, Gg Mufakat Lk 1 dibelakang Kelurahan Satria Kecamatan PADANG Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	EDY SAPUTRA	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Permohonan penerangan jalan dan pemasangan bola lampu jalan	Di Lingkungan 2 15bola lampu Di lingkungan 1 8bola lampu Di lingkungan 3 7bola lampu Di kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
28	EDY SAPUTRA	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Permohonan rehalibitas jalan (P= 300 M x L= 2 M)	Jalan cendrawasih lingkungan 2 depan masjid Nur Sholihin, Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
29	EDY SAPUTRA	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Permohonan pembuatan Drainase ( P = 300 M × L = 3 M )	Jalan cendrawasih lingkungan 2 depan mesjid nur Solihin kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
30	CHAIRIL MUKMIN TAMBUNAN, S.E., S.Msi.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Penyedotan Limbah IPAL KOMUNAL	Jl. Bhakti Lk. I Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	EDY SAPUTRA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi kantor lurah pinang mancung	Kantor lurah pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	-
32	CHAIRIL MUKMIN TAMBUNAN, S.E., S.Msi.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Penyedotan Limbah IPAL KOMUNAL	Jalan Karya Lk.II Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	CHAIRIL MUKMIN TAMBUNAN, S.E., S.Msi.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Penyedotan Limbah IPAL KOMUNAL	Jl. bakti Lk III Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34	EDY SAPUTRA	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan parit ( P= 200 M x L = 3 M )	Jalan merpati gang nurdin kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
35	EDY SAPUTRA	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki parit ( P= 200 M x L = 2 M )	Lingkungan 1 kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	CHAIRIL MUKMIN TAMBUNAN, S.E., S.Msi.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Penyedotan Limbah IPAL KOMUNAL	jalan kesatria Gg Alfalah lk IV Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	EDY SAPUTRA	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi kantor lurah pinang mancung	Kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38	CHAIRIL MUKMIN TAMBUNAN, S.E., S.Msi.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Drainase/Parit ( P=60 M x L 0,5 M )	jalan simalungun Gg Seroja Lk V , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	KAHARUDDIN NASUTION	Pembangunan Tanggul Sungai	lanjutan pembangunan bronjong jalan sei mati , sungai mati , lk i kelurahan brohol kecamatan bajenis ( P = 100 m x L = 4 m )	jalan sei mati , sungai mati lk i kelurahan brohol kecamatan bajenis , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	KAHARUDDIN NASUTION	Rehabilitasi Jalan	lanjutan pengasapalan jalan sungai mati kelurahan brohol kecamatan bajenis ( P = 300 M x L = 3 M )	jalan sungai mati kelurahan brohol kecamatan bajenis , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
41	KAHARUDDIN NASUTION	Pembangunan Tanggul Sungai	tembok penahan sungai sibarau kelurahan brohol kecamatan bajenis lk 3 ( P = 100 M x L = 3 )	lk 3 kelurahan kecamatan bajenis , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	KAHARUDDIN NASUTION	Rehabilitasi Jalan	aspal jalan rambutan lk 3 kelurahan berohol , kecamatan bajenis ( P = 200 M x L = 3 M )	LK 3 Kelurahan Berohol , kecamatan Bajenis , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	KAHARUDDIN NASUTION	Rehabilitasi Jalan	Aspal jalan tenggiri kelurahan badak bejuang kecamatan tebing tinggi kota ( P = 200 M X L = 3 M )	jalan tenggiri kelurahan badak bejuang kecamatan tebing tinggi kota , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	KAHARUDDIN NASUTION	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	aspal jalan bukit sinabung kelurahan tanjung marulak kecamatan rambutan ( P = 200 M X L = 2,5 M )	jalan bukit sinabung , kelurahan tanjung marulak , kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
45	KAHARUDDIN NASUTION	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	aspal jalan pancasila kelurahan tanjung marulak kecamatan rambutan ( P = 200 m x L = 2,5 M )	jalan pancasila kelurahan tanjung marulak kecamatan rambutan , Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
46	KAHARUDDIN NASUTION	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	tidak ada penerangan lampu jalan, jln jati , kelurahan pinang mancung , kecamatan bajenis lk 2 ( 3 unit )	jalan jati , LK 2 kelurahan pinang mancung , kecamatan bajenis , Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
47	KAHARUDDIN NASUTION	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	permintaan lampu jalan , jln sungai mati lk 1 kelurahan berohol , kecamatan bajenis . ( 3 unit )	jalan sungai mati , kelurahan berohol, kecamatan bajenis ., Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
48	KAHARUDDIN NASUTION	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	tiang lampu penerangan jalan , jalan abadi , lk 2 , kelurahan berohol , kecamatan bajenis ( unit = 6 )	jalan abadi lk 2 , kelurahan berohol , kecamatan bajenis , Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
49	KAHARUDDIN NASUTION	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	rehab drainase depan perumahan citra harapan jalan sisingamangaraja , kelurahan bandar sono, kecamatan padang hulu . ( P = 200 m x L = 3 m )	jalan singsingamangaraja , kelurahan bandar sono, kecamatan padang hulu , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	EDY SAPUTRA	Sosialisasi Ke Kelurahan - kelurahan terkait Bank Sampah	Permohonan pergantian Bak sampah menjadi Bak sampah yang terbuat dari besi	Jalan letda Sujono kelurahan pinang mancung , Kota Tebing Tinggi	-
51	IMAM IRDIAN SARAGIH, S.E.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase ( P= 30 M x L= 50cm )	Jl. Mutiara Gang SD Impres Kota Bayu Kel. Pabatu, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	IBRAHIM NASUTION, S.E.	Pembangunan Tanggul Sungai	PEmbuatan Beronjong Sungai ( P=300 M x L= 4 M )	Jl. Imam Bonol Gg. Mutiara Lk.I Kel. Tambangan Hulu, Kec. Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	IBRAHIM NASUTION, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pengaspalan Jalan ( P= 300 M x L= 2,5 M )	Jl. T. Imam Bonjol Gg. TPA Lk.I Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
54	IBRAHIM NASUTION, S.E.	Rehabilitasi Jalan	Pembuatan Jalan ( P = 150 M x L= 3 M )	Jl. T. Imam Bonjol Gg. Mutiara Lk. I Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
55	H. SYAMSUL BAHRI	Penambahan Kuota Premi PBI BPJS Kesehatan	ibu Nursiah Purba (Kepling IV) kelurahan durian beralih dari BPJS mandiri ke BPJS Pemerintah(gratis)	jl.prof dr hamka, lingkungan 5 kelurahan durian, Kota Tebing Tinggi	DINAS KESEHATAN
56	H. SYAMSUL BAHRI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	mohon bantuan untuk anak sekolah tingkat SD	jalan prof.dr hamka, kelurahan durian, Kota Tebing Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
57	HENDRA GUNAWAN, S.E.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembuatan parit (P= 100 M x L=50 cm	Jalan mesjid Nurul iman lk 01 Kel, teluk karang kec Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	perbaiki jalan ( P=200m x L=2,5m)	jl.toba 1 LK.03 kelurahan lalang kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
59	IBRAHIM NASUTION, S.E.	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembuatan/Pembangunan Pintu Air	Jl. T. Imam Bonjol Gg Mutiara Lk I Kelurahan Tambangan Hulu Kecamatan Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	IBRAHIM NASUTION, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembangunan Jalan ( P = 400 M x L = 2,5 M )	Jl kipas 1 dan kipas 2 lingkungan 2 kelurahan baglen, kecamatan padang hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
61	IBRAHIM NASUTION, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	rehabilitasi jalan ( P = 180 M x L = 2,5 M )	Jl Kasan Samut Lingkungan 2 kelurahan baglen, kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
62	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	pembuatan jalan baru ( P=200m x L=2m)	Gg.poniman lk.03, kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
63	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	pengadaan tiang lampu jalan lk.02 sebanyak 4 tiang	jl.keluarga lk.02, kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
64	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaikan parit ( P=300 m x L=60cm )	jl.bukit selamat lk.03, kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	pengadaan tiang dan lampu jalan sebanyak 40 titik	setiap lingkungan 01,02,03,04 kelurahan lalang ,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
66	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	perbaikan jalan (P=200m x L=2m )	jl.gunung martimbang 2 Gg.baru lk.04, kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
67	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	pembangunan jalan baru (P=150m x L=2m )	jl.gunung martimbang 2 Gg baru(akhir) lk.04 kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
68	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	jalan dalam keadaan rusak berat ( P=300m x L=2m )	jl.gunung dempo, kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
69	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	rehabilitas jalan bukit lestari lk:02 ( P=30m x L=2,5m )	jl.bukit lestari lk.02 kelurahan mekar sentosa,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
70	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	rehabilitas jl.gang bilal lk.02 ( P=100m x L=2m )	jl.gang bilal lk.02 kelurahan mekar sentosa,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
71	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	rehabilitasi jalan gang mushola lk.02 ( P=100m x L=2m )	jl.gang musholan ,kelurahan mekar sentosa,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
72	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaikan parit (P=200m x L=50Cm )	jl.bukit kembar lk.03,kelurahan lalang,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
73	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembuatan tembok penahan sepanjang parit kebun (P=500 x L=50Cm)	jl.bukit bundar lk.03 kelurahan lalang ,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
74	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	perbaikan jalan (P=300m x L=2,5m )	jl.bukit bahagia lk.03 kelurahan lalang,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
75	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaikan parit ( P=200m x L=50Cm )	jl.martimbang 2 perum kodim lk 04,kelurahan lalang,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
76	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaiki parit ( P=300m x L=50Cm )	jl.gunung sayang lk.04 kelurahan lalang,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
77	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	pembangunan jalan ( P=200m x L=2m )	Gg.surahmin lk.03 kelurahan lalang,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
78	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	pembangunan jalan (P=200 x L=2,5m )	Gg.toba 2 lk.03,kelurahan lalang ,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
79	ABDUL RAHMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	perbaiki jalan ( P=150m x L=2,5m )	jl.gunung sayang lk.04 ,kelurahan lalang ,krcamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
80	MUHAMMAD ERWIN HARAHAHAP, S.E.	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki jalan ( panjang =300 m x lebar = 3 m)	Jln.Persatuan Lk.IV Kelurahan Tebing Tinggi Kec,Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
81	MUHAMMAD ERWIN HARAHAHAP, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan conblok (panjang = 300 m x lebar 2,5 m)	Jalan Tanah Merah Lk VII Kelurahan Tebing Tinggi Kec.Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
82	MUHAMMAD ERWIN HARAHAHAP, S.E.	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki Jalan (panjang =300 m x lebar =4 m)	Jln.Damar Sari Gang Masjid Lk.V Kel.Damar Sari Kec.Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (Panjang=650 m x Lebar=60 cm)	Jln.Berlian LK.4 Kelurahan Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
84	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Drainase (Panjang=400 m x Lebar=80 cm)	Jln.Asrama Kelurahan Bagelen Kec.Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan Conblok (Panjang=1000 m x Lebar=2,5 m)	Jln.Pala GG:Sekolah LK 3 Kelurahan Bandar Utama Kec.Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
86	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Drainase (Panjang=650 m x Lebar= 80cm)	Jln.Pala dalam LK.3 Kelurahan Bandar Utama Kec.Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Aspal (P=190 M x L=3 M)	JL. DANau Toba Gg. Sehati Lk. 03 Kel. Lubuk Raya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
88	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan yang sudah rusak (P= 300 M x L=4 M)	Jl. P. Samosir LK. I Dan LK. III Kel. Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rehab Jalan Beton (P= 150 M x L= 2 M)	Gg. Akur Lk. II Kel. Bandarsono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
90	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan conblok (Panjang=600 m x Lebar= 3 m)	Jln. Sukarno Hatta GG.Keluarga Kel. Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	-



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
91	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (P=150 M x T=60 Cm x T=30 Cm)	Jl. Gg. Saudara Makasar Kec. Lubuk Baru, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Normalisasi Sungai	Normalisasi DAS	LK I S.d LK. VI Kel. Padang Merbau Sei Bangoan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Permbuatan drainase baru (Normalisasi)	Jl. Sepadan LK. 3 , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan Jalan (P=700 M x L=2,5bM x T=10 Cm)	Jl. Beringin Gg. TK. AL Qofar LK. V Kel. Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
95	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan (P=150 M x L=2,5 M)	Jl. Perumahan LK. V kel. Lubuk Raya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
96	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan jalan (Panjang=600 m x Lebar=3 m)	Jln.Soekarno Hatta GG.Keluarga Kel.Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit (P=100 M x L=40 Cm x T=60 Cm)	Jl. Gg. Belitung Lk. III Kel. Bandarsono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
98	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Perbaikan Jembatan (P=6 M x L=4 M)	Jl. P. Pinang LK. IV Kel. Tualang, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
99	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki dan Pendalaman Drainase (P=600 M x L=60 Cm x T=70 Cm)	Sepanjang Jl. Danau Singkarak LK. II dan LK. III Kiri dan Kanan Kel. Padang Merbau , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Drainase (panjang=600m x Lebar=50 cm)	Jln.Ibnu Hajar LK 5 Kel.Deblod Sundoro Kec.Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan (P=110 M x L=3 M)	Jl. Gatot Subroto GG. Pelangi Lk. III Kel. Lubuk Baru, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
102	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Rehabilitasi Jalan	Rehab Jalan Cor Beton (P=135 M x L=3 M)	Jl. Musholla Gg. Buntu LK. IV Kel. Lubuk Raya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
103	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (Panjang= 600m x Lebar=50cm)	Jln. Toba LK.4 Kel. Satria Kec, Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Parit kanan dan Kiri (P=700 M x L=50 cm x T=80 Cm)	Jl. P. Irian LK. IV Kel. Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaiki Jalan Cor/ Rabat Beton (P = 30 M x L= 1,8 M)	Jl. Gatot Subroto Gg. Kurnia Kel. Lubuk Baru, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
106	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembuatan Dinding Sungai Bahilang	Jl. P. Batam LK. VI Kel. Tualang, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
107	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Drainase (Panjang= 550 m x Lebar= 60 cm)	Jln. Satria Lingkungan 4, Kel. Satri Kec. Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
108	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaiki Jalan (P=110 M x L=170 Cm)	Jl. PosKesKel LK. VI Kelurahan Berohol, Kota Tebing Tinggi	-
109	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pembangunan Tanggul Sungai	Lanjutan Pembangunan Bronjong Sungai Bahilang (P=30 M)	Jl. SM. Raja Gg. Sempurna LK. VII Kel. Bandarsono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita Kurang Gizi/Stunting	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi lansia dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia dan balita	Kel. Bandarsono, Kota Tebing Tinggi	DINAS KESEHATAN
111	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pengadaan buku bacaan	bantuan pojok baca dikelurahan	Kel. Lubuk Baru, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
112	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pengusulan RDKK untuk alokasi Pupuk Bersubsidi	Bantuan Pupuk Organik Cair	Kel. Lubuk Raya, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
113	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bibit Ternak Sapi	Pemberian Bantuan Hewan Ternak Lembu	Jl. Berlian No. 2 Kantor Lurah Pabatu, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
114	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bantuan Bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, florikultura farmaka (toga) dan dan perkebunan dan sarana pertanian ke kelompok tani dan masyarakat	Permintaan Pestisida	Kel. Persiakan , Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
115	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita Kurang Gizi/Stunting	Bantuan Pangan Untuk Stunting dan Gizi Buruk	Kel. Tualang , Kota Tebing Tinggi	DINAS KESEHATAN
116	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemberian bantuan plank, pakaian seragam, insentif/honor, peralatan kantor dan kebutuhan lainnya untuk lembaga kemasyarakatan (kepling, PKK, LPM/KPM, posyandu, karang taruna, KPM stunting)	Pemberian Insentif untuk Kader Posyantek	Kel. Bandarsono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
117	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pengusulan RDKK untuk alokasi Pupuk Bersubsidi	Bantuan Pupuk Subsidi (Untuk Kelompok Tani Maju)	Kel. Lubuk Baru, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
118	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pelatihan dan pemberdayaan bagi lembaga kemasyarakatan (kepling, PKK, LPM/KPM, posyandu, karang taruna, KPM stunting)	Pelatihan Membuat LanjutanTingkat Mahir dan Pendirian Sentra Batik	Kel. Lubuk Raya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
119	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Mesin Chopper	Mesin Pengolahan Pakan Ternak	Jl. Berlian No.2 Kantor Lurah Pabatu, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
120	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bibit Itik/Ayam	Permintaan bibit ayam kampung	Kel. Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
121	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bantuan Bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, florikultura farmaka (toga) dan sarana pertanian ke kelompok tani dan masyarakat	Bibit Kelapa	LK.I s/d LK.VI Sekelurahan Padang Merbau, Sepanjang DAS, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
122	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bantuan Bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, florikultura farmaka (toga) dan sarana pertanian ke kelompok tani dan masyarakat	Bantuan Bibit Mangga	LK. I s/d LK.VI Kelurahan Padang Merbau, Sepanjang Area DAS, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
123	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bentuk peningkatan SDM PATBM	Permintaan Insentif Guru Sekolah Minggu	Kel. Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
124	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita Kurang Gizi/Stunting	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita yang kurang gizi dan stunting	Kel. Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi	DINAS KESEHATAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
125	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bantuan Bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, florikultura farmaka (toga) dan sarana pertanian ke kelompok tani dan masyarakat	Bantuan Bibit Sayuran Untuk Kelompok Tani SEHATI dan TELETABIS	Kel. Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
126	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar	Bantuan Bibit Ikan Untuk Masyarakat Kel. Teluk Karang	Kel. Teluk Karang, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
127	H. SYAMSUL BAHRI	Pemeliharaan Berkala Jalan	Perbaikan jalan di gang gelatik lebar 2M panjang 150M	jln.dr prof hamka, jalan merbuk gang gelatik , Kota Tebing Tinggi	-
128	H. SYAMSUL BAHRI	Pemeliharaan Rutin Jalan	perbaikan jalan letda sujono gang smp 5 lebar 3M panjang 50M	jalan dr. prof hamka, jl.letda sujono gang smp 5 lebar 3M panjang 50M, Kota Tebing Tinggi	-
129	H. SYAMSUL BAHRI	Pemeliharaan Rutin Jalan	perbaikan parit jalan sei kelembah Lebar 50cm kedalaman 50cm panjang 600M	jalan dr. prof hamka, jalan sei kelembah Lebar 50cm kedalaman 50cm panjang 600M, Kota Tebing Tinggi	-



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
130	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembangunan talut baru (tembok penahan) perbatasan lingkungan 01,02,03 dengan PTPN III kebun rambutan ( P=1000 m x T =3,5 m )	perbatasan lingkungan 01,02,03 dengan PTPN III kebun rambutan ,kelurahan mekar sentosa ,kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
131	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembuatan tembok penahan perbatasan rumah kebun dengan perumahan PTPN 3 lk.01 ( P=600m x T=5m )	perbatasan rumah kebun dengan perumahan PTPN 3 lk.1, kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
132	ABDUL RAHMAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembuatan parit ( P=300m x L=50cm )	jl.bukit sentosa lk.03 kelurahan lalang, kecamatan rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
133	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani / Jalan Produksi	Rabat Beton Jalan Persawahan yang Sudah Rusak (P=90 M x L=2 M)	JL. Danau Toba Ujung LK. II Kel. Pelita , Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
134	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemberian bantuan plank, pakaian seragam, insentif/honor, peralatan kantor dan kebutuhan lainnya untuk lembaga kemasyarakatan (kepling, PKK, LPM/KPM, posyandu, karang taruna, KPM stunting)	Penambahan Honor Kepala Lingkungan	Kel. Pelita, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
135	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	REhabilitas Parit Yang sudah Rusak atau Tertimbun Tanah (P=300 M x L=8 M x T=1 M)	Kel. Pelita, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
136	MUHAMMAD DONNY DAMANIK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersumbatnya parit sepanjang (P) = 100m x lebar (L) = 50 cm yang menyebabkan jalan disekitarnya tergenang air dan beraroma busuk sehingga mengganggu mobilitas serta aktivitas warga setempat.	jalan bawang merah lingkungan IV Kelurahan bandar sakti, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
137	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pembangunan Tanggul Sungai	Pintu air Rusak dan Hilang	Kel. Pelita, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
138	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rehab Jalan Setapak yang Sudah Rusak (P=250 M x L=2,5 M)	Jl. Danau Toba Gg. Mesjid Kel. Pelita, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
139	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase (P= 200 M x L= 1 M x T= 1 M)	Jl. Kelapa Sawit LK. III Kel. Pelita, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
140	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan (P=30 M x L=5 M)	Jl. Jambu Ujung LK. I Kel. Pelita, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
141	MUHAMMAD DONNY DAMANIK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Permohonan pembangunan parit dengan panjang (P) = 200m x lebar (L) = 50 cm dikarenakan pada saat hujan lokasi tersebut selalu terjadi banjir, bahkan sampai masuk kerumah dan berhari-hari baru surut. warga sudah sering bergotong royong untuk membuat saluran airnya akan tetapi karena tidak permanen jadi tertimbung lagi.	Lingkungan 04 gang Olahraga Kelurahan Padang merbau Kecamatan Padang hulu, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
142	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Bantuan Bibit unggul tanaman pangan, hortukultura, florikultura farmaka (toga) dan dan perkebunan dan sarana pertanian ke kelompok tani dan masyarakat	Bantuan bibit Sayuran Bagi Warga	Kel. Durian, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
143	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemberian multivitamin dan makanan tambahan bagi ibu hamil	Penambahan Vitamin dan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil	Kel. Durian, Kota Tebing Tinggi	DINAS KESEHATAN
144	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pemberian Vaksinasi Rabies kepada Hewan Penular Rabies (HPR)	Permohonan Pemberian Vaksin Rabies bagi Hewan	Kel. Berohol , Kota Tebing Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
145	MUHAMMAD DONNY DAMANIK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Permohonan pembangunan parit yang sudah tidak layak dengan panjang (P) = 200m x lebar (L) = 50 cm yang menyebabkan air meluap sehingga menggenangi jalan saat hujan datang.	Jalan Ketumbar Lingkungan V Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
146	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Permohonan Lampu Jalan	Jl. Benteng LK.IV Kel. Berohol, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
147	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembuatan Beronjong (P= 100 M)	Jl. Benteng LK. IV Kel. Berohol, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
148	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaiki Jalan (P=150 M x L=2 M)	Jl. Air Mata LK. II Kel. Berohol, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
149	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rehabilitas jalan yang sudah rusak ( P= 130 M x L= 2 M x T = 10 CM)	Jl. Jalak LK.1 Kel. Pinang Mancung, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
150	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Penyediaan prasarana lampu penerangan umum	Jl. Merpati Gg. Nuri LK.II Kel. Pinang Mancung, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
151	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Pendataan dan Penentuan Titik Angkutan Sampah	Pengadaan bak container/tempat pembuangan sementara (TPS)	Komplek BTN Griya bulian permai LK.III Kel. Pinang Mancung, Kota Tebing Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
152	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Rehabilitasi Jalan	pembangunan jalan ( P= 100M X L= 4M)	Gg. Ketumbar Ujung Kel. Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
153	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rehabilitas saluran drainase ( P= 500 M x L= 2 M)	Jl. Lengkuas LK.II Kel. Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
154	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Rehabilitasi Jalan	Pembangunan Jalan Setapak ( P= 80 M x L= 3 M)	Jl.Aman LK.III kel. Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
155	Drs. JONER SITINJAK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembangunan drainase P = 300 M X L = 3 M	jalan M.YAMIN sampai jalan kebun lingkungan III kelurahan tanjung marulak hilir kecamatan rambutan kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
156	OGAMOTA HULU, S.H., M.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Parit ( P=50 M x L= 1,5 M)	Jl. Syarifah Jawiyah LK.III Kel. Bandar Sakti, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
157	Drs. JONER SITINJAK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki drainase P = 300 M X L = 3 M	Jalan batu ganjang lingkungan IV kelurahan tanjung marulak hilir kecamatan rambutan kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
158	Drs. JONER SITINJAK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembangunan drainase P = 300 M X L = 3 M	Jalan karya lingkungan III kota tebing tinggi, rambutan, karya jaya , kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
159	Drs. JONER SITINJAK	Rehabilitasi Jalan	pembangunan jalan P = 160 M X L = 3 M	Jalan karya lingkungan III kota tebing tinggi ,Rambutan, Karya jaya kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
160	Drs. JONER SITINJAK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembangunan drainase dengan ukuran P = 300 M X L = 1 M	Jalan M.Yamin sampai jalan kebun lingkungan III kelurahan tanjung marulak hilir , kecamatan rambutan , kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
161	Drs. JONER SITINJAK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaiki drainase dengan ukuran P = 150 M X L = 80 cm	Jalan batu ganjang lingkungan IV kelurahan tanjung marulak hilir , kecamatan rambutan kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
162	Drs. JONER SITINJAK	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembangunan drainase dengan ukuran P = 150 M X L = 80 cm	JALAN KARYA LINGKUNGAN III KOTA TEBING TINGGI ,RAMBUTAN KARYA JAYA KOTA TEBING TINGGI, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
163	Drs. JONER SITINJAK	Rehabilitasi Jalan	Pembangunan jalan dengan ukuran P = 150 M X L = 3 M	JALAN KARYA LINGKUNGAN III, KOTA TEBING TINGGI, RAMBUTAN KARYA JAYA, KOTA TEBING TINGGI, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
164	MULIADI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaiki parit ( P= 300 M x L= 90 CMx D= 70CM)	JL.swasembada lingk. I Kel. Berohol Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
165	MULIADI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaiki dinding parit ( P= 200 M x L = 60CM )	Gg. Famili II Kel. Bandarsono , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
166	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaiki Jalan (P= 100 M x L=2 M)	Jln. Swasembada Gg Rukun Lk1 Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
167	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Parit (P= 100 M x L= 50 CM)	Jln. Swasembada Gg Rukun Lk1 kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
168	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki Jalan (P= 500 M x L= 3 M)	Jln Benteng Lk 4 Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
169	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Parit (P= 50 M x L= 50 Cm)	Jln. Benteng Lk4 Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
170	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pengadaan Lampu Jalan Sebanyak 3 Buah	Gg Hidayah Lk 2 Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
171	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki Jalan (P= 200 M x L 3,5 M)	Jln. Sentosa Gg Madrasah Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
172	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki Jalan (P = 150 M x L = 3 M)	Jln Setia Budi Gg Surya Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
173	Ir. ZAINAL ARIFIN TAMBUNAN	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Parit ( P= 100 M x L = 50 Cm)	Jln Setia Budi Gg Surya Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
174	ANDA YASSER	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembangunan parit ( P= 100 M x L= 30 cm )	jln gelugur lingkungan 7 kel tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
175	ANDA YASSER	Rehabilitasi Jalan	Pembangunan Jalan ( P= 50 M x L= 3 M )	jln setapak gg gelugur kelurahan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
176	ANDA YASSER	Rehabilitasi Jalan	Pembangunan jalan ( P = 200 M x L= 4 M )	Jln Tangkahan Pasir Budiman Lingk 2 kelurahan karya jaya kec Rambutan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
177	ERNIWATI	Pemberian bantuan plank, pakaian seragam, insentif/honor, peralatan kantor dan kebutuhan lainnya untuk lembaga kemasyarakatan (kepling, PKK, LPM/KPM, posyandu, karang taruna, KPM stunting)	Penambahan Insentif Kepala Lingkungan 9 Orang	Kelurahan Bandar Sono , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
178	ERNIWATI	Penambahan Kuota Premi PBI BPJS Kesehatan	Penambahan Kuota PBI BPJS Kesehatan sebanyak 300 KK	Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS KESEHATAN
179	ERNIWATI	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan jalan P : 300 m L : 4 m	Jln. P. Samosir Lk. I dan III Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	-



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
180	ERNIWATI	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( P : 300 m L : 4 m )	Jalan P. Samosir Lingkungan I dan III , Kota Tebing Tinggi	-
181	ERNIWATI	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( P : 300 m L : 4 m )	Jalan P. Samosir Lk I dan III , Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
182	ERNIWATI	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( P : 100 m L : 3 m )	Jalan P. Samosir Gg. Sonduk Lk. I, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
183	ERNIWATI	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( P : 100 m L : 3 m )	Jalan P. Samosir Gg. Bersama Lk. I, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
184	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit Kanan dan Kiri ( P : 800 m L : 70 cm T : 70 cm )	Jalan P. Samosir Lk. I , Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
185	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan ( P : 150 m L : 2.5 m )	Jalan P. Pinang Lk. VI , Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
186	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit ( P : 500 m L : 80 cm T : 80 cm )	Jalan Asrama Kodim Lk. VI, Kelurahan Persiakan, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
187	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Parit Kanan dan Kiri ( P : 700 m L : 50 cm T : 80 cm )	Kelurahan Persiakan Jalan P. Irian Lk. IV , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
188	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan Jalan ( P : 700 m L : 2,5 m T : 10 cm )	Kelurahan Persiakan, Jalan Beringin Gg. Tk. Al-Qofar Lk. V, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
189	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan ( P : 300 m L : 2,5 m )	Kelurahan Persiakan , Jalan P. Belitung Gg. E Lk. II, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
190	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan setapak ( P : 140 m L : 2,5 m )	Kelurahan Persiakan , Jalan P Belitung Gg. H Lk. II, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
191	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan ( P : 150 m L : 2,5 m )	Kelurahan Persiakan, Jalan P. Seribu Lk. III, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
192	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit ( P : 500 m L : 500 m L : 60 cm T : 70 cm )	Kelurahan Persiakan Jalan P. Samosir Lk. III dan I, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
193	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan ( P : 600 m L : 2 m )	Kelurahan Persiakan Jalan P. Belitung Gg. Madrasah Lk. V, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
194	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit ( P : 900 m L : 50 cm T : 50 cm )	Kelurahan Persiakan Jalan P. Belitung Lk. V, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
195	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Parit ( P : 120 m L : 50 cm T : 50 cm )	Kelurahan Persiakan Jalan P. Belitung Gg. Masjid Lk. V, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
196	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan ( P : 200 m L : 2,5 m )	Kelurahan Persiakan, Jalan Ikhlas Ujung Lk. VI, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
197	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan ( P 175 m L : 1,5 m )	Kelurahan Persiakan, Jalan P. Samosir Lk. I dan III, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
198	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit ( P : 120 m L : 50 cm T : 50 cm )	Kelurahan Bandar Sono, Jln Tengku Hasyim Gg. Famili Lk. I , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
199	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit ( P : 300 m L : 40 cm T : 40 cm )	Kelurahan Bandar sono, Jln. SM. Raja Gg. Dame Lk. 7 dan 8, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
200	ERNIWATI	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan aspal ( P : 150 m L : 3 m " )	Kelurahan Bandar sono, Gg. Bahagia Ujung Lk. VII , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
201	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rehab Parit ( P : 100 m L : 40 cm T : 60 cm )	Kelurahan Bandar sono, Jln. Gg Belitung Lk. III, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
202	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rehab Parit ( P : 100 m L : 40 cm T : 60 cm )	Kelurahan Bandar sono, Jln. Pulau Belitung Lk. IV , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
203	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Rehab Parit ( P : 100 m L : 50 cm T : 60 cm )	Kelurahan Bandar sono, Gg. Rukun Lk. IV, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
204	ERNIWATI	Pembangunan Tanggul Sungai	Lanjutan Bronjong Sungai Bahilang ( P : 30 m )	Kelurahan Bandar sono, Jln. SM. Raja Lk 9 Gereja Advent , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
205	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki Jalan (Panjang 500 m x Lebar 3 m)	Jln. Bakti GG. lele Lingkungan 2 Kel.Satria Kec.Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
206	ERNIWATI	Pembangunan Tanggul Sungai	Lanjutan Pembuatan Bronjong Sungai Bahilang ( P : 60 m)	Jln. P. Samosir Lk. IV , Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
207	ERNIWATI	Pembangunan Tanggul Sungai	Pembuatan Pintu Air 1 set Pintu	Jln. P. Samosir Lk. IV Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
208	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan Drainase ( P : 100 m L : 50 cm T : 50 cm )	Jln. Bahagia Lk. VI Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
209	ERNIWATI	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembuatan IPAL individu 100 Unit	Lingkungan IV s/d VIII Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
210	ERNIWATI	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki Jalan ( P : 300 m L : 3 m )	Jln. Tengku Hasyim Gg. Famili 1 dan 2 Lk. I Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
211	HUSIN, S.T.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan ( panjang= 100m x lebar 2m )	Jl. Abdul Rahim, Gg. Keluarga Lk. I, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
212	HUSIN, S.T.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan Conblok ( panjang=475 m x lebar 2,5 m )	Jl. Sopyan Zakaria, Gg. Sepakat, Lk. II, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
213	ERNIWATI	Pengadaan Bak Container/Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Bak Sampah Container ( P : 300 m L : 3 m )	Kantor Lurah Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
214	MUHAMMAD ERWIN HARAHAP, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan conblok (panjang =100m x lebar =2m)	Jl.OK M.Ali Lk IV Gang Mushollah Kel.Damar Sari Kec.Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
215	MUHAMMAD ERWIN HARAHAP, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan conblok (panjang=177 m x lebar 2 m)	Jl.OK M Ali Lk IV gang Jambu Kel.Damar Sari Kec.Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
216	ERNIWATI	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Jalan Cor Beton ( P : 150 m L : 2 m )	Gg. Akur Lk. II, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
217	MUHAMMAD ERWIN HARAHAP, S.E.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pembuatan drainase (panjang = 300 m x lebar = 50 cm)	Jln.Damar Sari Lk.IV Kel.Damar Sari Kec.Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
218	ERNIWATI	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Parit ( P : 150 m L : 3 m )	Kelurahan Padang Merbau , Gg. Sapu , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
219	ERNIWATI	Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Penyuluhan Hukum tentang Perdagangan Perempuan dan Anak	Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
220	ERNIWATI	Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Perlunya sosialisasi pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan agar masyarakat terhindar dari kekerasan perempuan dan anak	Kelurahan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
221	HUSIN, S.T.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Penambahan Tiang Listrik ( 3 tiang )	Gg. Rambutan, Lk. V, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
222	ERNIWATI	Bentuk peningkatan SDM PATBM	Sosialisasi atau peningkatan sapa ( Sahabat Perempuan dan anak )	Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
223	ERNIWATI	Insentif Kader Pendampingan PKDRT	Insentif Kader Pendamping PKDRT 9 Kader	Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
224	ERNIWATI	Pemberian bantuan plank, pakaian seragam, insentif/honor, peralatan kantor dan kebutuhan lainnya untuk lembaga kemasyarakatan (kepling, PKK, LPM/KPM, posyandu, karang taruna, KPM stunting)	Plank Kader Pendamping PKDRT 9 Unit	Kelurahan Bandar Sono, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
225	ERNIWATI	Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Perlunya Sosialisasi SAPA Volume 1 Kgt	Kelurahan Damar Sari, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
226	ERNIWATI	Insentif Kader Pendampingan PKDRT	Insentif Kader Pendamping PKDRT Rp. 500.000	Kelurahan Pasar Baru, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
227	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Rehabilitasi Jalan	REHABILITASI JALAN ( P = 600 M X L = 3 M )	Griya Prima BP7 Blok E 1 ( samping mesjid ) dan Jl. gunung papandayan II Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
228	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi jalan ( P =125 M x L = 3 M )	Jl.M Akub Hasibuan ( Belakang Gudang Sosro ) Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
229	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan ( P = 100 M x L = 3 M )	Jl.Ikhlhas Lk.I Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
230	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	saluran drainase ( P =125 M x L = 50 cm )	Jl. M Akub Hasibuan Lk.IV (belakang gudang sosro) kel. tanjung marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
231	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Permohonan pengadaan lampu jalan	Jl.Sudirman Gg.Pancasila Lk.III ,Kel Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
232	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	perbaiki drainase ( P = 500 m x L = 1.2 m x T = 70 cm )	Jl.Gunung martimbang , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
233	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Rehabilitasi Jalan	Perbaiki jalan (Panjang 400 m x Lebar 3 m)	Jln. Persatuan 2 GG.Palam Lingkungan 1 Kel.Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
234	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (Panjang 600 m x Lebar 60 cm)	Jln. Kipas Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
235	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (Panjang 500 m x Lebar 60cm)	Jln. Abdul Hamid Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
236	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	perbaiki jalan ( P = 150 M x L 2.6 M)	Jl. Bukit bunga Lingkungan 1 kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
237	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (Panjang 500 m x Lebar 80 cm)	Jln. Deblod Sundoro Kel. Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
238	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	perbaiki jalan rusak ( P = 200 M x L = 2.5 M )	Gg. Amanah Lingkungan 03 kot tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
239	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaiki Drainase (Panjang 450 m x Lebar 60 cm)	Jln. Antara Lingkungan 1 Kel. Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
240	BASYARUDDIN NASUTION, S.H.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	perbaiki jalan ( P = 220 M x L = 2.2 M )	Gang Tape Lingkungan 03 kota tebing tinggi, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
241	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan (Panjang 400 m x Lebar 3 m)	Jln.Abadi GG.Jati Lingkungan 3 Kel.Deblod Sundoro Kec.padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
242	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan (Panjang 400 m x Lebar 3 m)	Jln. H.M Sidik Lingkungan 2 Kel.Bagelen Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
243	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( Panjang 650 m x Lebar 3 m)	Jln. Berlian GG. Salak Lingkungan 3 Kel. Tambangan Hulu Kec.Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
244	H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Drainase (Panjang 650 m x Lebar 60cm)	Jln.Bakti Kel.Satria Kec.Padang Hilir , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
245	WARIS	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pengecoran Beton Jalan, P= 105m, L= 2.5m	Gang Sepakat Ling 4, Kel. Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
246	WARIS	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pengecoran Beton Jalan P= 80 m, L= 2 m	Gang Sukun Ling 3, Kel. Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
247	WARIS	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pengecoran Beton Jalan P= 120m, L= 2 m	Gang Kelapa Ling 3, Kel. Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
248	WARIS	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan P= 400, L= 3m	Jalan Melati Ling 3, Kel. Karya Jaya , Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
249	WARIS	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan jalan P= 500m, L= 3.5m	Jalan Karya Perjuangan, Kel. Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
250	WARIS	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan P= 300m, L= 3m	Jalan Karya Bersatu, Ling 4, Kel. Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
251	WARIS	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan P= 200m, L= 3.5m	Jalan Mawar Ling 3, Kel. Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
252	WARIS	Rehabilitasi Jalan	Pengaspalan Jalan P= 200m, L=3.5m	Jalan Melur Ling 3, Kel. Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
253	HUSIN, S.T.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Perbaikan Conblok ( Panjang = 400 m x Lebar = 2 m )	Jl. H.S Beringin, Gg. Jalal, Lk. VI, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
254	HUSIN, S.T.	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( Panjang =150m x Lebar=3m )	Jl. A. Nasution, Lk. I, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
255	HUSIN, S.T.	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( Panjang=500m x Lebar=3m )	Jl. Sofyan Zakaria, Lk. II, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
256	HUSIN, S.T.	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( Panjang=300m x Lebar=3,5m )	Jl. Bhayangkara, Lk. III, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
257	FAHMI TANJUNG, S.E.	Rehabilitasi Jalan	Permohonan Perbaikan Jalan Perumahan (P= 125M x L= 3M)	Jl. M.Akub Hasibuan (Belakang Gudang Sosro), Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
258	FAHMI TANJUNG, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Permohonan Perbaikan Jalan Perumahan (P= 160M x L= 2.5M)	Jl. Bukit Barisan Lk. I Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
259	FAHMI TANJUNG, S.E.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Permohonan Pembuatan Saluran Drainase ( P= 125M x L= 50CM)	Jl. M. Akub Hasibuan Lk. IV (Belakang Gudang Sosro) Kel. Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
260	FAHMI TANJUNG, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Permohonan Pengadaan dan Pemasangan Lampu sebanyak 4 Unit	Jl. Gunung Papandayan Blok F3 dan Blok C2 Lk. II Kel Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
261	FAHMI TANJUNG, S.E.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Permohonan Pembuatan Drainase Ukuran (P=100M x L= 50CM)	Jl. Ir H. Juanda Lk II. (Depan rumah Bapak Sely) Kel Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
262	FAHMI TANJUNG, S.E.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Permohonan Perbaikan Jalan Perumahan (P=150M x L=2.5M)	Jl. Bukit Sinabung Lk. I Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
263	FAHMI TANJUNG, S.E.	Pelatihan Kerajinan (tenun, ecoprint, sulam, patchwork, quilting)	Permohonan Peningkatan Keterampilan Melalui Pelatihan (Bengkel. Menjahit. Bordir. Salon Dan Elektronik)	Kelurahan Tanjung Marulak Lk I- IV, Kota Tebing Tinggi	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
264	HUSIN, S.T.	Rehabilitasi Jalan	Perbaikan Jalan ( Panjang=300m x Lebar=3,5m )	Jl. Pesantren, Lk. III, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
265	HUSIN, S.T.	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Pembuatan Conblok ( Panjang=300m x Lebar=2m )	Jl. Penghulu Tarip, Gg. Pinang, Lk. V, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
266	MUHAMMAD HAZLY AZHARI, S.T., M.Sc.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	pembuatan saluran drainase (P: 500 m L:40 cm T:50 cm)	Jln. Bukit Sinabung lk. 1 Kelurahan Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR
267	HUSIN, S.T.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Drainase ( Panjang=400m x Lebar= 80cm )	Jl. Kuburan Cina, Lk. V, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
268	HUSIN, S.T.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Perbaikan Drainase ( Panjang=300m x Lebar=80cm )	Jl. Namad Damanik, Lk. VII, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumut, Kota Tebing Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### 4.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2025

Perumusan isu strategis Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, Kondisi Tahun 2025 arah kebijakan dari RPD Tahun 2023 -2026 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis Global dan Nasional seperti masih tingginya tingkat kemiskinan dan tingginya angka stunting.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan pengurangan tingginya angka stunting dengan membuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam penurunan angka stunting, misalnya pemberian makanan tambahan, peningkatan kualitas sanitasi dan rumah layak huni, gerakan masyarakat sehat.

Kaitan dengan isu pembangunan infrastruktur jalan Tol yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota, Pemerintah kota Tebing Tinggi melakukan perubahan cara berpikir bahwa pembangunan jalan Tol adalah untuk memperlancar akses transportasi komoditas perdagangan dengan menyuarakan "Sudah ada jalan tol ke Kota Tebing Tinggi".

Tahun 2025 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran jangka menengah daerah. Pemulihan ekonomi di arahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha, juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor- sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar instansi perangkat daerah / lembaga / pemangku kepentingan dan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024 di Kota Tebing Tinggi, dilaksanakan secara tepat sasaran melalui program dan kegiatan pendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem, sebagai berikut : (1) Program perlindungan sosial dan subsidi secara terpadu kepada masyarakat miskin ekstrem., berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk pengurangan beban pengeluaran, pemenuhan hak dasar, dan perbaikan kualitas hidup kelompok miskin ekstrem; (2) Program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem., yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok miskin ekstrim. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu melakukan kegiatan : (1) Pendataan dan menetapkan Data Keluarga Miskin Ekstrem 2023-2026 Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah kelurahan; (2) Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 Kota Tebing Tinggi, beserta alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 Kota Tebing Tinggi, dalam rangka

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address); (3) Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat (keluarga miskin ekstrem) yang memerlukan rumah layak huni; dan (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2023, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 telah memasukkan program, kegiatan, sub kegiatan dukungan sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik ( Kesbangpol ) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 74,00 persen.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat. Adapun Arah kebijakan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 sesuai RPD Tahun 20245 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan
2. Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT
3. Pengembangan UMKM Go Digital dan Ekonomi Kreatif yang Terintegrasi
4. Pelayanan Perizinan Terintegrasi
5. Penggunaan Produk Lokal
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
7. Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan
8. Menerapkan Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
9. Memastikan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu
10. Pelayanan Publik yang Cepat dan Mudah
11. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar

#### **4.5 Inovasi Daerah**

Inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan Daya saing komoditi unggulan daerah dan berkreatifitas serta berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah Daerah. Hal ini dapat dicapai melalui suatu sistem inovasi Daerah berkaitan dengan keseluruhan proses pengembangan inovasi antar institusi pemerintah, lembaga penelitian, Badan usaha serta masyarakat yang mengedapnkan ilmu pengetahuan.

Peningkatan ekonomi kreatif merupakan salah satu program prioritas pada tahun 2025 yakni Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Untuk mencapai hal dimaksud maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus berinovasi dalam meningkatkan produk barang dan jasa.

Kota Tebing Tinggi telah ikut dalam perlombaan Inovasi tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh BALITBANG Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 dan telah meraih gelar juara 3 untuk Kategori tingkat Kota se Sumatera utara. Adapun Inovasi daerah yang diperlombakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8**  
**Inovasi Daerah**

No	Inovasi Tahun 2021	Keterangan
1	Aplikasi GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pencipta Agribisnis )	Juara 3 Tingkat Provinsi Sumatera Utara
2	Sentuhan dukcapil Tebing Tinggi	Nominasi Provinsi Sumatera Utara
3	Ayoo... Ke Dukcapil	Nominasi Provinsi Sumatera Utara
4	Empati Untuk Rakyat Tebing Tinggi	Nominasi Provinsi Sumatera Utara
5	SitalabajakunReb	Nominasi Provinsi Sumatera Utara

**a. Aplikasi GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pencipta Agribisnis )**

Aplikasi Gerakan Masyarakat Pencinta Agribisnis (GEMPITA) Kota Tebing Tinggi tercantum dapat surat Keputusan walikota Kota Tebing Tinggi No 500/2554/ Tahun 2019, merupakan gerakan bersama dari segenap pemangku kepentingan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang berorientasi agribisnis sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan daya saing serta daya beli masyarakat dan petani melalui penambahan aktivitas agribisnis berbasis teknologi dan informasi, dengan melibatkan stakeholder dan integrasi multi sektor serta pelaku bisnis dan pelaku usaha. GEMPITA Kota Tebing Tinggi dilaksanakan dengan membangun klaster-klaster agribisnis yang terdiri dari:

- 1 . Klaster Kampung Horti Organik Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan
2. Klaster Kebun Ubi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir
3. Klaster Kampung Wisata Terintegrasi Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu
4. Klaster Supersehat (Sentra Usaha Pertanian Sehati Terpadu) Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis
5. Klaster Padi Organik Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu.

Tujuan dari pembuatan Aplikasi GEMPITA ini adalah :

- a) Menciptakan wadah penjualan online produk-produk pertanian/peternakan /perikanan dan turunannya.

- b) Menciptakan wadah penjualan online produk-produk UMKM bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dan produk olahan turunannya.
- c) Menjadi sarana media pembayaran restribusi RPH (Rumah Potong Hewan) secara online, guna meningkatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- d) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa aplikasi organik yang bersumber dari transaksi penjualan kode unik.

#### **b. Aplikasi AYOO... KE DUKCAPIL**

Ayoo...ke dukcapil Suatu bentuk terobosan atau inovasi layanan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat mengurus kebutuhan dokumennya secara langsung ke disdukcapil.

Ayoo...ke dukcapil dilatarbelakangi adanya persepsi masyarakat bahwa berurusan ke kantor pemerintahan selama ini berhadapan dengan birokrasi yang berbelit-belit, tidak ramah, lambat, dan dikenakan biaya sehingga sebagian masyarakat enggan bahkan "takut" untuk datang langsung mengurus dokumen kependudukannya.

Ayoo...ke dukcapil ingin mengubah persepsi masyarakat, bahwa berurusan ke Dukcapil saat ini akan memberikan pengalaman yang menyenangkan karena konsep layanan seperti berada di cafe dan menghapus konsep kantor yang kaku, bersekat-sekat dan membosankan.

Ayoo...ke dukcapil memberikan kemudahan dalam pelayanan serta bebas calo, tersedia ruang tunggu yang nyaman dengan full AC, ruang bermain anak, ruang laktasi, petugas yang ramah, sarapan gratis untuk pengunjung, dan Dokumen siap cetak saat itu juga.

Ayoo...ke dukcapil sudah diterapkan sejak Juli 2020 dan mendapat respon yang baik dari segenap masyarakat Tebing Tinggi. Adapun Tujuan Aplikasi Ayoo...ke dukcapil untuk memberikan kemudahan dalam layanan dan suasana yang nyaman. - Meningkatkan animo masyarakat untuk berurusan langsung ke Dukcapil dan menghindari calo. - Meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat dan naiknya Nilai IKM.

#### **c. Aplikasi EMPATI UNTUK RAKYAT TEBING TINGGI**

Memperhatikan permasalahan pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian penduduk yang tidak optimal dan tidak sesuai ketentuan dalam waktu pelaporannya, maka area proyek perubahannya adalah dengan membangun suatu sistem atau aplikasi elektronik berbasis Android khusus untuk pelayanan Akta Kematian atau disingkat "EMPATI" dengan melibatkan Lurah dan Kepala Lingkungan sebagai operator pencatat peristiwa kematian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun tujuan dari Terobosan/Inovasi ini terwujudnya peningkatan kinerja pelaporan dan pencatatan peristiwa kematian penduduk melalui penerbitan Akta Kematian yang optimal dan tepat waktu melaporkan sesuai ketentuan Undang – Undang dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Aplikasi EMPATI (Elektronik Mobile Pelayanan Akta Kematian).

#### **d. Aplikasi SENTUHAN DUKCAPIL TEBING TINGGI**

Pelayanan Kependudukan yang belum optimal dan tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja pelayanan kependudukan yang rendah sehingga perlu diciptakan strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap permasalahan tersebut antara lain :

1. Penduduk belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan
2. Mindset sebagian besar penduduk bahwa berurusan ke Dukcapil itu sulit dan berbelitbelit.
3. Masih ada penduduk yang belum tahu prosedur, syarat dan tata cara pengurusan dokumen kependudukan.
4. Perjalanan yang jauh untuk mengurus dokumen kependudukan dan adanya biaya dalam pengurusan.

Adapun tujuan dari Terobosan/Inovasi ini terwujudnya peningkatan kinerja Pelayanan Kependudukan melalui penerbitan Akta Kelahiran, KTP-el, Kartu Keluarga, KIA, Perpindahan Keluar, dan Kedatangan yang optimal dan tepat waktu melaporkan sesuai ketentuan Undang – Undang dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Aplikasi SentuhanDukcapil.

#### **e. Aplikasi SITALAKBAJAKUNREB**

Portal Aplikasi SITALAKBAJAKUNREB (Sistem Informasi Tatalaksana, Analisis Jabatan Beban Kerja, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi) merupakan Kumpulan aplikasi yang dibangun dan diterapkan dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi berbasis web yang memuat akses ke berbagai aplikasi penunjang tatakelola pemerintahan diantaranya:

1. e-SAKIP (Aplikasi SAKIP)
2. e-Anjab dan ABK
3. e-Evaluasi Akuntabilitas (EVATAS)
4. SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)
5. E- Reformasi Birokrasi.

Dari kelima Aplikasi tersebut, semua telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi terutama di jajaran SKPD Pemerintah Kota untuk kelancaran pelaksanaan tugas, sedangkan untuk peningkatan layanan Pemerintah Kota kepada Masyarakatnya dapat dirasakan di SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti : Dinas Dukcapil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen tahunan berupa program, kegiatan dan sub-kegiatan dari pejabaran RPD Tahun 2023-2026 Tebing Tinggi. RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 yang berisi rencanan Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun 2023 dan target yang akan dicapai di Tahun 2025 dalam bentuk kerangka pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada dan menjawab aspirasi masyarakat. RKPD Tahun 2025 untuk mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, Pemerintah Standar Pelayanan minimal, maupun untuk perubahan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi memuat dokumen rencana tahunan yang berisi Program, Kegiatan, sub kegiatan yang merupakan penjabaran RPD Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Rencana program prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah.

#### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi /CSR/Hibah**

Untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan di Kota Tebing Tinggi, perlu dukungan Pendanaan dari berbagai pihak swasta maupun Nasional. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing - masing Kota, melalui kerja sama pendanaan untuk berbagi Kegiatan menurut sektor-sektor pembangunan yang berpedoman kepada fokus pembangunan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti sektor Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## 5.2 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi

Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi merupakan Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat guna mencapai target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD pada Tahun 2025. Selain itu kegiatan pembangunan di sinkronisasikan berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan Kelurahan, Kecamatan, dan Kota, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk RKPD tahun 2025 Kota Tebing Tinggi sudah mempertimbangkan Evaluasi Pembangunan tahunan dan Capaian yang akan dicapai dalam RPD 2023-2026 Kota Tebing Tinggi, hal ini dapat dilihat dalam lampiran Evaluasi RKPD TW IV tahun 2023 Kota Tebing Tinggi.

Adapun pagu indikatif masing-masing SKPD berdasarkan Anggaran Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi dapat diproyeksikan seperti berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi**  
**Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	203.229.961.549
2	Bidang Kesehatan	
	➤ Kesehatan	117.733.610.513
	➤ RSUD dr. Kumpulan Pane	63.256.613.813
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.176.791.939
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	22.339.415.444
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	➤ Satpol PP	6.631.700.723
	➤ BPBD	6.304.903.830
	➤ Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.813.569.772
6	Bidang Sosial	6.765.200.478
	<b>JUMLAH</b>	<b>480.161.768.061</b>

**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Bidang Tenaga kerja	6.312.059.284
2	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.520.936.212
3	Bidang Lingkungan Hidup	22.425.496.338
4	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.896.218.644
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	5.775.325.037
6	Bidang Perhubungan	8.955.876.756
7	Bidang Komunikasi dan Informatika	9.416.991.922
8	Bidang Penanaman Modal	6.237.274.315
9	Bidang Pemuda dan Olahraga	9.401.401.035
10	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.986.685.940
<b>JUMLAH</b>		<b>89.928.265.482</b>

**Urusan Pemerintahan Pilihan**

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Bidang Pertanian	13.814.325.610
2	Perdagangan	8.238.717.472
<b>JUMLAH</b>		<b>22.053.043.082</b>

**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Sekretariat Daerah	40.228.261.608
2	Sekretariat DPRD	21.834.034.044
<b>JUMLAH</b>		<b>62.062.295.652</b>

**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Perencanaan	8.980.321.631
2	Keuangan	31.558.025.715
3	Kepegawaian	8.314.597.415
<b>JUMLAH</b>		<b>48.852.944.761</b>

**Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Inspektorat Daerah	12.181.862.460
<b>JUMLAH</b>		<b>12.181.862.460</b>

**Unsur Kewilayahan**

NO	BIDANG	DAU
1	Kecamatan	
	➤ Kecamatan Bajenis	7.950.375.932
	➤ Kecamatan Padang Hilir	7.387.867.812
	➤ Kecamatan Padang Hulu	7.752.357.845
	➤ Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8.058.097.616
	➤ Kecamatan Rambutan	8.719.848.854
<b>JUMLAH</b>		<b>39.868.548.059</b>

**Unsur Pemerintahan Umum**

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU
1	Kesbang Linmas	6.996.811.616
<b>JUMLAH</b>		<b>6.996.811.616</b>

**Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi**

No	Sumber Dana	NOMINAL	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah sub Kegiatan
1	DAU	763.249.302.953,00	116	220	620

Alokasi Pagu Indikatif pagu indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2025, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah dan RPD Tahun 2025. Adapun jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut (Jumlah Program pada tabel dengan menyertakan Program Urusan Penunjang Pemerintah daerah Provinsi).

**Tabel 5.2**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**

NO	BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	7	20	130
2	Bidang Kesehatan			
	➤ Kesehatan	5	20	201
	➤ RSUD dr.Kumpulan Pane	2	3	5
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	41
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	5	14	27
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	➤ Satpol PP	2	11	19
	➤ BPBD	2	15	25
	➤ Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	11	18
6	Bidang Sosial	4	12	36
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
7	Bidang Tenaga kerja dan Perindustrian	4	9	17
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	14	44
9	Bidang Lingkungan Hidup	9	17	30
10	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	14	22
11	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	7	20	39
12	Bidang Perhubungan	2	15	25
13	Bidang Komunikasi dan Informatika	5	15	40
14	Bidang Penanaman Modal	6	13	28
15	Bidang Pemuda dan Olahraga	7	18	25
16	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	4	13	28
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>				
17	Bidang Pertanian	12	29	51
18	Perdagangan	9	18	29
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
19	Sekretariat Daerah	3	25	57
20	Sekretariat DPRD	2	20	41
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
21	Perencanaan	4	18	39



NO	BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
22	Keuangan	4	16	59
23	Kepegawaian	2	11	22
<b>Unsur Pengawasan Urusan Pmerintahan</b>				
24	Inspektorat Daerah	5	14	26
<b>Unsur Kewilayahan</b>				
	Kecamatan			
25	➤ Kecamatan Bajenis	5	13	25
26	➤ Kecamatan Padang Hilir	3	11	16
27	➤ Kecamatan Padang Hulu	4	12	22
28	➤ Kecamatan TebingTinggi Kota	4	13	21
29	➤ Kecamatan Rambutan	4	12	22
<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>				
30	Kesbang Linmas	6	13	32
<b>Total</b>				

Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi yang telah diinput SKPD pada Aplikasi SIPD RI 2025, terdapat pada lampiran Bab V RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi.

### **5.3 Sinergitas Program/kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi**

Adapun Sinergitas program/kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 5.3

## Sinergitas program/kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Rehabilitasi dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus	-	-	-	-	-	-
		Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama	-	-	-	-	-	-
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "SIEMAK" (Program Edukasi	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Perempuan dan Anak);	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-
		Pembangunan TITIK BACA E-Book Digital dan Pengembangan e-Library;	-	-	-	-	-	-
		Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan RSJ. Ildrem;	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	550.000.000	DINAS KESEHATAN	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);						
		Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.000.000.000	DINAS KESEHATAN	-
		Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150.000.000	DINAS KESEHATAN	-
		Optimalisasi Jangkauan lokasi dan pelayanan Kesehatan bergerak	-	-	-	-	-	-
		Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		SUMUT JUARA;						
		Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	176.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
		Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba);	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-
		Penguatan Edukasi Masyarakat Sadar dan Tangguh Bencana;						



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan			
		Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29.865.000	Dinas Sosial	-			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.218.000	Dinas Sosial	-			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	36.452.400	Dinas Sosial	-			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	36.452.400	Dinas Sosial	-			
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	Dinas Sosial	-			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	421.573.500	Dinas Sosial	-			
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	46.240.000	Dinas Sosial	-			
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	617.421.000	Dinas Sosial	-			
			2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pembangunan North Sumatra Skill Development	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Center (NS-SDC)						
		Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitas kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	-	-	-	-	-	-
		Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM)	-	-	-	-	-	-
		Travel Fair Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.500.000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-
		Pengembangan Wellness/Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Pola Kunjungan Wisata	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Terintegrasi dan Peningkatan Kualitas Calender						
		Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	-	-
		Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-
		Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan						



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Pameran Agro Industri Nasional;						
3.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jalan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Rekonstruksi Jalan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Rehabilitasi Jalan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Berkala Jalan	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Rutin Jalan	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pembangunan Jembatan	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Rehabilitasi Jembatan	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan	
		Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	26.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	
						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	120.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	230.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
					Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	450.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Pembangunan Tanggul Sungai	700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
							RUANG	
					Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Rehabilitasi Tanggul Sungai	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
					Normalisasi/Restorasi Sungai	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
		Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Regional Medan - Deli Serdang						
		Pengembangan SPAM Mebidang dan Pembangunan SPAM Seriti	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM				-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				9.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	
	Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu	-	-	-	-	-	-	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
		Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan pariwisata	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Satu Data Digital Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-
		Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU"	-	-	-	-	-	-
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	16.438.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.053.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	240.269.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	240.522.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2.727.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	2.727.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	44.145.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	64.073.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17.496.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2.328.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penatausahaan Pembiayaan Daerah	130.979.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	19.532.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	122.459.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	17.856.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	18.632.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	11.613.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	69.619.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15.988.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	95.274.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	63.445.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	13.368.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.756.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	15.710.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.948.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.500.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	122.895.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.090.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	149.894.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	118.118.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Pengamanan Barang Milik Daerah	183.268.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Penilaian Barang Milik Daerah	19.062.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	37.145.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program Kota Tebing Tinggi	Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Sub Kegiatan Kota Tebing Tinggi	Pagu Anggaran	SKPD	Keterangan
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	96.813.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
		Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	89.979.772	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), guna bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah.

#### 6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 6.1**  
**Penetapan Indikator Makro Pembangunan**  
**Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 (sampai bulan Maret)	Target Tahun ke-	
				2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi ( % )	3,98	Belum Rilis	2,50 – 5,00	2,50 – 5,00
2	Tingkat Kemiskinan ( % )	9,49	Belum Rilis	9,0	8,7
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24	Belum Rilis	6,10	6,00
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,17	Belum Rilis	77,50	78,00
5	Rasio Gini	0,31	Belum Rilis	0,30	0,30
6	Laju Inflasi (%)	2,3	Belum Rilis	-	-
7	Penurunan Emisi GRK	-	Belum Rilis	-	-

*Sumber dari BPS Kota Tebing Tinggi*

Indikator Makro Pembangunan Kota Tebing Tinggi telah mendukung dengan Indikator Makro pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a) Perbaikan ekonomi pasca pandemi menghasilkan tren yang positif pada tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,01 persen dan 5,05 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi.
- b) Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,49 persen pada Tahun 2023. Hal ini diakibatkan karena mulai pulihnya kembali perekonomian pasca pandemi covid-19. Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 8,15 persen dan persentase penduduk miskin Nasional yaitu sebesar 9,36 persen.
- c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,24 persen, lebih tinggi dari persentase Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 5,89 persen dan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,45 persen.
- d) Pada tahun 2023 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 78,17 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 75,13 poin dan IPM Nasional sebesar 72,91 poin. IPM Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan sebesar 2,00 poin atau 2,6 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 76,17 poin
- e) Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 mencapai angka 0,31 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,30. Pada Tahun 2023 Gini ratio Kota Tebing Tinggi lebih baik dari Gino Ratio Nasional yaitu sebesar 0,384.

## 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2023-2026, berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 yang tersaji pada tabel berikut

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kota Tebing Tinggi**

No	Indikator	Realisasi Tw I Tahun 2024	Target Tahun ke-	
			2025	2026
1	Prevalensi Stunting	1,86%	11%	9
2	Angka Kesakitan	0	10,35	8,75
3	Angka Harapan Hidup	0	73,75	74,50
4	Rata – Rata Lama Sekolah	0	11,21	11,50
5	Indeks Profesionalitas ASN	0	75	80
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	100%	100%
7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	-	70,65	70,73
8	Pengeluaran rill per kapita (Ribu/kapita)	-	13.746	14.080
9	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	7.415	175	178
10	Indeks Rasa Aman	-	74,05	75,05
11	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	69,17%	75,45%	76,00%
12	Persentase cakupan Sanitasi yang Layak	85,05%	88,20%	89,20%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	57,50	57,52
14	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	90%	100%
15	Nilai SAKIP	-	BB	A
16	Indeks Pelayanan Publik	-	Prima	Prima
17	Indeks SPBE	-	2,8	3,0
18	Nilai reformasi Birokrasi	-	BB	BB
19	Opini BPK terhadap LKPD	-	WTP	WTP

*Sumber RPD 2023-2026 Kota Tebing Tinggi*

Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi ditargetkan dapat terealisasi dengan menggunakan baseline data Tahun 2023 dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun berjalan 2024 yang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

### **6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Penetapan indikator kinerja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan gambaran terkait ukuran pencapaian keberhasilan Tahun 2023-2026 target capaian indikator kinerja di Kota Tebing Tinggi disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 6.4**  
**Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tebing Tinggi**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG</b>	<b>TARGET RKPD 2025 TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG</b>	<b>KET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>
1.	PDRB per Kapita	(juta/tahun)	74.010.000 - 74.020.955	45.125.749,408 - 45.131.919,58	
2.	Kontribusi PDB Industri/Pengolahan	(%)	19 - 19,5	11,596 - 11,9	
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	7,46 - 6,96	8,578 - 8,012	
4.	Rasio gini	Indeks	0,305 - 0,303	0,316 - 0,306	
5.	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	5,12	0,704	
6.	Indeks Modal Manusia		0,54	0,557	
7.	Indonesia Blue Economy Index	IBEI	7,6		
8.	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	1	1	
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	(%)	41	41,569	
10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5,2 - 5,4	4,997 - 4,99,748	
11.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	27	3.101,916	
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	5,51 - 5,19	5,94 - 594	
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/Perempuan	(%)	58,8 - 62,8	5,94 - 594	
14.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	(%)	2,3 - 2,5	63,985 - 69,45	
15.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)*	Ribu org	300.000 - 350.000	3,815 - 3,975	
16.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	(%)	0		



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPDP 2025 TARGET 2025 HASIL RAKORTEKBANG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
17.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	6		
18.	Ekspor Barang dan Jasa	%PDRB	0		
19.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	(%)	0		
20.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%PDRB	29 - 27		
21.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Kategori	0	38,245 - 37,763	
22.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	3,57		
23.	Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,45	4,106	
24.	Indeks Integritas Nasional	Poin	66,78	2,506 - 37,763	
25.	Indeks Demokrasi Indonesia/Provinsi (Sedang)	Poin	82,58 - 85,83		
26.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1,2 - 1,5		
27.	Tingkat Inflasi	(%)	1,75 - 3,75	1,037 - 1,296	
28.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	55,83 - 65,83		
29.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,4	55,426 - 65,354	
30.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	850 - 1.050	0,196	
31.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	0		

Sumber Rakortekbang Provinsi Sumatera Utara 2024

Bahwa target pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 sudah menjadi pedoman untuk menyusun Program, Kegiatan, Sub kegiatan di masing-masing SKPD yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi serta rencana kerja dan pendanaan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi merupakan lanjutan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi di Tahun Ketiga berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2025 Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Perangkat Daerah dan menjadi pedoman Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.